



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS ISI BERITA PROGRAM REDD+  
(STUDI PADA MEDIA INDONESIA *ONLINE* TAHUN 2010-2012)**

**SKRIPSI**

**LARASHAYU PRIMA HAPSARI**

**0906614162**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM EKSTENSI ILMU KOMUNIKASI MASSA**

**DEPOK**

**JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS ISI BERITA PROGRAM REDD+  
(STUDI PADA MEDIA INDONESIA *ONLINE* TAHUN 2010-2012)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Sosial**

**LARASHAYU PRIMA HAPSARI**

**0906614162**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**

**KEKHUSUSAN KOMUNIKASI MASSA**

**DEPOK**

**JULI 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama: Larashayu Prima Hapsari

NPM: 0906614162

Program Studi: Komunikasi Massa

Judul Skripsi:

**Analisis Isi Berita Program REDD+**  
**(Studi Pada Media Indonesia *Online* Tahun 2010-2012)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Program Studi Komunikasi Massa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Dr. Billy Sarwono Atmonobudi, M.A (

Penguji: Drs. Lilik Arifin, M.Si. (

Ketua Sidang: Dra. Askariani B Hidayat, M.Si. (

Sekretaris Sidang: Dra. Martini Mangkoedipoero, M.Si (

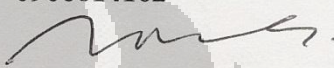
Ditetapkan di: Depok

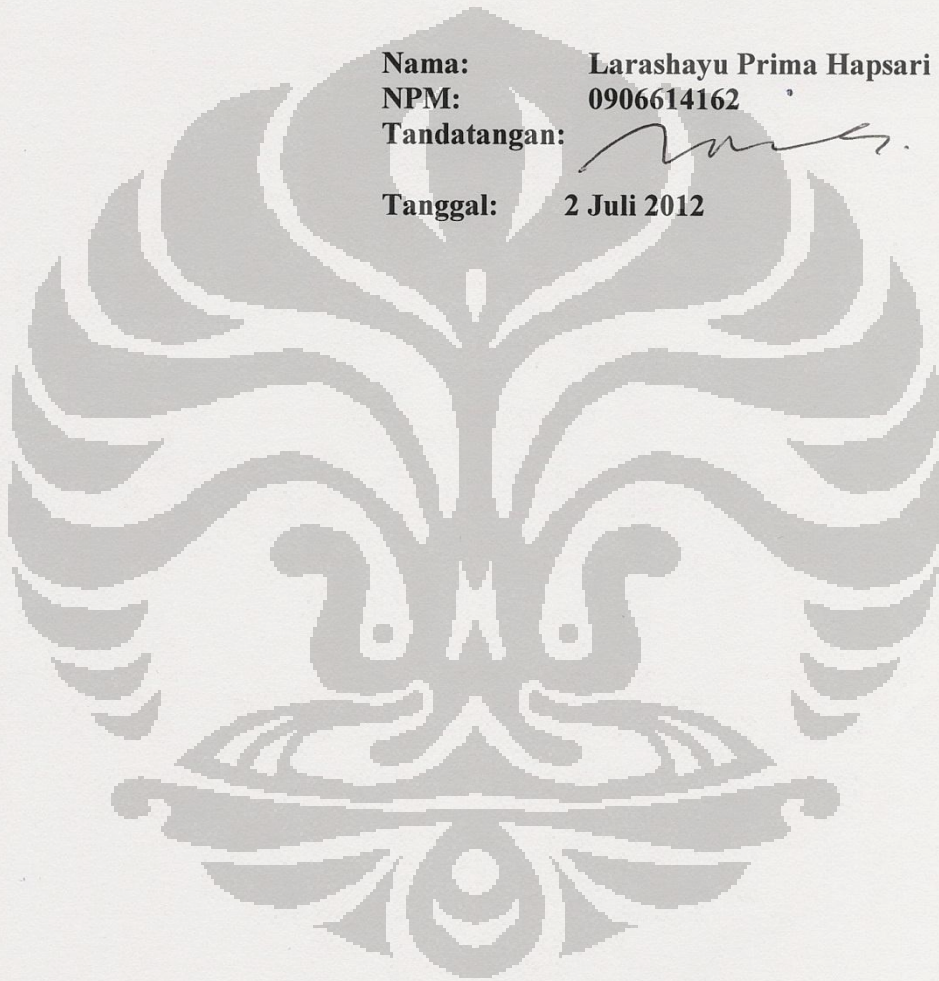
Tanggal: 2 Juli 2012



**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber,  
baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama:** Larashayu Prima Hapsari  
**NPM:** 0906614162  
**Tandatangan:**   
**Tanggal:** 2 Juli 2012





**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Larashayu Prima Hapsari  
NPM: 0906614162  
Program Studi: Komunikasi Massa  
Departemen: Ilmu Komunikasi  
Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya: Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Isi Berita Program REDD+  
(Studi Pada Media Indonesia *Online* Tahun 2010-2012)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 2 Juli 2012

Yang menyatakan



(Larashayu Prima Hapsari)

## ABSTRAK

Nama: Larashayu Prima Hapsari  
NPM: 0906614162  
Program Studi: Komunikasi Massa  
Judul: Analisis Isi Berita Program REDD+  
(Studi Pada Media Indonesia *Online* Tahun 2010-2012)

Skripsi ini membahas program REDD+ sebagai skema yang dibentuk PBB dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim, ditinjau dari gambaran yang dipublikasikan Media Indonesia *online*. Media Indonesia *online* dipilih karena selain menjadi salah satu media massa nasional beroplah tinggi, juga setiap saat dapat diakses secara cepat, mudah dan praktis. Konten berita dianalisis secara deskriptif menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berita mengenai program REDD+ di Media Indonesia *online* secara implisit mengutamakan ideologi pemilik modal dan mendukung kapitalisme pemerintah dalam mengelola keuntungan yang didapat dari program REDD+.

Kata kunci: analisis isi, REDD+, Media Indonesia *online*

## ABSTRACT

Name: Larashayu Prima Hapsari  
Student Number: 0906614162  
Study Program: Mass Communication  
Title: Content Analysis of News of REDD+ Program  
(Study in the Media Indonesia *Online*, Year 2010-2012)

This thesis is discussing about REDD+ program as scheme made by the UN in their effort to overcome the impact of climate change that was reviewed in online version of Media Indonesia. Media Indonesia online was chosen as it is one of the biggest circulation national media, easily accessed, simple and practical. The news content is about REDD+ program which analyzed descriptively using quantitative research method. The result of the research indicated that news about REDD+ in Media Indonesia online prioritizes implicitly the ideology of its shareholders and frames the government's capitalism in managing profit from REDD+ program.

Keywords: content analysis, REDD+, Media Indonesia *online*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasihNya memberikan keajaiban sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis tidak akan sanggup menyelesaikan tugas ini tanpa dukungan dari banyak pihak yang telah membantu kelancaran penulisan tugas akhir ini. Berbagai pasang surut telah dilalui dalam proses penulisan, kiranya hal itu bisa menjadi pembelajaran baik untuk penulis di kemudian hari.

Dalam penelitian ini penulis berharap agar mahasiswa dan masyarakat pada umumnya terpancing untuk berpikir kritis dan memiliki sikap yang tidak mudah terbawa arus atau mudah didominasi perspektif media, juga agar mahasiswa dan masyarakat semakin sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar dan mulai melakukan perubahan baik dari hal yang paling kecil namun berarti.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca maupun yang mengembangkan penelitian serupa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran positif demi kemajuan karya ini, juga penelitian-penelitian selanjutnya.

Depok, Juli 2012

Larashayu Prima Hapsari



## UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak kendala yang dialami peneliti dalam menulis skripsi ini, namun atas bantuan segenap pihak membuat kendala tersebut bisa peneliti lalui. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan hormat yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT atas kebesarannya memberikan segala kemudahan dan mewujudkan cita-cita penulis untuk terus belajar sebanyak mungkin.
2. Dr. Billy K Sarwono Atmonobudi, M.A., sebagai pembimbing skripsi. Peneliti belajar banyak hal dari beliau tentang hal-hal yang tidak akan peneliti dapatkan di tempat lain.
3. Dra. Askariani B Hidayat, M.Si. sebagai Ketua Program Sarjana Ekstensi Ilmu Komunikasi untuk saran dan bimbingannya.
4. Dra. Martini Mangkoedipoero, M.Si. sebagai Sekretaris Program Sarjana Ekstensi Ilmu Komunikasi.
5. Drs. Lilik Arifin, M.Si. sebagai Penguji Ahli dalam sidang skripsi yang memberikan kritik dan saran untuk skripsi peneliti.
6. Ibuk dan Mamah, terima kasih atas doa mereka yang selalu menyertai langkah hidup peneliti sampai kapanpun. Skripsi ini dipersembahkan untuk mereka berdua. Manajer peneliti di kantor Andritz Hydro yang selalu bersikap fleksibel dan toleran dalam memahami segala keruwetan penyusunan skripsi ini, Bapak Imawan Irawadi.
7. Teman-teman Kommas, Ais, Dwita, Astri, Via, Tari, Devfa, Nisa, Uli, Ifat, Gema, dan juga semuanya tanpa terkecuali. Sahabat-sahabat saya di luar kampus, Astrid, Tiwi, Ika, Anna, Reza, Helmi. *And most importantly, Adi Putrazein Siskati, the one that always got me on my nerves, thank you for your love, support, and everything.*

Depok, 2 Juli 2012

Larashayu Prima Hapsari

## DAFTAR ISI

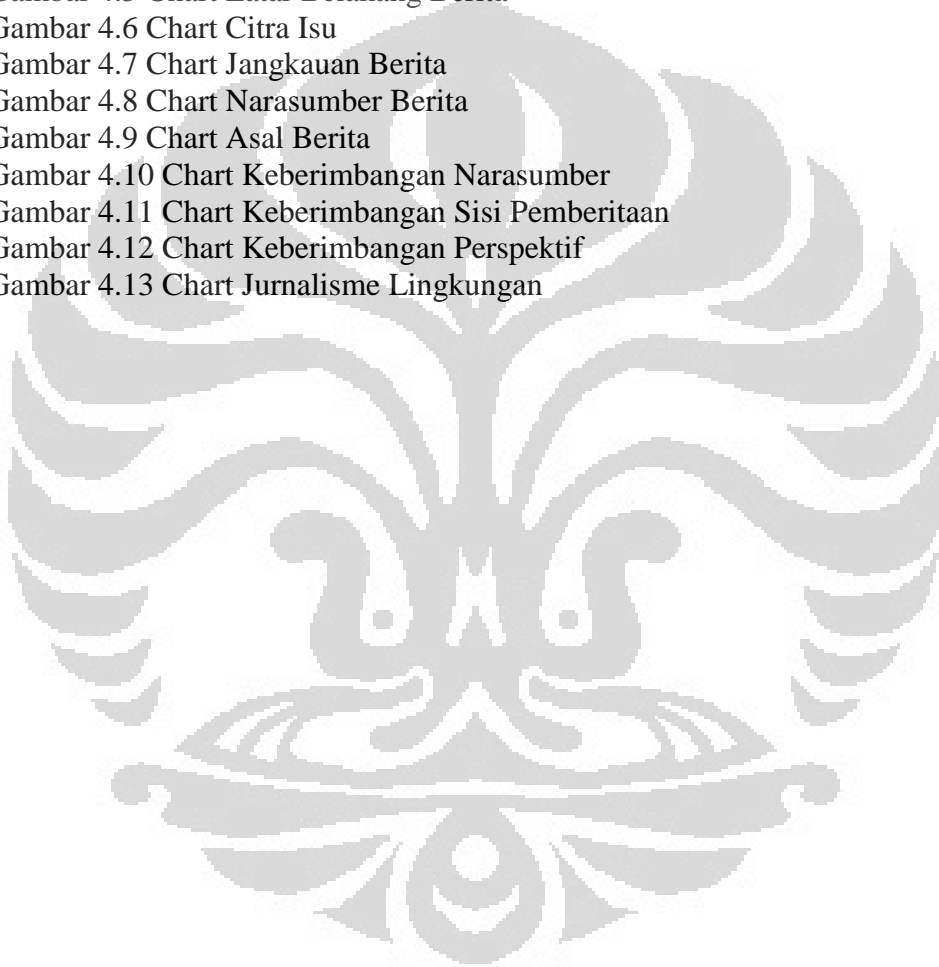
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Permasalahan	15
I.3. Pertanyaan Penelitian	19
I.4. Tujuan Penelitian	19
I.5. Manfaat Penelitian	19
a. Manfaat Akademis	19
II KERANGKA PEMIKIRAN	20
II.1. Agenda Media	20
II.2. Berita	22
II.3. Jurnalisme Lingkungan	27
II.4. Jurnalisme Konvensional & <i>Online</i>	32
II.5. <i>Media Online</i>	38
III METODOLOGI	41
III.1. Paradigma Penelitian	41
III.2. Pendekatan Penelitian	42
III.3. Sifat Penelitian	42
III.4. Metode Penelitian	42
III.5. Populasi	43
III.6. Sampel	43
III.7. Metode Penarikan Sampel	44
III.8. Unit Analisis	44
III.9. Uji Reliabilitas	45
III.10. Kategorisasi	46
III.11. Operasionalisasi Konsep	48
III.12. Keterbatasan Penelitian	52
III.13. Kelemahan Penelitian	52
IV ANALISIS	53

IV.1.	Profil Media Indonesia	53
4.1.1.	Sejarah Singkat	53
4.1.2.	Profil Pembaca	55
IV.2.	Analisis	56
4.2.1.	Agenda Media	56
4.2.1.1.	Jumlah Pemberitaan Program REDD+ Tahun 2010-2012	56
4.2.1.2.	Jumlah Pemberitaan Program REDD+ Berdasarkan Tema berita	57
4.2.1.3.	Jumlah Pemberitaan Program REDD+ Berdasarkan Panjang Berita	59
4.2.2.	<i>Issue Attributes</i>	60
4.2.2.1.	Latar Belakang Berita	60
4.2.2.2.	Citra Isu	62
4.2.2.3.	Jangkauan Berita	64
4.2.2.4.	Narasumber Berita	66
4.2.2.5.	Asal Pemberitaan	68
4.2.2.6.	Keberimbangan Narasumber	71
4.2.2.7.	Keberimbangan Sisi Pemberitaan	73
4.2.2.8.	Keberimbangan Perspektif	75
4.2.2.9.	Jurnalisme Lingkungan	76
V	INTERPRETASI	81
VI	PENUTUP	89
VI.1.	Kesimpulan	89
VI.2.	Implikasi Penelitian	90
6.2.1.	Implikasi Akademis	90
VI.3.	Rekomendasi	90
6.3.1.	Rekomendasi Akademis	90
	DAFTAR PUSTAKA	91
	LAMPIRAN	



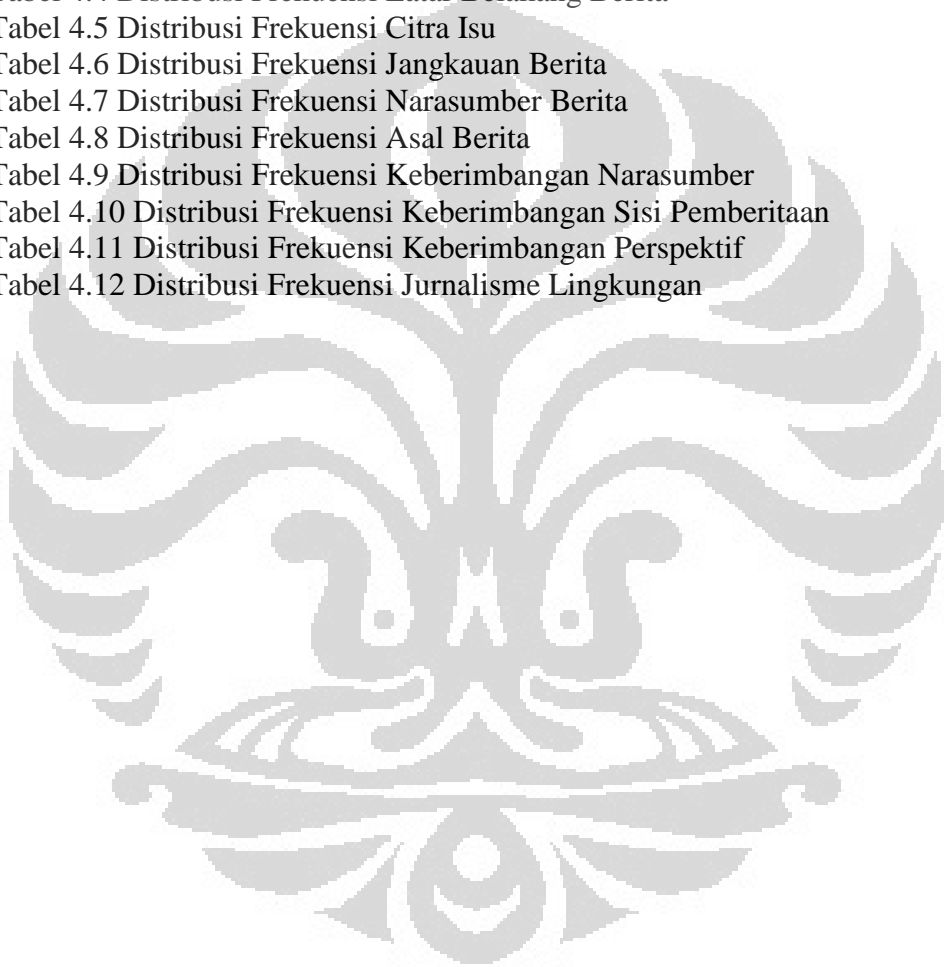
## DAFTAR GAMBAR

<b>Daftar Gambar</b>	<b>Hal</b>
Gambar 4.1. Chart Profil Pembaca Media Indonesia	55
Gambar 4.2 Chart Frekuensi Berita Tahun 2010-2012	56
Gambar 4.3 Chart Tema Berita REDD+	58
Gambar 4.4 Chart Panjang Berita REDD+	60
Gambar 4.5 Chart Latar Belakang Berita	61
Gambar 4.6 Chart Citra Isu	63
Gambar 4.7 Chart Jangkauan Berita	65
Gambar 4.8 Chart Narasumber Berita	67
Gambar 4.9 Chart Asal Berita	69
Gambar 4.10 Chart Keberimbangan Narasumber	72
Gambar 4.11 Chart Keberimbangan Sisi Pemberitaan	74
Gambar 4.12 Chart Keberimbangan Perspektif	76
Gambar 4.13 Chart Jurnalisme Lingkungan	78



## DAFTAR TABEL

<b>Daftar Tabel</b>	<b>Hal</b>
Tabel 3.1 Ilustrasi Penulisan Reliabilitas	46
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Tahun Produksi Berita	56
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Tema Berita REDD+	57
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Panjang Berita REDD+	59
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Latar Belakang Berita	61
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Citra Isu	63
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Jangkauan Berita	65
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Narasumber Berita	66
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Asal Berita	69
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Keberimbangan Narasumber	71
Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Keberimbangan Sisi Pemberitaan	73
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Keberimbangan Perspektif	75
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Jurnalisme Lingkungan	77



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Permasalahan lingkungan telah menjadi masalah krusial. Kondisi lingkungan mulai menunjukkan gejala-gejala kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam besar-besaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa bumi mungkin tidak akan bisa menjadi tempat tinggal lagi beberapa tahun mendatang karena kehabisan sumber daya dan sudah tidak layak huni.

Dalam kertas kebijakan *Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit* tahun 2010 disebutkan, perekonomian Indonesia bergantung pada sumberdaya alam, khususnya dari ekosistem laut dan hutan. Keberlanjutan kawasan-kawasan ekosistem tersebut tidak hanya terancam oleh faktor-faktor tradisional antara lain: perubahan jumlah penduduk, perkembangan industri, dan urbanisasi. Faktor-faktor tersebut mempercepat proses konversi lahan, penggundulan hutan skala besar, kebakaran lahan, kerusakan habitat asli hewan dan tumbuhan, kerusakan daerah tangkapan air dan eksploitasi sumberdaya kelautan, tetapi saat ini berbagai ancaman tersebut juga akan semakin diperburuk oleh adanya perubahan iklim.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 13 ribu, dan panjang kawasan pesisir mencapai 80 ribu km. Dengan total populasi mencapai 231 juta jiwa, diperkirakan sekitar 41,6 juta orang tinggal di kawasan pesisir pulau-pulau utama di Indonesia adalah tempat beroperasinya berbagai industri, aktivitas ekonomi dan infrastruktur. Diperkirakan aktivitas di kawasan pesisir menyumbang 25 persen Pendapatan Domestik Bruto dan menyerap 15 persen tenaga kerja (MoE, 2007).

Hutan Indonesia berpotensi sebagai penyimpanan karbon (Tumiwa, 2010). Sebagai negara dengan luas tutupan hutan tropis ketiga di dunia setelah Brazil dan



Republik Demokratik Congo, Indonesia memiliki potensi sebagai penyimpan dan penyerap karbon yang besar. Selain itu kawasan hutan dan laut Indonesia juga menyimpan keanekaragaman hayati yang melimpah. Indonesia tercatat sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar kelima di dunia. Kawasan laut Indonesia yang seluas 33 juta hektar adalah habitat bagi 450 spesies karang (*coral*), dan mengandung 25 persen jenis ikan di dunia, termasuk varietas ikan karang yang langka. Menurut Kementerian Kehutanan pada tahun 2000, keanekaragaman hayati yang kaya dan kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi memberikan pelayanan ekosistem dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang yang kehidupannya bergantung pada laut dan hutan (Tumiwa, 2010).

Kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global berpotensi menciptakan kerugian ekonomi bagi Indonesia. Berdasarkan data kenaikan permukaan air laut setinggi 1,1 meter pada tahun 2010 akan mengakibatkan hilangnya 90,260 km<sup>2</sup> kawasan pesisir dengan potensi kerugian ekonomi sebesar US\$ 25,56 milyar (Susandi, 2008).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, yang merupakan salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) yang cukup signifikan di dunia. Emisi GRK yang terbesar disumbangkan oleh kegiatan penggundulan hutan (deforestasi) dan perubahan tata guna lahan. Luas Indonesia mencapai hampir 2 juta kilometer persegi, dengan luas cakupan hutan pada tahun 2005 mencapai 88,49 juta hektar, yang telah berkurang dari 116.65 juta hektar pada tahun 1990 (WRI, 2006).

Indonesia adalah peringkat kedua, setelah Brazil, untuk tingkat kehilangan wilayah tutupan hutan (Hansen *et al*, 2009). Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan selama periode 2000-2005 Indonesia kehilangan kawasan hutan sebanyak 1,87 juta hektar per tahun. Data resmi deforestasi dari Kementerian Kehutanan (2010) menunjukkan laju deforestasi yang beragam pada kurun 1990-2010, dengan rata-rata laju deforestasi tahunan sebesar 1,9 juta hektar. Berkurangnya tutupan hutan terjadi karena proses konversi kawasan hutan

dan alih fungsi hutan secara massal untuk kegiatan produksi kayu, perkebunan, pertambangan, dan pertanian (Tumiwa, 2010).

Mengutip buku Sosiologi Lingkungan tulisan Rachmad K Dwi Susilo yang menyebutkan pernyataan Sony Keraf, bahwa dalam konteks perlindungan lingkungan ada beberapa kelemahan antroposentrisme. Antara lain, mengabaikan masalah-masalah lingkungan yang tidak langsung menyentuh kepentingan manusia, kepentingan manusia untuk mengeksploitasi selalu berubah-ubah dan berbeda-beda kadarnya, dan yang dipikirkan hanya kepentingan jangka pendek yang berorientasi pada kepentingan ekonomi (Keraf, 2002).

Modernitas diukur dengan tindakan-tindakan konsumsi. Konsumsi bukan lagi sekedar sarana untuk bertahan hidup atau menjaga kelangsungan hidup, tetapi ia telah berubah menjadi hidup itu sendiri. Konsumsi merupakan gaya hidup baru yang diyakini sebagai salah satu simbol modernitas. Akibatnya ia menjadi semacam candu yang tidak bisa dikendalikan (Susilo, 2008).

Sebagai konsekuensi menuruti kebutuhan nafsu manusia ini, baik negara maupun masyarakat berlomba-lomba mencari sumber material untuk memanjakan nafsu mereka, sumber daya alam dieksploitasi secara luas. Semakin berhasil manusia mengeksploitasi sumber daya alam, semakin sukses manusia mengendalikan hidupnya, semakin banyak pula *material income* yang didapatkan. Demi perkembangan peradaban seperti itu, kondisi lingkungan menjadi konsekuensi yang dipilih untuk dikorbankan (Susilo, 2008). Konsekuensi ini menimbulkan rusaknya ekosistem dan berbagai efek buruk lainnya terhadap bumi dan atmosfer secara mengkhawatirkan yang bisa dirasakan oleh seluruh manusia di segala penjuru negara.

Hasil kajian ADB tahun 2009 dalam kertas kebijakan *Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit* tahun 2010 menunjukkan bahwa Asia Tenggara berkontribusi sebanyak 12% terhadap total emisi GRK di dunia pada tahun 2000. Dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi yang cepat, angka kontribusi ini

diperkirakan akan terus meningkat. Kawasan ini mempunyai peranan penting dalam pengurangan emisi GRK global di masa mendatang. Dalam skenario emisi tinggi, suhu tahunan rata-rata di empat negara –Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam–, diperkirakan meningkat rata-rata 4,8°C sampai tahun 2100 dari tingkat suhu rata-rata pada tahun 1990; permukaan laut dunia rata-rata diperkirakan meningkat 70 sentimeter selama periode yang sama, dengan konsekuensi yang mengerikan bagi kawasan ini. Indonesia, Thailand, serta Vietnam diperkirakan akan mengalami cuaca yang lebih kering dalam 2-3 dekade mendatang (Adi, 2010).

Beberapa masalah bergeser dari timbulnya masalah lokal yang berdampak global pada seluruh ekosistem planet ini karena saling terhubung satu sama lain. Masalah global terjadi akibat timbunan masalah lokal dari jenis yang sama, antara lain seperti hujan asam yang berasal dari banyak cerobong asap tertentu yang menyebabkan gundulnya pepohonan atau *defoliation* (Attfield, 2010). Pada saat bencana tsunami di Aceh dan Sumatra Utara yang tak terlupakan beberapa tahun yang lalu, jumlah korban bisa ditekan jika hutan-hutan mangrove di tepi pantai masih terpelihara. Pohon-pohon mangrove itu bisa berfungsi sebagai penahan ombak air laut agar tidak langsung mengenai pemukiman-pemukiman penduduk. Tetapi kenyataannya hutan-hutan mangrove tersebut telah digunduli dan digantikan dengan gedung-gedung perkantoran dan menjamurnya pemukiman penduduk (Susilo, 2008).

Contoh lain masalah lokal yang berdampak pada atmosfer secara global, misalnya emisi karbon dari knalpot kendaraan (salah satu contoh konsumsi minyak sebagai bahan bakar) menyumbang bagi masalah polusi yang terus menumpuk dari pusat-pusat populasi yang tersebar ke seluruh penjuru dunia, turut memicu perubahan iklim global melalui efek rumah kaca. Penebangan hutan tanpa izin berupa pembalakan liar juga menyumbang masalah sistemik global karena berdampak pada hilangnya kesuburan tanah, baik melalui erosi, salinasi, atau polusi kimiawi lainnya. Contoh tersebut menunjukkan bagaimana tindakan-tindakan yang nampaknya kecil dan bersifat lokal dapat mempengaruhi lingkungan global



(Attfield, 2010). Karena dampak-dampak tersebut meluas dan jauh dari tindakan-tindakan kita, kita tidak mungkin dapat mengelak untuk menyikapi hal-hal tersebut. Hendaknya kita mampu membatasi dan menghindari hal terburuk dari dampak tersebut, juga menumbuhkembangkan minat untuk melestarikan ketimbang merusak bumi kita perlahan-lahan. Kita membutuhkan pihak-pihak besar dan berpengaruh untuk memulai pembenahan atas apa yang telah rusak.

Berdasarkan sumber pustaka Seri Hukum dan Keadilan Iklim tahun 2010 (REDD di Indonesia, ke manakah akan melangkah?), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sekretariat *Climate Change* (Perubahan Iklim) menyelenggarakan beberapa konferensi kenegaraan khusus untuk membahas masalah-masalah perubahan iklim dan cara-cara penanggulangannya, karena pemicu masalah-masalah tersebut sudah mengakar ke gaya hidup dan menjadi bagian dari perkembangan peradaban masyarakat modern sehingga sulit dihindari. Seluruh negara, termasuk penyumbang emisi terbesar dunia: Amerika Serikat, Cina, Rusia, juga India, hadir dalam konferensi-konferensi yang diselenggarakan oleh Sekretariat *Climate Change* ini, salah satunya ‘Copenhagen Accord’ pada December 2009. Pertemuan ini bertujuan untuk membicarakan tindak lanjut ‘*The Kyoto Protocol’s Clean Development Mechanism*’ (Mekanisme Pembangunan Bersih Protokol Kyoto) dan perpanjangan programnya.

Masih dari sumber yang sama, Copenhagen Accord membicarakan batasan naiknya suhu pada masa-masa industri, tidak boleh lebih dari 2 derajat celsius dari suhu saat ini untuk mencapai target temperatur beberapa dasawarsa ke depan pada tahun 2020 atau 2050 ketika suhu bumi diperkirakan melebihi toleransi yang membahayakan apabila tidak ditekan. Energi yang dihemat dalam penggunaannya oleh populasi manusia dapat menghasilkan dana yang dimanfaatkan untuk membantu negara-negara berkembang ikut serta dalam program ini, karena bagaimanapun juga program ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Suhu bumi saat ini sedang mengalami peningkatan dan kondisi ini lazim disebut pemanasan global. Pemanasan global diindikasikan berdampak pada terjadinya

perubahan iklim. Pemanasan global terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK), utamanya karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ) yang terjadi karena pembakaran bahan bakar fosil dan alih guna lahan, khususnya deforestasi hutan tropis. Perubahan iklim terbukti telah menunjukkan dampak bagi kelangsungan kehidupan di muka bumi. Bergesernya musim hujan dan kemarau telah mengakibatkan kebingungan bagi petani untuk menentukan masa tanam dan masa panen. Kenaikan permukaan air laut mengancam kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di daerah pantai, bahkan berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil. Ancaman badai menyebabkan nelayan sulit mencari ikan di laut, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa bumi mungkin tidak akan bisa menjadi tempat tinggal yang layak huni bagi manusia.

Ketika bumi menerima panas dari matahari, secara alami sebagian panas akan terperangkap di atmosfer akibat adanya beberapa jenis gas. Gas-gas yang menangkap panas tersebut dikenal sebagai gas rumah kaca (GRK) karena cara kerjanya mirip rumah kaca (*greenhouse*), di mana suhu di dalamnya diatur agar cukup hangat sehingga tanaman dapat tumbuh. Terperangkapnya panas oleh gas-gas di atmosfer dikenal dengan istilah 'efek rumah kaca' (Aliadi *et al*, 2008).

Sebenarnya efek rumah kaca diperlukan agar permukaan bumi cukup hangat untuk didiami. Sayangnya aktivitas manusia membuat konsentrasi GRK semakin tinggi dan menyebabkan suhu permukaan bumi semakin panas sehingga terjadilah perubahan iklim. Emisi dari pembangkit listrik dan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil (seperti minyak bumi dan batubara) memungkinkan sumber utama *karbondioksida* ( $\text{CO}_2$ ). Gas ini merupakan GRK yang memiliki pengaruh terbesar terhadap terjadinya perubahan iklim.  $\text{CO}_2$  juga terkandung dalam jumlah yang besar pada pohon, sehingga kebakaran dan penebangan hutan menyebabkan meningkatnya konsentrasi GRK (Aliadi *et al*, 2008).

Industri negara maju telah menyumbang emisi GRK sebesar 70%, yang berasal dari sektor energi, transportasi, industri, bangunan dan energi lain. Sedangkan

emisi yang dihasilkan negara berkembang hanya 30% yang lebih banyak berasal dari sektor non-energi seperti sampah, pertanian dan penggunaan lahan, termasuk penebangan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa negara industrilah yang seharusnya mempunyai tanggung jawab besar dalam pengurangan emisi. Mereka harus memperbaiki teknologi agar lebih ramah lingkungan. Demikian pula gaya hidup masyarakatnya harus diubah agar tidak boros energi (Aliadi *et al*, 2008).

Jika bumi masih terus memanas, pada tahun 2050 akan terjadi kekurangan air tawar, sehingga kelaparan pun akan meluas seantero jagat. Udara akan sangat panas, jutaan orang berebut air dan makanan, napas tersengal oleh asap dan debu. Rumah-rumah di pesisir terendam air laut. Luapan air laut makin lama makin luas, sehingga akhirnya menelan seluruh pulau. Harta benda akan lenyap, begitu pula nyawa manusia. Secara umum perubahan iklim akan membawa perubahan kepada parameter-parameter cuaca, yaitu temperatur, curah hujan, tekanan/kelembaban udara, laju serta arah angin, kondisi awan, dan radiasi matahari. Perubahan pada curah hujan akan berdampak pada sektor-sektor yang terkait dengan air, yaitu sumber daya air, pertanian, infrastruktur (termasuk pemukiman, transportasi, PLTA/Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan penataan ruang), perikanan, rawa dan lahan gambut, serta pantai (Aliadi *et al*, 2008).

Di Indonesia gejalanya telah terjadi. Sepanjang tahun 1980-2002, suhu minimum kota Polonia, Sumatera Utara, meningkat  $0.17^{\circ}\text{C}$  per tahun. Tanda yang kasat mata adalah menghilangnya salju yang menyelimuti satu-satunya tempat bersalju di Indonesia, yaitu gunung Jaya Wijaya di Papua. Hasil studi yang dilakukan Pusat Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut, Institut Teknologi Bandung (2007) menunjukkan bahwa permukaan air laut Teluk Jakarta meningkat setinggi 0.8 cm. Jika suhu bumi terus meningkat, diperkirakan pada tahun 2050 daerah-daerah di Jakarta seperti Kosambi, Penjaringan, Cilincing, dan Bekasi seperti Muaragembong, Babelan, dan Tarumajaya secara keseluruhan akan terendam. Diperkirakan pula dalam 30 tahun mendatang sekitar 2.000 pulau di Indonesia akan tenggelam, jutaan orang akan kehilangan tempat tinggal, begitu pula aset-aset usaha pariwisata pantai (Aliadi *et al*, 2008).

Pada tahun 2080 sebagian Sumatera dan Kalimantan akan lebih tinggi curah hujannya dengan 10%-30% selama musim barat. Sebaliknya di Jawa dan Bali akan lebih kering 15%. Variasi musim dan cuaca ekstrim seperti El Nino akan lebih dahsyat dan signifikan dalam meningkatkan resiko kebakaran hutan selama masa musim kering Indonesia. Kebakaran hutan yang sangat merusak di Indonesia pada 1997-1998 telah mengakibatkan kerugian sebesar 9 milyar dollar AS (Aliadi *et al*, 2008).

Deforestasi, yang terjadi terutama akibat konversi hutan menjadi lahan pertanian kini terus berlanjut hingga mencapai tingkat mengkhawatirkan, yaitu sekitar 13 juta hektar per tahun berdasarkan data dari tahun 1990-2005 (*Climate Change Media Partnership*, 2009). Deforestasi mengakibatkan lepasnya karbon yang awalnya tersimpan di dalam pohon sebagai emisi karbondioksida. Hal ini berlangsung dengan cepat apabila kayu dan dedaunan mengalami pelapukan secara alami.

Setiap tahun sekitar 1,7 juta ton karbon dilepaskan sebagai akibat dari perubahan pemanfaatan lahan, terutama dari deforestasi hutan tropis. Angka ini mewakili sekitar 17% emisi global tahunan, lebih besar daripada angka emisi yang ditimbulkan dari sektor transportasi dunia. Total wilayah hutan di dunia adalah sekitar 4 milyar hektar, hampir 30% dari wilayah daratan bumi. Sekitar 56% dari hutan itu berlokasi di wilayah tropis dan subtropis. Sejumlah 1.2 milyar penduduk dunia diperkirakan menggantungkan penghidupan kepada hutan dan sekitar 2 milyar penduduk (sepertiga dari total populasi dunia) menggunakan bahan bakar biomasa, terutama kayu bakar untuk keperluan memasak dan menghangatkan rumah mereka (*Climate Change Media Partnership*, 2009).

Deforestasi merupakan kontributor utama terjadinya perubahan iklim. REDD+ menjadi sebuah inisiatif yang bertujuan memperlambat hilangnya hutan. *Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation and Enhancing Carbon Stocks in Developing Countries* (REDD+) atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan penambahan cadangan karbon hutan di negara

berkembang, merupakan mekanisme yang diajukan bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan membayar sejumlah negara berkembang agar menghentikan kegiatan penebangan hutan mereka (*Climate Change Media Partnership*, 2009).

REDD+ telah menjadi subjek perdebatan sejak Papua Nugini dan Kosta Rika menjabarkan proposal pengurangan emisi deforestasi pada diskusi perubahan iklim pada tahun 2005. Tidak lama sesudah itu, ide tersebut berkembang dengan mengikutsertakan isu ‘degradasi hutan’, diikuti oleh berbagai usul penambahan isu tentang agroforestri dan pertanian. Tanda ‘plus’ di REDD+ menambahkan konservasi dan pengelolaan hutan secara lestari, pemulihan hutan dan penghutanan kembali, serta peningkatan cadangan karbon hutan. Dengan cepat REDD+ menjadi faktor yang sangat penting dalam berbagai negosiasi perubahan iklim internasional (*Climate Change Media Partnership*, 2009).

REDD+ telah menjadi bagian penting perbincangan dalam proses kebijakan perubahan iklim global dan nasional. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga pelepas karbon, dengan lebih dari 80% emisi nasional berasal dari perubahan tataguna lahan—terutama deforestasi. Ini membuat kebijakan REDD+ di Indonesia tidak hanya penting secara nasional, tetapi juga global. Sampai saat ini, analisis kebijakan perubahan iklim terpusat pada persoalan global, dengan sedikit perhatian pada perbincangan tingkat nasional, khususnya di negara yang sedang berkembang. Lebih lanjut, analisis tingkat nasional cenderung mengacu pada rekomendasi kebijakan umum tentang apa yang seharusnya dilakukan, padahal semestinya lebih mempertimbangkan persoalan yang diangkat dalam pembicaraan tersebut (Cronin & Santoso, 2010).

‘Peran penting’ hutan dalam mitigasi perubahan iklim dan kebutuhan akan ‘penetapan secepatnya’ mekanisme REDD+ secara resmi disahkan dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*UN Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) dalam Kesepakatan Kopenhagen, Desember 2009 (FCCC/CP/2009/L.7). Gagasan dasarnya ialah agar negara



berkembang dan kaya hutan memperoleh imbalan karena melestarikan hutan mereka. Ini melibatkan penetapan nilai karbon hutan yang akan memungkinkan konservasi hutan bersaing secara finansial dengan pemicu utama deforestasi, antara lain konversi pertanian, penebangan hutan, dan pembangunan prasarana. Selain untuk penyimpanan karbon, REDD+ juga diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan yang penting, misalnya pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan kemiskinan, dan perbaikan tata kelola hutan (Cronin & Santoso, 2010).

REDD+ akan melibatkan sejumlah besar perpindahan uang dari negara maju ke negara berkembang sebagai bagian dari komitmen mereka di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk mengurangi dampak emisi karbon mereka. REDD+ juga menawarkan peluang bagi penyelamatan salah satu ekosistem dunia yang paling berharga. Hutan tidak lagi hanya dipandang sebagai sumber kayu yang menanti untuk dipanen atau lahan yang menunggu giliran untuk dibuka bagi kepentingan pertanian (*Climate Change Media Partnership, 2009*).

Nilai tegakan hutan tidak hanya berasal dari kayu dan simpanan karbonnya, namun juga dari perannya sebagai daerah resapan air, pengatur cuaca dan sumber makanan serta obat-obatan. Hutan juga dinilai atas kekayaan keanekaragaman hayati sehingga hilangnya unsur-unsur tersebut akan menyebabkan terjadinya krisis global serius. Para pendukung REDD+ menyatakan apabila fungsi-fungsi tersebut dipahami sebagai sebuah jasa ataupun komoditas, maka nilai hutan akan meningkat dan berbagai jasa tersebut dapat dipasarkan untuk memperoleh imbalan. Hal tersebut juga akan memperbesar pendapatan masyarakat marjinal yang berperan sebagai pengelola hutan (*Climate Change Media Partnership, 2009*).

Tindakan apapun yang ditempuh untuk menghentikan terjadinya perubahan iklim tidak akan berhasil kecuali jika deforestasi dapat diturunkan secara drastis. Beberapa usulan mengarah pada pendanaan antara pemerintah dan sektor swasta.

Perdagangan karbon didasarkan pada pemikiran bahwa sejumlah perusahaan dan pemerintah dapat berperan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dengan cara membayar pengurangan karbon yang terjadi di tempat lain dalam sebuah sistem ekonomi global. REDD+ memungkinkan dikeluarkannya kredit yang menghitung jumlah karbon yang tersimpan dengan tidak menebang pohon (*Climate Change Media Partnership, 2009*).

Kelebihan dari perdagangan karbon adalah dapat menghasilkan uang dengan cepat. Kekurangannya adalah pasar karbon yang dibanjiri oleh kredit REDD+ akan semakin mengurangi nilai karbon yang memang sudah rendah jika komitmen mitigasi tidak ditingkatkan. Rendahnya nilai karbon relevan dengan rendahnya insentif bagi perusahaan untuk beralih ke teknologi yang dapat mengurangi emisi karbon (*Climate Change Media Partnership, 2009*).

Negara berkembang akan mendukung mekanisme REDD+ secara sukarela jika pelaksanaan skema dapat menyediakan lebih banyak uang untuk perlindungan hutan dibandingkan untuk pembalakan atau konversi pertanian. Pihak yang bertanggung jawab terhadap deforestasi musti dilibatkan dalam skema REDD+. Umumnya mereka terlibat sebagai pihak yang dibayar untuk mengelola kelestarian hutan atau setidaknya agar mereka tidak terlibat dalam pembalakan berskala besar atau konversi lahan. REDD+ harus dapat mengkompensasi hilangnya pemasukan karena terhentinya kegiatan pembukaan hutan yang dikenal dengan sebutan “biaya peluang”. REDD+ kemungkinan dapat memenuhi jumlah tersebut untuk petani miskin dengan teknologi yang sederhana, mengimbangi penerimaan yang hilang dari produksi pertanian yang menguntungkan misalnya budidaya kedelai dan kelapa sawit atau dari kayu bernilai tinggi yang justru akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Apabila pembayaran terputus atau jumlahnya lebih rendah daripada nilai kayu dari hutan atau dari apapun yang dapat dibudidayakan di atas lahan terbuka, maka penebangan pohon akan terjadi kembali dengan cepat. Untuk mencegahnya, REDD+ harus memastikan kestabilan aliran dana dalam jangka waktu yang panjang. Para negosiator khawatir bahwa fluktuasi pasar karbon yang sangat tidak beraturan akan mendorong dana REDD+

**Universitas Indonesia**

yang terpisah berdasarkan donasi dari berbagai negara industri (*Climate Change Media Partnership*, 2009).

Untuk mengukur manfaat karbon sebuah proyek REDD+ perlu memperhitungkan jumlah karbon yang tersimpan dalam hutan yang ingin diketahui nilainya, kemudian memperkirakan seberapa besar karbon yang dapat disimpan dengan menghentikan atau memperlambat deforestasi dan degradasi hutan. Penghitungan tersebut dilakukan dengan menetapkan tingkat acuan berdasarkan sejumlah laju historis emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Apabila 10% dari tutupan hutan telah hilang selama 20 tahun terakhir, prediksi laju deforestasi (juga emisi karbon) mendatang dapat ditetapkan berdasarkan sejumlah data historis dengan ikut memperhitungkan situasi nasional. REDD+ akan membayar emisi karbon yang telah diprediksi meski tidak terjadi karena adanya pengaruh atau campur tangan REDD+. Pemantauan program ini, pelaporan, dan verifikasi karbon melibatkan berbagai tantangan teknis dan organisasional (*Climate Change Media Partnership*, 2009).

Data historis tentang hutan yang menjadi dasar penetapan prediksi seringkali tidak dapat diandalkan atau bahkan tidak tersedia. Saat ini terdapat cara cepat dan akurat untuk mengukur cadangan karbon dengan teknologi baru seperti citra satelit dan permodelan dengan komputer, sehingga pengukuran dan verifikasi pengurangan karbon seharusnya dapat dilakukan. Meskipun demikian, penghitungan dasar dengan metode inventaris hutan masih tetap diperlukan. Mengelola sebuah proyek berskala besar dan mahal merupakan hal yang tidak mudah bagi negara dengan pemerintahan yang lemah atau tidak efisien. Agar REDD+ dapat berfungsi, sistem harus dibentuk untuk menjamin pengelolaan proyek dan hutan yang terus berkembang (*Climate Change Media Partnership*, 2009).

Sejumlah program telah dikembangkan untuk membantu negara berkembang meningkatkan langkah-langkah pengelolaan REDD+ mereka. Termasuk di dalamnya adalah Fasilitas Kerjasama Karbon Hutan oleh Bank Dunia (*World*

*Bank's Forest Carbon Partnership Facility*) dan Program UN-REDD. Program-program tersebut mendukung berbagai usaha negara berkembang untuk membangun kapasitas dalam rangka mengurangi emisi yang disebabkan oleh hilangnya hutan dan mengimplementasikan suatu mekanisme REDD+ di masa mendatang. Banyak negara berkembang tertarik pada skema REDD+. Beberapa proyek uji coba pertama yang didanai oleh program UN-REDD berlokasi di Bolivia, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Tanzania, Vietnam dan Zambia (*Climate Change Media Partnership*, 2009).

Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari komunitas global juga telah berkomitmen secara sukarela untuk turut serta secara aktif dalam melakukan upaya mitigasi perubahan iklim, yaitu proses mengupayakan berbagai tindakan preventif untuk meminimalisasi dampak negatif bencana yang akan terjadi, dan juga merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat (klipingbencana.blogspot.com, 2008) dengan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% sampai dengan tahun 2020 dan sebesar 41% sampai dengan tahun 2050 (*Ministry of Environment*, 2009).

Mitigasi adalah upaya mengurangi sumber maupun peningkatan rosot (penyerap) gas rumah kaca, agar proses pembangunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2007). Salah satu cara menahan laju perubahan merngurangi emisi GRK hasil aktivitas manusia. Ini bisa dilakukan antara lain dengan menggunakan bahan bakar dari sumber energi yang bersih, seperti beralih dari batubara ke gas, atau menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga matahari atau biomassa seperti kayu atau gas dari kotoran ternak. Selain itu mengurangi penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan menghemat listrik juga mengurangi emisi GRK. Usaha-usaha seperti ini disebut mitigasi (Aliadi *et al*, 2008).

Komitmen pemerintah Indonesia tersebut di atas diungkapkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya di pertemuan G-20 pada tanggal 25

September 2009. Menjelang COP 15 UNFCCC di Copenhagen tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan 2<sup>nd</sup> *National Communication* (SNC) sebagaimana dimandatkan oleh artikel 12.1 UNFCCC, bahwa setiap penandatanganan UNFCCC wajib membuat *National Communication*. Melalui *National Communication* tersebut pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menurunkan emisi sebagaimana telah diungkapkan oleh Presiden RI. Selain sebagai bentuk penegasan komitmen, dokumen *National Communication* juga dimaksudkan sebagai media untuk melaporkan informasi pengurangan emisi dan gas rumah kaca serta rincian langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan konvensi.

Keikutsertaan Indonesia dalam skema REDD+ ini secara implisit menunjukkan bahwa Indonesia berada di bawah kontrol World Bank. Dalam konteks REDD, peran World Bank juga tidak lepas dari kepentingan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena itu World Bank mendorong mekanisme pasar bebas sebagai cara untuk memperdagangkan karbon. Upaya ini bisa dilihat dari inisiatif World Bank yang tertuang dalam *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF). Inisiatif ini sempat didiskusikan oleh World Bank dengan masyarakat adat dari Indonesia, Thailand, Burma, Filipina, Vietnam, Kamboja, India, Bhutan, Banglades, Jepang dan Nepal pada tanggal 28-29 Februari 2008 di Nepal. World Bank mempunyai kepentingan menyalurkan utang kepada negara-negara berkembang. Utang tersebut diperuntukkan bagi program-program pembangunan suatu negara. Seringkali World Bank dikritik bahwa utang yang diberikan, telah digunakan untuk membiayai proyek-proyek bersifat eksploitatif dan menyebabkan terjadinya deforestasi dan menguras energi fosil. Dalam konteks perubahan iklim, banyak proyek yang mendapat pinjaman atau utang dari World Bank telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya pemanasan global (Aliadi et al,2008).

Berita tentang perubahan iklim ini tentunya dipublikasikan kepada masyarakat luas. Namun kurangnya perhatian media untuk menghidupkan pemberitaan isu perubahan iklim atau program-program penanganan isu ini menjadi salah satu



faktor kurangnya *awareness* para pengambil kebijakan dan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, sehingga berita tentang REDD+ ini menjadi kurang populer, bahkan mungkin kurang diminati. Kenyataannya, REDD tidak diliput sama sekali dalam pers Indonesia sampai tahun 2007, meskipun perubahan iklim sendiri jarang dilaporkan di Indonesia sebelum tahun 2007, (Cronin & santono, 2010). Akibatnya, masyarakat kebanyakan juga kurang paham terhadap bahaya yang mengancam akibat perubahan iklim.

## **I.2. PERMASALAHAN**

Perubahan iklim terkait dengan aspek sosial, hak asasi manusia, dan lain-lain. Oleh karena itu isu pemanasan global yang menjadi pemicu perubahan iklim ini tidak lepas dari perhatian media. Pentingnya berita mengenai perubahan iklim pada umumnya, dan/atau REDD+ khususnya, merupakan publikasi langkah-langkah edukatif kepada seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat ikut berperan serta mengurangi atau menghindari kegiatan yang memicu gejala perubahan iklim. Seandainya isu ini lebih populer di media disejajarkan dengan isu populer lain seperti politik atau ekonomi, *awareness* pemerhati isu ini dapat meningkat dalam waktu terhitung singkat. Dengan demikian, apabila manusia tidak membenahi gaya hidup dan cara mengelola lingkungan hidup, maka planet bumi akan segera rusak, lapisan es di kutub akan mencair dan menenggelamkan seluruh daratan, dengan demikian manusia akan lebih gampang mati.

Liputan media tentang REDD+ di Indonesia menunjukkan bahwa masalah tersebut setidaknya telah mendapatkan perhatian pers. Pers di Indonesia mengangkat berita tentang perubahan iklim ketika terdapat liputan kampanye lembaga lingkungan hidup di pusat-pusat kota, atau ketika diselenggarakannya konferensi tingkat dunia tentang lingkungan hidup.

Kenyataan bahwa sebagian besar liputan tentang REDD+ adalah satu-satunya jalan keluar yang diusulkan bagi masalah ini. Pers pun mungkin menunjukkan bahwa pembahasan oleh masyarakat dan proses kebijakan tentang REDD+ cukup

maju di Indonesia. Ini mungkin juga menunjukkan bahwa banyak wartawan cenderung berperan sebagai pengawas kebijakan. Tetapi, Harry Surjadi, dari Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (*Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)*), yakin bahwa hanya sedikit wartawan di Indonesia yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang REDD. Selebihnya, menurutnya, hanya 'menerima informasi' tanpa memahaminya dan hanya memasukkannya ke dalam laporan mereka soal persoalan kebijakan terpenting yang terkait REDD sering terlewat karena wartawan tidak memahami REDD dan memuat pendapat tanpa menyanggah ataupun menentang (Cronin dan Santoso, 2010). Media cukup banyak memberitakan *event* seperti pembentukan satgas REDD+ atau penerapan *pilot project* di daerah-daerah, pada saat seharusnya mengedukasi masyarakat tentang dampak perubahan iklim dan bagaimana cara mengatasi dan melakukan adaptasi.

Adaptasi adalah mempersiapkan diri dan hidup dengan berbagai akibat perubahan iklim baik yang sudah terjadi maupun mengantisipasi dampak lain yang mungkin terjadi. Adaptasi merupakan tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Beradaptasi terhadap kedua macam dampak perubahan iklim kejadian ekstrim dan dampak perlahan memerlukan strategi yang berbeda. Mempersiapkan diri menghadapi kejadian ekstrim dilakukan dengan menyusun rencana penanganan bila terjadi bencana alam, seperti badai dan banjir. Sedangkan menghadapi perubahan perlahan memerlukan kemauan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang terus berubah.

Menurut peneliti, ada atau tidaknya isu perubahan iklim, hutan tetap harus dilestarikan. Sementara itu, wacana pemberitaan di Indonesia sepertinya didominasi oleh isu mitigasi yang sebenarnya merupakan kewajiban semua negara maju yang banyak menghasilkan emisi karbon. Dalam hal ini seharusnya Indonesia terfokus pada adaptasi. Memang wacana perubahan iklim di Indonesia yang muncul di media ikut tergiring oleh perdebatan global yang disetir oleh negara maju agar fokus pada mitigasi pengurangan jumlah karbon. Padahal yang

diperlukan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang adalah melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Seperti dikutip dari jurnal *Prioritisation for Adaptation in Tropical Forest Ecosystem* yang diterbitkan oleh organisasi non-pemerintah *Center for International Forestry Research (CIFOR)* tahun 2008 berikut ini:

Adaptasi perubahan iklim dapat juga memberikan jalan yang mudah pada pembangunan berkelanjutan dan meminimalisasi resiko strategi bertahan hidup bagi masyarakat miskin yang sistem hidupnya makin terekspos keadaan ekstrim (Jerneck dan Olsson, 2008). Tugas laporan keempat *Intergovernmental Panel on Climate Change's (IPCC 2007)* juga menekankan perbedaan dampak di seluruh wilayah dan tipe ekosistem dengan tingkat keparahan yang tidak proporsional pada negara-negara miskin dengan kapasitas rendah untuk merespon bahkan dalam menghadapi kebutuhan terhadap adaptasi yang cukup mendesak.

*UNFCCC* meminta agar stabilisasi konsentrasi GRK dapat dicapai dalam jangka waktu yang cukup untuk membiarkan ekosistem beradaptasi secara alamiah terhadap perubahan iklim, untuk memastikan produksi pangan tidak terancam dan memungkinkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (PBB, 1992). Wadah ini menekankan pentingnya adaptasi dan pembangunan meskipun sedang diarahkan ke mitigasi, khususnya pada saat sistem alam menciptakan mata pencaharian dan pembangunan nasional. Hutan tropis memiliki peranan utama dalam respon perubahan iklim global melalui berbagai barang dan jasa yang mereka sediakan. Perhatian terhadap hutan tropis untuk perubahan iklim mengubah respon primer dalam menyediakan pilihan yang ramah-biaya untuk mitigasi, di mana hal tersebut merupakan prioritas global (Stern, 2006). Namun demikian, terdapat aturan lokal hutan untuk penopang hidup dan pembangunan nasional. Melalui beragam barang dan jasa, hutan tropis menyediakan portofolio sekuritas untuk pembangunan nasional dan kehidupan yang juga relevan untuk respon perubahan iklim pada adaptasi (Newell dan Stavins 1999; Kareiva et al. 2007).

Secara umum Media Indonesia termasuk salah satu media yang memuat program REDD+ yang merupakan salah satu masalah saja dari seluruh isu perubahan iklim yang lebih besar. Sirkulasi Media Indonesia sendiri sekitar 300.000 eksemplar per hari (urutan ke tiga tertinggi di Indonesia), tiap satu eksemplarnya diperkirakan dibaca oleh 3-4 orang. Target pembacanya kelas menengah ke atas (Cronin dan Santoso, 2010). Sudah menjadi pemahaman umum bahwa Media Indonesia dianggap sebagai salah satu media terbesar di Indonesia yang mampu mewakili sebaran letak geografis, sosial, politik tentang REDD+ di Indonesia, khususnya melalui media *online* yang dapat diakses secara mudah dan tak terbatas oleh masyarakat.

Peneliti melihat program REDD+ di Media Indonesia *online* cukup penting untuk diteliti karena sebagaimana prinsip jurnalistik pada umumnya menyebutkan, konstruksi media tidak lepas dari kepentingan pemilik modal dan ke arah mana ideologi media tersebut. Berita tentang program REDD+ di Media Indonesia *online* ingin peneliti kaji untuk membuktikan bahwa sekalipun Media Indonesia peduli terhadap isu lingkungan, khususnya perubahan iklim, sebagaimana terlihat dari diterbitkannya berita mengenai REDD+, tetaplah sulit dipisahkan dari kapitalisme yang menjadi fondasi berjalannya bisnis media.

Secara umum, pembaca yang mengakses berita *online* dianggap termasuk dalam golongan menengah atas dan merupakan kaum terpelajar karena untuk mendapatkan akses internet, mereka harus membayar sejumlah biaya dan prosedur tertentu yang relatif rumit dan memerlukan pengetahuan dasar mengoperasikan internet. Sebagai golongan menengah atas dan terpelajar (termasuk para pengambil keputusan di instansi-instansi tertentu), mereka diharapkan bisa didukasi melalui media tentang masalah lingkungan dan memancing kesadaran mereka agar ikut serta menjaga lingkungan, juga mengambil tindakan pengurangan dampak perubahan iklim.

Bukan tidak mungkin bahwa golongan menengah atas dan terpelajar tersebut melakukan tindakan-tindakan tidak ramah lingkungan seperti membuang sampah

sembarangan, menambah polutan udara, dan bergaya hidup boros energi. Seandainya media sukses menyadarkan dan mengedukasi golongan ini, maka sekalipun kita tinggal di negara yang dianggap miskin, minimal Indonesia akan mampu menekan peningkatan laju emisi karbon dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim.

### **I.3. PERTANYAAN PENELITIAN**

Bagaimanakah Media Indonesia *online* menggambarkan isu REDD+?

### **I.4. TUJUAN PENELITIAN**

Untuk menganalisa konten (isi) program REDD+ di Media Indonesia *online*.

### **I.5. MANFAAT PENELITIAN**

- a. **Manfaat akademis:** sebagai pengembangan tinjauan dari teori *agenda setting*, atau lebih khususnya konsep agenda media dalam menganalisis isi berita tentang perubahan iklim pada umumnya, dan khususnya mengenai program REDD+, yang mungkin sudah pernah dikaji dalam studi media lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat konsep agenda media yang ditinjau dari perspektif studi media lingkungan *online*.



## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### II.1. Agenda Media

Dari berbagai studi yang pernah dilakukan terhadap pengaruh dalam komunikasi, ditemukan bahwa komunikasi cenderung lebih banyak mempengaruhi pengetahuan dan tingkat kesadaran seseorang (Changara, 156). Para ahli pada berbagai studi terdahulu mengenai efek media menyimpulkan bahwa “media lebih mengkristalkan dan meneguhkan ketimbang mengubah”. Mereka menemukan bahwa efek media itu terbatas (*limited*) dan media massa hanya lebih berfungsi untuk memperteguh keyakinan.

Model *agenda setting* mengasumsikan adanya hubungan yang positif antara penilaian yang diberikan media pada suatu persoalan dengan pengertian khalayak pada persoalan tersebut. konsep mengenai agenda media ini diambil dari teori agenda setting yang dikemukakan oleh McComb dan Shaw (McQuail dan Sven Windahl, 1996). Ide dasar teori ini bahwa media memberikan perhatian yang berbeda pada setiap isu. Dari berbagai isu yang muncul atau mengemuka, ada isu (peristiwa, orang) yang diberitakan dengan porsi besar, ada yang diberitakan dengan porsi kecil. Perbedaan perhatian (atensi) media terhadap isu ini akan berpengaruh terhadap pengetahuan dan citra (kognisi) suatu peristiwa di mata khalayak. Liputan berita yang diulang-ulang untuk mengangkat pentingnya sebuah isu dalam benak publik merupakan kemampuan media yang berfungsi sebagai penentu agenda.

Orang cenderung mengetahui tentang hal-hal yang diberitakan oleh media massa dan menerima susunan prioritas yang diberikan oleh media massa terhadap isu-isu yang berbeda. Menurut McComb dan Shaw (McQuail dan Sven Windahl, 1996: h.104), khalayak tidak hanya mempelajari berita dan hal-hal lainnya melalui

media massa, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting diberikan pada suatu isu atau topik dari cara media massa memberikan penekanan pada topik tertentu.

Berdasarkan teori tersebut, maka diturunkan konsep mengenai agenda media. Konsep ini tidak memiliki dimensi dan langsung diturunkan menjadi tiga indikator yang dapat diukur.

1. Isu yang diberitakan oleh media. Dengan melihat isu mana yang paling banyak diberitakan oleh media, maka isu tersebutlah yang ingin disorot oleh media.
2. Panjang berita dalam surat kabar.
3. Penempatan isu tersebut dalam halaman-halaman surat kabar. Surat kabar memberitakan isu lingkungan dalam jumlah relatif besar, dengan halaman panjang dan diletakkan pada tempat yang mencolok, mencerminkan agenda yang dibawa oleh media kepada publik.

Kajian media *online* dalam penelitian ini menyebabkan peneliti harus mengukur indikator ketiga melalui frekuensi berita secara *online*. Dengan tiga indikator di atas, agenda media yang dimaksud adalah isu-isu yang mendapat perhatian media dengan frekuensi pemunculan isu yang sering, pemberian kolom yang panjang dan penempatan isu pada halaman depan atau mencolok sehingga mudah diakses oleh khalayaknya.

Terkait isu yang diberitakan oleh media, Iyengar, Peters dan Kinder (1982) telah berhasil melakukan serangkaian eksperimen dan menemukan bahwa media melakukan penentuan agenda melalui cara *priming*. *Priming* atau penonjolan isu tertentu dalam agenda setting dilihat dalam perspektif situasional dan kontekstual. Situasional berarti teori agenda setting dapat berlaku dalam situasi-situasi tertentu yang membutuhkan perhatian publik secara besar, sedangkan secara kontekstual berarti berlaku pada isu-isu atau konteks masalah tertentu saja. Jadi *priming* adalah proses bagaimana media menganggap suatu isu itu penting dan menonjolkannya sepanjang waktu agar menjadi wacana publik dan yang paling

**Universitas Indonesia**

penting adalah hal apa yang diutamakan dalam isu tertentu, karena hal ini penting dilakukan agar agenda setting tersebut dapat dibentuk. Isu mana yang perlu dikesampingkan dalam pemberitaan, dan mana yang harus ditonjolkan.

Dalam mengonstruksikan pemberitaan, hal yang juga penting adalah mengemas berita atau *framing*. Bagaimanapun juga, jika cara mengemas sebuah isu yang akan ditonjolkan kurang baik, maka isu yang baik itu akan kurang menarik, bahkan pesan yang ingin disampaikan barangkali kurang mengena atau bias. Maka berita harus dikonstruksi sedemikian rupa dibentuk dengan baik, agar konstruksi pesan bisa dimaknai oleh audiens (Tamburaka, 2012).

## II.2. Berita

Pada dasarnya, sebuah berita seharusnya menyampaikan dan menyebarkan realitas sosial kepada masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya kita melihat bahwa berita yang disampaikan terkadang jauh dari realitas sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Berita lebih merupakan hasil rekonstruksi tertulis dari realitas sosial (Abrar, 1999: 77).

Dalam memberitakan suatu peristiwa, media massa dipengaruhi oleh beragam pengaruh. Shoemaker dan Reese (1996) mengemukakan ada lima level dalam media yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan, khususnya aplikasinya pada produksi berita cetak, yaitu:

### 1. Level Individu/Pekerja Media

Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. Sederhananya, pengaruh dari pekerja media secara individu. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak. Di antara pengaruh-pengaruh ini adalah karakteristik pekerja komunikasi, latar belakang profesional dan kepribadian, sikap pribadi dan peran-peran profesional.

### 2. Level Rutinitas Media

Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran tersendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung setiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang ada di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk.

### 3. Level Organisasi Media

Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotek memengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang yang tunggal yang ada dalam organisasi berita, ia sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu sendiri. Dialektika dalam level organisasi media ini dapat menjelaskan munculnya kecenderungan pers era reformasi untuk mengedepankan berita-berita politik yang tajam, sensasional, bahkan bombastis.

### 4. Level Ekstra Media

Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. Meskipun berada di luar organisasi media, hal-hal di luar organisasi media ini sedikit banyak memengaruhi pemberitaan media.

### 5. Level Ideologi

Ideologi adalah *world view* sebagai salah satu kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Berbeda dengan elemen sebelumnya yang tampak konkret, level ideologi ini abstrak. Ia berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Pada level ideologi ini akan dilihat kepada yang berkuasa di masyarakat dan bagaimana media menentukannya (manajemenkomunikasi.blogspot.com, 2010).

Kelima level tersebut, apabila dikaji dalam konteks media *online* akan tidak akan terlalu banyak bedanya mengingat dalam penelitian ini, Media Indonesia *online* ibaratnya satu atap dengan Media Indonesia cetak sehingga level-level di atas

**Universitas Indonesia**

setidaknya diproduksi dalam satu pola Media Indonesia yang seragam. Kecuali level ekstra media kurang sesuai karena publikasi *online* yang bersifat *real time* atau produksi dan publikasi berita pada saat berita tersebut sedang berlangsung tidak memungkinkan prosedur *editing* oleh dewan redaksi secara mendetil dan memakan banyak waktu.

Berita didefinisikan oleh William S Maulsby sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut (Sumandiria, 2005). Berita secara umum didefinisikan sebagai laporan tercepat mengenai suatu fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan penting bagi sebagian besar khalayak melalui berbagai media seperti televisi, surat kabar, radio atau media *online* internet (Rachman, 2008).

Untuk mengurangi subjektivitas dari wartawan dalam menulis berita perlu diperhatikan berapa hal yang menurut Gaye Tuchman dapat membuat berita yang ditulis wartawan bersifat objektif. Tuchman menyebut prosedur ini sebagai “ritual” karena ia dikonstruksi untuk wartawan ketika ia menulis berita. Menurut Tuchman terdapat empat strategi dasar yang harus dilakukan wartawan agar berita yang ditulis menjadi objektif.

1. Pertama, menampilkan semua kemungkinan konflik yang akan muncul. Ketika seorang wartawan membuat berita, sudah semestinya ia mengumpulkan dan meneliti banyak data dan multi perspektif misalnya mewawancarai banyak orang yang sudah jelas berseberangan, tidak hanya melihat pada satu data dan satu pihak saja. Jadi semua realitas dan semua kemungkinan fakta disajikan oleh wartawan.
2. Kedua, menampilkan fakta-fakta pendukung yang berfungsi sebagai argumentasi bahwa yang disampaikan wartawan bukanlah khayalan dan opini pribadi.
3. Ketiga, pemakaian kutipan pendapat untuk menyatakan bahwa yang disajikan bukan pendapat wartawan.

4. Keempat, menyusun informasi dalam tata urutan tertentu agar lebih jelas mana pihak yang berkomentar dan mana pihak yang dikomentari (Rachman, 2008).

Berita lahir dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Namun tidak semua peristiwa layak atau mempunyai nilai berita. Beberapa elemen nilai berita yang mendasari pelaporan berita ialah (Santana, 2005):

1. *Immediacy*, selain itu disebut juga *timelines*. Artinya terkait dengan kesegaran peristiwa yang dilaporkan. Sebuah berita sering dinyatakan sebagai laporan dari apa yang baru saja terjadi. Bila peristiwa terjadi beberapa waktu yang lalu, hal ini dinamakan sejarah. Unsur waktu sangat penting di sini.
2. *Proximity*, adalah kedekatan peristiwa dengan dengan pembaca atau pemirsa dalam kehidupan mereka. Khalayak berita akan tertarik dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dekatnya, di sekitar kehidupan sehari-harinya.
3. *Consequence*, berita yang mengubah kehidupan pembaca adalah berita yang mengandung nilai konsekuensi. Lewat berita kenaikan gaji pegawai negeri, kenaikan harga BBM, masyarakat dengan segera akan mengikutinya karena terkait dengan konsekuensi kalkulasi ekonomi sehari-hari yang harus mereka hadapi.
4. *Conflict*, perseteruan antarindividu, antartim atau antarnegara merupakan elemen-elemen natural dari berbagai berita-berita yang mengandung konflik.
5. *Oddity*, peristiwa yang tidak biasa terjadi atau *unusualness* ialah sesuatu yang akan diperhatikan segera oleh masyarakat.
6. *Seks*, seringkali seks menjadi salah satu elemen dari suatu berita. Segala hal yang berhubungan dengan seks pasti menarik dan menjadi sumber berita.

7. *Emotion*, sering disebut elemen *human interest*. Elemen ini menyangkut kisah-kisah yang mengandung kesedihan, kemarahan, simpati, ambisi, cinta, kebencian, kebahagiaan, atau tragedi.
8. *Prominence*, elemen ini adalah unsur yang menjadi dasar istilah *names make news* (nama membuat berita). Segala sesuatu yang berhubungan dengan orang terkenal (*public figure*, pejabat, pembuat kebijakan, dan lain-lain) akan diburu berita.
9. *Suspence*, elemen ini menunjukkan sesuatu yang ditunggu-tunggu tentang sebuah peristiwa oleh masyarakat. Kisah berita yang menyampaikan fakta-fakta tetap merupakan hal yang penting karena kejelasan fakta tetap dituntut oleh masyarakat.

Pada dasarnya berita merupakan laporan dari peristiwa. Peristiwa di sini adalah realitaas atau fakta yang diliput oleh wartawan dan pada gilirannya akan dilaporkan secara terbuka melalui media massa. Dengan demikian, dapat pula dikatakan secara sederhana, bahwa dalam suatu proses jurnalisme, upaya menceritakan kembali suasana atau keadaan, orang, dan benda, bahkan pendapat seseorang yang terdapat dalam sebuah peristiwa merupakan upaya untuk merekonstruksikan realitas. Karena sifat dan faktanya bahwa tugas redaksional media massa, seperti wartawan, editor, redaktur, redaktur pelaksana, dan juga pemimpin redaksi adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka dikatakan seluruh isi media merupakan realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*). Laporan-laporan jurnalistik yang ada di media pada dasarnya tidak lebih dari hasil penyusunan realitas-realitas dalam bentuk cerita.

Mengapa dan bagaimana media menjaga berita dan kebijakan editorial dibahas dalam dua artikel Waren Breed, mantan wartawan surat kabar, peraih gelar Ph.D. dari Columbia, dan anggota dewan pengajar di Tulane University. Dalam artikel *Social Control in the News Room*, Breed membahas bidang-bidang di mana berita dan kebijakan editorial biasanya dijaga dan di mana biasanya dilepaskan. Breed mengamati bahwa penerbit surat kabar, sebagai pemilik atau representasi pemilik, memiliki hak untuk menetapkan dan memberlakukan kebijakan surat kabar.

**Universitas Indonesia**

Tetapi kepatuhan terhadap kebijakan tidak bisa diperoleh secara otomatis (Severin, 2007).

Merurut Breed, yang dimaksud dengan kebijakan di sini adalah orientasi yang diperlihatkan oleh surat kabar dalam editorialnya, kolom beritanya, dan berita utamanya berkenaan dengan kejadian atau permasalahan tertentu. Pandangan (surat kabar) tak akan menimbulkan pembohongan, melainkan ‘penghilangan, pemilihan diferensial, dan penempatan preferensial, seperti menampilkan di halaman depan berita yang pro-kebijakan, mengubur berita yang anti-kebijakan, dan sebagainya. Breed berpendapat bahwa setiap surat kabar, diakui atau tidak, memiliki kebijakan. Politik, bisnis, dan perburuhan adalah bidang kebijakan yang utama, yang sebagian besar berasal dari pertimbangan kelas. Breed menyatakan bahwa kebijakan biasanya bersifat terselubung karena kebijakan itu sering berseberangan dengan kode etik jurnalisme dan para eksekutif media tidak ingin dituduh telah memerintahkan agar surat kabarnya miring ke berita-berita tertentu (Severin, 2007:402)

### **II.3. Jurnalisme Lingkungan**

Apa yang dapat dijalankan institusi media massa untuk memberikan respon terhadap bumi manusia yang semakin mengalami kerusakan? Gejala yang tampak selama ini menunjukkan bahwa lembaga media kurang memberikan kepedulian pada masalah-masalah lingkungan. Bahkan, jurnalisme lingkungan terasa asing bagi lembaga media.

Fenomena ini dapat disimak pada pemberitaan-pemberitaan yang disajikan media terhadap masalah lingkungan. Ekspose yang lazim disajikan pihak media hanya mengungkapkan akibat-akibat kerusakan lingkungan, seperti rob (limpasan air laut ke wilayah daratan), banjir bandang, gelombang pasang, tanah longsor, angin puting beliung, atau suhu udara yang memanas. Pihak media jarang menyoroti sebab-sebab terjadinya bencana alam. Problem fundamental yang menyebabkan degradasi ekologis sangat langka dijadikan prioritas agenda pemberitaan. Padahal, kehancuran ekologis pada level global memiliki dampak serius pada kerusakan

**Universitas Indonesia**



lingkungan secara keseluruhan. Dalam situasi ini, media seharusnya meningkatkan intensitas pemberitaan dengan menggunakan perspektif jurnalisme lingkungan. Artinya, jurnalisme lingkungan harus direvitalisasi (dihidupkan kembali) oleh kalangan wartawan.

Jurnalisme lingkungan kurang mendapatkan tempat yang baik dalam pemberitaan-pemberitaan media. Sebabnya adalah jurnalisme lingkungan lebih banyak menyoroti aspek-aspek non-manusia, seperti air, udara, serta tanah yang dilihat dari segi nilai berita memang rendah. Padahal, semua hal yang diposisikan seakan-akan sebagai benda-benda mati itu berinteraksi dengan kehidupan manusia.

Jurnalisme lingkungan membahas persoalan-persoalan yang seolah-olah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap manusia itu ke hadapan publik. Sehingga, publik diharapkan mengetahui dan menyadari bahwa kehidupan mereka berada dalam ancaman. Gejala ini pernah diungkapkan Joseph L Bast dalam artikelnya yang berjudul *Environmental Journalism: A Little Knowledge is Dangerous* (2000). Menurut Bast, pengetahuan tentang lingkungan serba sedikit yang dimiliki jurnalis justru membahayakan.

Mengutip hasil pengamatan yang dijalankan Alan Caruba, seorang jurnalis ilmu pengetahuan dan pekerja pengawasan media, Bast kemudian menunjukkan empat hal utama yang disajikan media dalam meliput persoalan-persoalan lingkungan, yaitu pertama, selama lebih dari 25 tahun, kalangan reporter lingkungan mengabaikan pendapat-pendapat ilmiah yang sebenarnya sangat berbeda dengan pemikiran kalangan penganut environmentalisme; kedua, sangat sedikit jurnalis yang memiliki latar belakang pengetahuan ilmiah, sehingga mereka gampang dimanipulasi oleh kalangan aktivis lingkungan; ketiga, kelompok-kelompok aktivis atau pemerhati lingkungan meningkatkan kampanye kehumasan yang efektif dan didanai secara baik yang dimulai sejak tahun 1970 dan terus berlanjut hingga sekarang; dan keempat, desakan media untuk meningkatkan sirkulasi dan *rating* acapkali menjadikan media menghadirkan laporan-laporan ekologis sedramatis mungkin.

**Universitas Indonesia**

Jurnalis lingkungan yang baik harus memperhatikan pengetahuan ilmiah dan tidak mudah didikte pihak luar media yang memiliki agenda tersendiri. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada publik betapa pentingnya lingkungan yang mereka tempati. Sebagaimana dikemukakan Poshendra Satyal Pravat (dalam *Preserving Environment: Role of Media*, 2003), reporter yang menerapkan jurnalisme lingkungan bekerja berdasarkan pada pemikiran bahwa kesadaran publik merupakan senjata yang penting dalam menjaga lingkungan. Jurnalisme ini tidak hanya dapat memainkan peran kunci dengan melakukan investigasi dan pemberitaan mengenai isu-isu lingkungan, tetapi juga menghadirkan komentar dan analisis kritis dengan merangsang perdebatan publik. Kalangan jurnalis berperan sebagai agen-agen utama yang mampu mengubah sikap masa bodoh publik.

Jurnalis yang menerapkan paham mengenai kesadaran lingkungan dapat berperan sebagai *watchdog* (anjing penjaga) maupun *kelompok penekan* yang mengeritik pemerintah dan korporasi yang cenderung tidak menaruh kepedulian dan bahkan dengan sistematis melakukan perusakan lingkungan. Jika selama ini ada mitos mapan bahwa kekuatan *watchdog* para jurnalis hanya dapat dijalankan untuk menyoroti problem-problem politis, seperti isu korupsi maupun demokratisasi, selayaknya harus diubah secara radikal. Masalah lingkungan pun bermuatan politis juga ekonomis. Kerusakan ekologis tidak lepas dari bagaimana kekuasaan dijalankan oleh elite politik dan elite ekonomi yang bergandengan tangan menumpuk gengsi sosial dan profit finansial.

Apabila isu lingkungan mengandung muatan politis, maka dapat ditelusuri mengapa jurnalisme lingkungan jarang diterapkan pihak media. Dalam konteks persoalan lebih luas, Frank Edward Allen (dalam *The Trouble with Environmental Journalism*, 2000) menyatakan alasan-alasan mengapa jurnalisme lingkungan sulit dilaksanakan, yaitu: Pertama, kepemilikan modal media terkonsentrasi pada segelintir pihak. Kedua, nilai-nilai tabloidisme telah menurunkan standar dan keputusan pemberitaan. Ketiga, kebiasaan-kebiasaan pemberitaan dalam dewan redaksi mempengaruhi perbincangan publik yang sehat.

Hal itu menunjukkan bahwa jurnalisme lingkungan menghadapi kompleksitas persoalan ketika diterapkan. Berbagai jenis bencana alam, seperti rob, banjir, tanah longsor, gelombang pasang atau suhu udara yang memanas tidak saja menyengsarakan warga, melainkan juga membuktikan bahwa jurnalisme lingkungan agak dipinggirkan atau cenderung kurang dimengerti secara baik ketika diterapkan (Lukmantoro, 2007).

Jurnalisme lingkungan dapat didefinisikan sebagai proses kerja jurnalisme melalui pengumpulan, verifikasi, distribusi dan penyampaian informasi terbaru berkaitan dengan berbagai peristiwa, kecenderungan, dan permasalahan masyarakat, yang berhubungan dengan dunia non-manusia di mana manusia berinteraksi didalamnya.

Dalam interaksi antarkomponen lingkungan, wartawan diharapkan harus “memihak” kepada proses-proses yang meminimalkan dampak negatif kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, wartawan lingkungan perlu menumbuhkan sikap:

1. Pro Keberlanjutan: Lingkungan Hidup yang mampu mendukung kehidupan berkelanjutan, kondisi lingkungan hidup yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang
2. Biosentris: Kesetaraan spesies, mengakui bahwa setiap spesies memiliki hak terhadap ruang hidup, sehingga perubahan lingkungan hidup (pembangunan) harus memperhatikan dan mempertimbangkan keunikan setiap spesies dan sistem-sistem di dalamnya.
3. Pro Keadilan Lingkungan: Berpihak pada kaum yang lemah, agar mendapatkan akses setara terhadap lingkungan yang bersih, sehat dan dapat terhindar dari dampak negatif kerusakan lingkungan.
4. Profesional: Memahami materi dan isu-isu lingkungan hidup, menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik, menghormati etika profesi, dan menaati hukum.

Topik-topik yang diangkat jurnalisme lingkungan, misalnya pencemaran udara atau pengaturan sampah, dengan pengkhususan masalah-masalah yang terjadi di ranah lokal. Selain itu, jurnalisme lingkungan juga mencakup topik-topik seperti

**Universitas Indonesia**

isu lingkungan antarnegara, perubahan iklim dan pemanasan global, pembalakan liar, kualitas air, kebakaran hutan, pencemaran industri, nuklir, kekeringan, banjir, longsor, kabut asap, limbah rumahtangga, limbah rumahsakit, limbah industri, kepunahan fauna, modifikasi generika, dan sebagainya.

Greenpress (13 April 2008) mengutip Kompas mengungkapkan, media lebih banyak memberi tempat terhadap berita-berita ekonomi dan politik dibanding berita lingkungan. Kalaupun ada berita isu lingkungan dalam sebuah media, hanya menempati ruang kecil saja. Padahal media sangat berpengaruh untuk menyadarkan publik agar mereka segera peduli terhadap lingkungannya, untuk bersama-sama menyelamatkan bumi, dan mencegah “kiamat” yang dipercepat oleh kerusakan-kerusakan lingkungan.

Media, juga di Indonesia, merasa lebih penting mengangkat isu-isu politik dan ekonomi. Kesadaran untuk memberi tempat terhadap lingkungan sebenarnya mengemuka dari para jurnalis. Persoalan-persoalan internal media adalah sedikitnya pengelola media memberi halaman atau ruang yang memadai untuk isu lingkungan. Selain itu, kepemilikan sejumlah politisi atau pengusaha dalam usaha media juga sering kali mempersulit jurnalis atau media yang bersangkutan memuat isu-isu lingkungan yang menyangkut kepentingan pemilik.

Mengutip Surya Pagi, Greenpress (13 April 2008), menyatakan bahwa intensitas pemberitaan media kerap meredup ketika sudah tak ada bencana alam menerjang yang mengakibatkan korban-korban manusia berjatuhan dan harta benda mengalami kehancuran. Respon terhadap pemanasan global, misalnya, hingga kini tampak masih kurang memperoleh penyikapan yang, bermakna dan mendalam dari sebagian besar media di Indonesia. Padahal, kehancuran ekologis pada level global memiliki dampak serius pada kerusakan lingkungan secara keseluruhan.

Empat hal yang sering disajikan media dalam meliput persoalan-persoalan lingkungan:

1. Kalangan reporter lingkungan sering mengabaikan pendapat-pendapat ilmiah yang sebenarnya sangat berbeda dengan pemikiran kalangan penganut environmentalisme.
2. Sangat sedikit jurnalis yang memiliki latar belakang pengetahuan ilmiah, sehingga mereka gampang dimanipulasi oleh kalangan aktivis lingkungan;
3. Kelompok-kelompok aktivis atau pemerhati lingkungan meningkatkan kampanye kehumasan yang efektif dan didanai secara baik yang dimulai sejak tahun 1970 dan terus berlanjut hingga sekarang.
4. Desakan media untuk meningkatkan sirkulasi dan rating acapkali menjadikan media menghadirkan laporan-laporan ekologis sedramatis mungkin (greenpress.dagdigdug.com, 2009).

#### **II.4. Jurnalisme Konvensional & *Online***

Dikutip dari [jurnalistikuinsgd.wordpress.com](http://jurnalistikuinsgd.wordpress.com) (2007), jurnalisme konvensional dan jurnalisme *online* memang merupakan jurnalisme yang mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, baik dari media yang digunakan, pelaku atau pekerja didalamnya, hingga penyusunan serta penampilan pesannya yang juga berbeda, namun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keberadannya tidak bisa dikatakan sebagai media yang berlawanan atau saling berkompetisi, namun juga sebagai media yang dapat saling melengkapi dalam kegiatan jurnalistik atau dalam dunia jurnalisme.

Kehadiran kedua jenis jurnalisme tersebut pada intinya memiliki tujuan yang sama, yakni berusaha untuk memenuhi kebutuhan atau menyajikan informasi atau berita yang penting bagi masyarakat atau khalayak luas. Namun cara, sistem yang digunakan adalah berbeda, serta penyajiannya, menjadikan kedua jurnalisme tersebut terlihat sebagai sebuah jurnalisme atau media jurnalisme yang saling berkompetisi atau bersaing. Sebagai pengonsumsi media atau berita sebaiknya dapat memilih saluran yang benar-benar dianggap efektif serta dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi masing-masing individu tersebut.

Di Indonesia, media-media *online* sudah memasuki tahap baru dalam dunia jurnalisme. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2010, media *online* sudah mendapat hati bagi pembaca yang mayoritas membutuhkan percepatan informasi. Migrasi dari kertas (koran) ke web (*online*) saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Itu bisa jadi karena penerapan pada komputer tablet dan penyebaran *smartphone* mendorong percepatan media *online* yang memang dikenal sangat loyal terhadap pembaca.

Di Indonesia, ada beberapa media *online* yang kini mencapai tingkat perkembangan yang cukup pesat. Misalnya *Mediaindonesia.com*. Yang lebih mengejutkan, rata-rata media *online* tersebut merupakan penjelmaan dari surat kabar atau bahkan media elektronik yang sebelumnya sudah ada. Seperti *Kompas.com* dengan koran Kompas, *Rakyatmerdeka.com* dengan Koran Rakyat Merdeka, *Mediaindonesia.com* dengan koran Media Indonesia dan *Vivanews.com* dengan jaringan televisi TVone dan Antv.

Perkembangan *online* yang demikian pesatnya, menunjukkan jika surat kabar (saat ini) sedang menderita. Tidak hanya dari krisis ekonomi, melainkan karena banyak orang yang memilih membaca berita dan informasi melalui *online* dan (secara otomatis) pemasang iklan mengikuti pola pembaca.

Pada tahun 2010, koran-koran di Indonesia banyak yang melaporkan penurunan pendapatan iklan ketika media lain seperti televisi sedang menikmati *rebound* dalam penjualan iklan. Pendapatan iklan koran pada tahun 2010 turun 46 persen dalam empat tahun. Sementara di sisi lain, pendapatan iklan *online* mengalami peningkatan. Ini sebuah tantangan untuk organisasi berita bahwa banyak klien yang memilih belanja melalui iklan *online* ini.

Sejak itu pula, koran-koran juga telah merasakan dampak media *online*. Mereka menderita. Terbukti, banyak media cetak yang memilih untuk menyusutkan staf, termasuk reporter dan editor. Atau memintahkan mereka ke bagian lain, terutama di bagian iklan untuk menguatkan posisi marketing. Karena itu tidak heran jika kemudian media-media cetak besar saat ini sudah (latah) mulai menggunakan

**Universitas Indonesia**

media *online*. Hal itu dikarenakan mereka tak ingin iklan dan pembaca koran menyusut.

Surat kabar mulai mengenakan biaya untuk akses *online* ke situs *web* mereka. Mereka selama ini boleh dibilang hanya mengejar media-media *online* yang sudah ada. Di sisi lain mereka juga menggunakan *online* dengan tetap mengacu pada *image* koran yang sudah ada. Ini tentu saja akan menjadi bumerang bagi mereka. Pasalnya, pembaca sudah bosan dengan media tersebut. Sehingga mereka lebih memilih media-media *online* yang memang mengawali dari bisnis *online*. Jika melihat perkembangan media *online* belakangan ini, baik dengan banyaknya sistem-sistem yang berkembang maupun kualitas pemberitaan, tidak menutup kemungkinan pada 2012 ini, media *online* bakal menggeser keberadaan media konvensional seperti surat kabar.

Sementara itu, jurnalisme *online* adalah proses penyampaian informasi atau pesan yang menggunakan internet sebagai medianya sehingga mempermudah jurnalis dalam melakukan tugasnya. Beberapa karakteristik dari jurnalisme *online* dibandingkan "jurnalisme konvensional" (cetak/elektronik) adalah sebagai berikut:

1. *Real Time*

Karakteristik jurnalisme online yang paling populer adalah sifatnya yang *real time*. Berita, kisah-kisah, peristiwa-peristiwa, bisa langsung dipublikasikan pada saat kejadian sedang berlangsung. Ini barangkali tidak terlalu baru untuk jenis media tradisional lain seperti TV, radio, telegraf, atau *teletype*.

2. Penerbit

Namun dari sisi penerbit sendiri, mekanisme publikasi *real time* itu lebih leluasa tanpa dibatasi oleh periodisasi maupun jadwal penerbitan atau siaran: kapan saja dan dimana saja selama dia terhubung ke jaringan internet maka ia mampu mempublikasikan berita, peristiwa, kisah-kisah saat itu juga. Inilah yang memungkinkan para pengguna atau pembaca

untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan sebuah peristiwa dengan lebih sering dan terbaru.

### 3. Unsur-unsur Multimedia

Menyertakan unsur-unsur multimedia adalah karakteristik lain jurnalisme *online*, yang membuat jurnalisme ini mampu menyajikan bentuk dan isi publikasi yang lebih kaya ketimbang jurnalisme di media tradisional. Karakteristik ini, terutama sekali, berlangsung pada jurnalisme yang berjalan di atas web.

### 4. Interaktif

Selain itu, jurnalisme *online* dapat dengan mudah bersifat interaktif. Dengan memanfaatkan hyperlink yang terdapat pada web, karya-karya jurnalisme online dapat menyajikan informasi yang terhubung dengan sumber-sumber lain. Ini berarti, pengguna atau pembaca dapat menikmati informasi secara efisien dan efektif namun tetap terjaga dan didorong untuk mendapatkan pendalaman dan titik pandang yang lebih luas, bahkan sama sekali berbeda.

### 5. Tidak membutuhkan organisasi resmi

Dalam konteks tertentu organisasi tersebut dapat dihilangkan, berikut legal formalnya sebagai lembaga pers.

Interaktivitas jurnalisme *online* tentu bukan hanya didukung oleh kemampuan teknologi internet dalam menyediakan tautan (*hyperlink*). Teknologi internet juga membuka peluang kepada para jurnalis *online* untuk menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan sajiannya bersifat *customized*, tersaji sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna atau pembacanya; yang memungkinkan para pengguna atau pembaca berinteraksi dengan lebih cepat, lebih sering, lebih intens dengan sesama pengguna atau pembaca, narasumber, bahan-bahan berita, dan jurnalisnya sendiri. Pada akhirnya, jurnalisme *online* mampu membangun hubungan yang partisipatif dengan pemirsanya.

Dari karakteristik-karakteristik diatas tersirat bahwa jurnalisme *online* membutuhkan penanganan yang berbeda dalam penyelenggaraannya dan

**Universitas Indonesia**



dinikmati dengan cara yang berbeda oleh para pengguna atau pemirsanya ketimbang jurnalisme tradisional. Dalam jurnalisme tradisional, tata-tutur informasi misalnya, disajikan secara linear kepada para pembaca atau pemirsanya. Pemirsa atau pembaca jurnalisme tradisional tidak bisa tidak harus mengikuti urutan informasi yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbitnya, yaitu dari kisah satu ke kisah kedua lalu ke kisah ketiga dan seterusnya tanpa bisa melakukan lompatan.

Tapi dalam jurnalisme *online*, tata-tutur informasi dapat disajikan sedemikian rupa secara non-linear untuk mengakomodasi ‘kebebasan’ pengguna atau pemirsanya. Anda dapat mulai menikmati publikasi *online* dari kisah terakhir lalu melompat ke kisah sebelumnya atau ke kisah yang pernah dipublikasi sekian tahun sebelumnya, bahkan ke sumber informasi yang sama sekali lain di tengah-tengah proses penikmatan informasi.

Apa yang disebut ‘kebebasan memilih’ dalam media *online*, sebetulnya bukanlah sebuah kebebasan pilihan yang sejati melainkan ilusi memilih; sebab pada dasarnya jurnalis atau penerbit *online* telah terlebih dahulu menentukan opsi-opsinya (dalam prakteknya dapat berupa rujukan dengan menggunakan hyperlink). Inilah salah satu aspek yang membuat jurnalisme *online* dapat menyajikan informasi lebih kaya ketimbang jurnalisme tradisional.

Keunggulan jurnalisme *online* dibandingkan jurnalisme konvensional (cetak atau elektronik) antara lain:

1. Kapasitas luas halaman *web* bisa menampung naskah sangat panjang.
2. Pemuatan dan *editing* naskah bisa kapan saja dan di mana saja.
3. Jadwal terbit bisa kapan saja bisa, setiap saat.
4. Cepat, begitu diunggah (*upload*) langsung bisa diakses semua orang.
5. Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.
6. Aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
7. *Update*, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja.
8. Interaktif, dua arah, dan ”egaliter” dengan adanya fasilitas kolom komentar, *chat room*, *polling*, dsb.

**Universitas Indonesia**

9. Terdokumentasi, informasi tersimpan di "bank data" (arsip) dan dapat ditemukan melalui "link", "artikel terkait", dan fasilitas "cari" (*search*).
10. Terhubung dengan sumber lain (*hyperlink*) yang berkaitan dengan informasi tersaji.

#### Kekurangan Media *Online*:

1. Tidak ada ukuran pasti tentang siapa penerbit berita *online*, sehingga dapat diklaim oleh beberapa pihak.
2. Adanya kecenderungan mudah lelah saat membaca sajian di berita-berita *online* yang panjang.
3. Banyak terjadi kesalahan penulisan yang dikarenakan ketergesa-gesaan dalam proses penulisan.
4. Berpotensi mengakibatkan *cyber crime* (kejahatan dunia maya) seperti penculikan, penipuan, dan berbagai tindak kriminal lainnya.
5. Menurunnya minat baca di perpustakaan akibat lebih praktisnya media *online*.
6. Meningkatkan plagiat akibat mudah dicurinya karya-karya yang tersaji di media *online*.
7. Tidak selalu tepat, karena mengutamakan kecepatan berita yang dimuat di media *online* biasanya tidak seakurat media lainnya.

Kelebihan jurnalisme *online*, seperti yang tertulis dalam buku *Online Journalism. Principles and Practices of News for The Web* (Holcomb Hathaway Publishers, 2005):

1. *Audience Control*

Jurnalisme *online* memungkinkan audiens untuk bisa lebih leluasa dalam memilih berita yang ingin didapatkannya.

2. *Nonlinearity*

Jurnalisme *online* memungkinkan setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri sehingga audiens tidak harus membaca secara berurutan untuk memahami berita tersebut.

3. *Storage dan Retrieval*

Jurnalisme *online* memungkinkan berita tersimpan dan diakses kembali secara mudah oleh audiens.

4. *Unlimited Space*

Jurnalisme *online* memungkinkan jumlah berita yang disampaikan atau ditayangkan kepada audiens dapat menjadi jauh lebih lengkap ketimbang media lainnya.

5. *Multimedia Capability*

Jurnalisme *online* memungkinkan bagi tim redaksi untuk menyertakan teks, suara, gambar, video dan komponen lainnya didalam berita yang akan diterima oleh audiens.

6. *Interactivity*

Jurnalisme *online* memungkinkan adanya peningkatan partisipasi audiens dalam setiap berita.

Kehadiran media *online* ini akan mampu mendefenisikan pers nasional. Setidaknya kemunculan mereka akan memacu penafsiran kembali berita. Jika jumlah pengakses internet kian besar, media *online* sangat berpengaruh dan membuat setiap informasi bisa disajikan secara cepat dan akurat. Pertumbuhan media *online* akan memacu jenis media lain melakukan perubahan mendasar atas visi pemberitaan. Artinya setiap peristiwa dan komentar beserta analisisnya bisa disajikan oleh media *online* dalam waktu tidak lama ketika peristiwa berlangsung. Sedangkan media cetak seperti surat kabar memerlukan waktu satu hari dan majalah satu minggu untuk menguraikan dan menganalisis berita itu.

## II.5. Media Online

Direktur Kompas Cyber Media (KCM) Ninok Leksono menyebutkan, kehadiran media *online* jelas telah mengubah paradigma baru pemberitaan, yakni *event on*  
**Universitas Indonesia**

*the making*. Maksudnya, berita yang muncul tidak disiarkan beberapa menit, jam, hari, atau minggu, tetapi begitu terjadi langsung diunggah (*upload*) ke dalam situs web media *online*. Itulah keunggulan media *online* yang serba cepat (jurnalistikuinsgd.wordpress.com).

Masyarakat Indonesia saat ini merupakan masyarakat informasi yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan media komunikasi dan menggunakan teknologi informasi seperti telepon dan komputer. Masyarakat Informasi yang berbasis data digital pada gilirannya akan mudah melakukan pertukaran data informasi karena saat ini, untuk berhubungan tidak diperlukan lagi saluran yang berbeda-beda untuk berkomunikasi, sepanjang data atau informasi sudah berbentuk digital, maka dia dapat dibaca dalam bentuk surat kabar, *online* media, *radio streaming*, televisi digital, sampai *video streaming* melalui *smartphone*.

*Indonesia Finance Today* versi *online* edisi Senin, 5 Mei 2012 menyebutkan, kelas menengah di Indonesia mengalami pergeseran perilaku dalam mengkonsumsi informasi dan hiburan, yaitu dari media tradisional ke *platform online*. Dari riset PT Nielsen Indonesia, kelas menengah Indonesia hanya menghabiskan waktu setengah jam per hari untuk membaca koran dan dua jam per hari untuk mendengarkan radio, tetapi mereka menghabiskan waktu 1,5 jam untuk mengakses informasi dan bersosialisasi melalui internet.

Nielsen mengestimasi, sekitar 48% dari total populasi di Indonesia merupakan kelas menengah. Dari data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia adalah 237 juta jiwa, berarti jumlah kelas menengah mencapai 113,7 juta jiwa. Kategori kelas menengah Nielsen adalah rumah tangga yang menghabiskan Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Riset Nielsen di 10 kota besar di Indonesia dengan total populasi mencapai 47 juta jiwa. Riset tersebut mengindikasikan jumlah pembaca media cetak dan pendengar radio semakin menurun sejak 2007-2011 sedangkan pertumbuhan pengguna internet dan *mobile device* sangat tinggi.

Di sisi lain, jumlah pengguna internet di Indonesia naik dari 12% pada 2007 menjadi 28% di 2011. Jumlah pengguna *mobile device* naik dari 30% di 2007 menjadi 60% di 2011 sedangkan jumlah pengguna *mobile phone* naik dari 33% di 2007 menjadi 78% di 2011. Nielsen mencatat rata-rata pengguna internet dan *mobile device* berusia muda antara 10 tahun-19 tahun sebanyak 59%, sedangkan pengguna dengan rentang usia antara 20 tahun-29 tahun sebesar 29%. Demikian dikutip dari *Indonesia Finance Today* (2012).



## BAB III

### METODOLOGI

#### III.1. PARADIGMA PENELITIAN

Sebagian orang menyebut paradigma sebagai citra fundamental dari pokok permasalahan di dalam suatu ilmu. Secara umum, paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntut seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ini dianut oleh Guba, yang mengikuti konsep Thomas Khun tentang paradigma sebagai seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan, baik tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. Selanjutnya oleh Roy Bhaskar, paradigma diartikan sebagai asumsi yang dianggap benar (*secara given*) dan untuk dapat sampai pada asumsi itu, harus ada perlakuan empirik melalui (pengamatan) yang tidak terbantahkan (Salim, 2006).

Penelitian ini menggunakan paradigma positivis. Paradigma positivis melihat ilmu sosial sebagai metode terorganisir untuk mengkombinasikan logika deduktif (*deductive logical system*) dengan pengamatan empiris pada perilaku individu untuk menemukan dan memastikan seperangkat hukum sebab akibat yang bisa digunakan untuk memprediksi pola umum dari aktivitas manusia. Penelitian dalam ranah paradigma positivis bertujuan untuk menemukan penjelasan ilmiah mengenai perilaku manusia yang berlaku universal. Paradigma ini melihat etika, nilai dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian dan berangkat dari asumsi bahwa ada suatu realitas sosial yang objektif sehingga harus menjaga jarak dengan objek yang diteliti. Sehingga penilaian subjektif dan bias pribadi harus bisa dipisahkan dari temuan penelitian (Neuman, 2003). Paradigma positivis juga bertujuan untuk menemukan kebenaran universal dengan membuktikan konsep-konsep atau variabel tertentu (Manulong, 2012).

Paradigma positivis digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan utama secara eksplisit. Penelitian ini perlu didukung penjelasan kritis dalam mengungkap struktur riil esensi jurnalistik lingkungan untuk memberikan penjelasan implisit tentang aspek-aspek kompleks yang pada akhirnya membentuk satu gambaran besar yang eksplisit.

### **III.2. PENDEKATAN PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan atas suatu kejadian. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan agar dapat mengetahui seperti apakah Media Indonesia menggambarkan program REDD+. Dengan demikian peneliti dapat mengkonfirmasi realitas secara probabilitas dari frekuensi berita program REDD+ ini yang dipublikasikan pada Media Indonesia *online*.

### **III.3. SIFAT PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif dan tidak berupaya mencari hubungan sebab-akibat (*causality*). Tidak ada status (*independent, dependent, antedecedent*, dan/atau variabel lainnya) dalam variabel-variabel yang digunakan. Penelitian ini hanya ingin memberikan deskripsi atau gambaran pemberitaan program REDD+ yang dipublikasikan pada Media Indonesia *online*.

### **III.4. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan salah satu teknik penelitian yang melibatkan pengukuran variabel dalam sampling acak pada beberapa bentuk komunikasi. Secara implisit, dalam analisis isi, kajian pesan dan bentuk komunikasi akan memberikan pemahaman ke dalam nilai atau kepercayaan orang yang menerima pesan-pesan ini (Berger, 2005). Walizer dan Wienir (1978) mendefinisikan analisis isi sebagai prosedur sistematis yang digunakan untuk memeriksa konten media dari informasi yang sudah tersimpan. Sedangkan menurut Kerlinger (2000), analisis isi merupakan metode yang mempelajari dan menganalisa komunikasi dengan cara sistematis,

objektif, dan kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur variabel-variabel yang ada, yang dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

Sistematis berarti isi pesan yang akan dianalisis berdasarkan pada perencanaan formal, telah ditentukan sebelumnya dan tidak memihak objek, dan harus diberi batasan yang jelas dan tepat. Objektivitas diartikan bahwa apabila kategori tersebut digunakan oleh orang lain untuk melakukan analisis isi yang sama, maka akan menghasilkan jawaban atau kesimpulan yang sama pula. Dalam kategorisasi ini, pengertian yang bertujuan memisahkan kategori evaluatif dan terminologis sebisa mungkin dihindari karena akan cenderung subjektif dalam menganalisis. Kuantitatif, berarti hasil dari analisis bisa dibuktikan dalam bentuk angka-angka. Manifest berarti bahwa analisis dilakukan sesuai dengan apa yang tertulis atau tercetak dalam media yang bersangkutan (Manulong, 2012).

### **III.5. POPULASI**

Populasi merupakan keseluruhan dari gejala atau satuan yang ingin diteliti (Bailey, 1994). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh berita mengenai program REDD+ yang diunduh secara *online* dari Media Indonesia dengan cara mengetik kata kunci REDD+ pada mesin pencari yang terdapat di *website* Media Indonesia, kemudian mengunduh berita yang benar-benar membahas tentang REDD+ yang muncul pada laman *website* tersebut. Pencarian menunjukkan sekitar 80 berita.

### **III.6. SAMPEL**

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel penelitian sangat dibutuhkan untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan gejala/objek yang diteliti (Bailey, 1994). Maka sampel yang dipilih harus mampu mewakili populasi, yaitu yang karakteristiknya kurang lebih sama dengan populasi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 25 pemberitaan tentang program REDD+ yang muncul dari laman *website* Media Indonesia *online* antara tahun 2010 sampai dengan 2012. Berita yang berhasil peneliti dapatkan berisi liputan Media Indonesia *online* yang benar-benar terkait aplikasi kegiatan program REDD+ di Indonesia dan tidak



mengalami eror ketika diunduh. Dari kedupuluh lima berita tersebut peneliti tertarik untuk menganalisisnya karena Media Indonesia *online* tentunya memiliki ideologi berbeda dari media lainnya seperti Kompas atau Tempo. Media Indonesia yang dipimpin oleh pengusaha sekaligus politisi Surya Paloh diperkirakan akan memberikan gambaran program REDD+ yang tidak lepas dari ideologi ekonomi dan politik.

### III.7. METODE PENARIKAN SAMPEL

Peneliti menggunakan teknik penarikan sampel berupa teknik purposif (*purposive sampling*). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan menarik salah satu program solusi untuk *scope* perubahan iklim yang lebih luas sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih fokus. Dari pertimbangan tersebut, peneliti memilih Media Indonesia *online* sebagai salah satu media terbesar di Indonesia yang mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun. Seluruh berita yang muncul dari pencarian di Media Indonesia *online* ketika dicari dengan kata kunci REDD+ menjadi populasi sampel yang peneliti gunakan untuk menulis penelitian ini. Dari sekitar 80 berita temuan dalam pencarian selama Januari-Juni 2012, sebagian besar di antara berita temuan ternyata tidak menyinggung REDD+ samasekali, misalnya hanya memberitakan konferensi ekonomi politik yang dihadiri pemerintah di dalam maupun luar negeri. Sebagian berita lainnya sudah tidak dapat diunduh karena eror setiap kali peneliti mencoba mengakses dan mengunduhnya. Selain itu terdapat dua atau lebih berita dengan penulisan artikel sama persis dari sumber dan tautan (link) yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu menyaring seluruh populasi dan menarik sampel. Berita terdiri dari, antara lain, program REDD+ yang sedang dipantau tindak lanjutnya sampai tahun 2012 ini sejak dirumuskan tahun 2007. Jumlah sampel terkumpul sebanyak 25 berita dari seluruh populasi.

### III.8. UNIT ANALISIS

Peneliti memfokuskan unit analisis pada segala berita *online* Media Indonesia yang ada kaitannya dengan program REDD+. Artikel-artikel tersebut tidak dinilai

kuota beritanya secara keseluruhan, namun selama berita tersebut secara jelas menulis tentang program REDD+, maka akan digunakan oleh peneliti sebagai unit analisis untuk dapat memberikan gambaran apakah Media Indonesia sebatas memberikan reportase agenda kegiatan program REDD+ lainnya, dengan kata lain, mempublikasikan mitigasi perubahan iklim seperti harapan negara maju sesuai kapasitas mereka dalam konferensi perubahan iklim PBB. Ataupun artikel-artikel tersebut cenderung kontra REDD+ karena lebih banyak berisi adaptasi perubahan iklim untuk masyarakat Indonesia, atau penolakan-penolakan organisasi tertentu terhadap kebijakan pemerintah yang tetap menjalankan program tersebut tanpa mengetahui bahwa program yang sebenarnya diperlukan Indonesia (sebagai negara berkembang yang memproduksi emisi karbon jauh lebih sedikit dibandingkan negara-negara maju) adalah adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

### III.9. UJI RELIABILITAS

Reliabilitas sangat penting dalam analisis isi. Dalam buku Eriyanto, seperti dikatakan oleh Kaplan dan Goldsen sebagai berikut: “pentingnya reliabilitas terletak pada jaminan yang diberikannya bahwa data yang diperoleh independen dari peristiwa, instrumen atau orang yang mengukurnya. Data yang reliabel, menurut definisi, adalah data yang tetap konstan dalam seluruh variasi pengukuran”. (Kassarjian, 1977:13). Reliabilitas menilai sejauh mana alat ukur dan data yang dihasilkannya menggambarkan variasi yang ada dalam gejala yang sebenarnya. Alat ukur yang reliabel seharusnya melahirkan hasil yang sama dari serangkaian gejala yang sama, tanpa tergantung kepada keadaan (Krippendorff, 2006: 212).

Formula yang digunakan untuk mengukur reliabilitas penelitian ini adalah Krippendorff Alpha. Kelebihan dari formula ini adalah *alpha* Krippendorff dapat dipakai untuk data nonnominal, yang sebagian besar menjadi unit analisis penelitian ini. Rumus untuk menghitung *alpha* Krippendorff sebagai berikut.

$$\text{Reliabilitas Antar-Coder} = 1 - \frac{\text{Ketidaksetujuan (disagreement) yang diamati}}{\text{Ketidaksetujuan (disagreement) yang diharapkan}}$$

Turunan formula Krippendorff oleh Neuendorf sebagai berikut.

$$\text{Reliabilitas Antar-Coder} = \frac{nm-1}{m-1} \left( \frac{\sum pfu}{\sum pmt} \right)$$

*Pfu* adalah penjumlahan frekuensi dari unit yang mengalami ketidaksetujuan (*disagreement*), *pmt* adalah penjumlahan dari total marginal, *n* adalah jumlah unit yang di-coding, dan *m* adalah jumlah *coder*. Batas reliabilitas pengukuran dalam penelitian ini 0,5 sehingga bila ada variabel atau dimensi serta subdimensi yang berada di bawah 0,5 dikategorikan tidak andal.

Tabel 3.1 Ilustrasi Penulisan Reliabilitas

No	Variabel	Persentase Persetujuan
1	Tema Berita REDD+	84%
2	Latar belakang berita	69%
3	Citra isu	72%
4	Jangkauan berita	88%
5	Narasumber berita	89%
6	Asal pemberitaan	89%
7	Keberimbangan Narasumber	100%
8	Keberimbangan Sisi Pemberitaan	100%
9	Keberimbangan Perspektif	100%
10	Jurnalistik Lingkungan	52%

### III.10. KATEGORISASI

#### A. Agenda Media

Konsep agenda media diambil dari teori *agenda setting* McComb dan Shaw dikatakan memiliki 3 indikator (Eriyanto, 2011). Antara lain:

1. Isu yang diberitakan oleh media
2. Panjang berita

Universitas Indonesia

### 3. Penempatan berita

Isu perubahan iklim dan termasuk program REDD+ sebagai salah satu solusi yang dicari untuk mengatasi permasalahan tersebut cukup banyak diberitakan di Media Indonesia *online* berupa artikel-artikel panjang maupun artikel pendek. Masyarakat yang memiliki akses internet dapat dengan mudah mengakses artikel-artikel berita ini. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil variabel pertama yaitu ‘isu yang ditonjolkan oleh media’, termasuk di dalamnya indikator berupa jumlah pemberitaan, dan variabel kedua yaitu panjang berita yang dipublikasikan secara *online* yang dikonversi ke Ms. Word dan menghitung jumlah kata yang menyusun satu berita secara keseluruhan. Variabel terakhir tidak digunakan karena ditujukan untuk berita cetak dan tidak cocok untuk mengukur pemberitaan secara *online*.

#### B. Atribut Isu

Kategori atribut isu terdiri dari lima indikator (Manulong, 2012), namun peneliti hanya menggunakan empat diantaranya yang bisa diaplikasikan ke media *online*, yaitu *issue scope*, *issue image*, *story angle*, dan sumber berita:

1. *Issue scope* merupakan jangkauan geopolitik dari efek isu atau event. Kriteria ini dikodekan dalam lingkup yang paling besar dan merupakan ekspansi dari kategori Belak (1972) dan Hoesterey dan Bowman (1976) yang dibagi menjadi internasional, nasional, dan lokal.
2. *Issue image* merupakan impresi mendasar dan memiliki pengaruh yang besar pada pembentukan opini publik dan agenda politik (Baumgartner dan Jones, 1993; Jones, 1994).
3. *Story angle* menjelaskan apakah artikel yang diangkat lebih menekankan pada deskripsi masalah atau konflik yang ada tanpa memberikan solusi atau sebaliknya, memberikan solusi. Dimensi ini digunakan dalam penelitian Lundberg (1984) mengenai cakupan dalam isu-isu lingkungan di majalah berita.

4. Sumber berita merupakan pihak-pihak yang memiliki peran yang penting dalam isu atau peristiwa yang ada dalam artikel tersebut. Gagasan utama dari kategori ini adalah bahwa semua pihak yang dimasukkan dalam artikel dianggap layak untuk diberitakan. Peran-peran dalam sumber berita yaitu pemerintah, industri/perusahaan, akademisi, organisasi non pemerintah, ahli, penduduk lokal.

### C. Objektivitas

Kategori objektivitas diadaptasi secara bebas dari skema Westerstahl (dikutip dari McQuail, 1992 dari buku Eriyanto) untuk menurunkan konsep objektivitas. Westerstahl membagi objektivitas ke dalam dua dimensi besar yaitu kognitif yang berkaitan dengan kualitas informasi dari suatu berita, dan imparialitas, yaitu apakah suatu berita secara sistematis atau tidak menampilkan satu sisi atau dua sisi dari isu atau peristiwa yang diberitakan. Dengan demikian, objektivitas dapat didekati dengan melihat dua dimensi, yaitu sejauh mana kualitas informasi dan apakah semua sisi dari perdebatan dan peristiwa telah diberitakan oleh media. Agar dapat diukur, dimensi ini harus diturunkan ke dalam sub dan elemen yang lebih mikro. Aplikasi yang sesuai dengan penelitian ini adalah turunan dimensi imparialitas, untuk mengamati apakah berita telah disajikan secara adil dari kedua sisi dan (*cover both sides*).

1. Berimbang (*balance*). Berita yang berimbang adalah berita yang menampilkan semua sisi
2. Proporsional. Berita menampilkan pendapat masing-masing pihak dan kedua sisi telah diberikan kesempatan yang sama, atau menyajikan masing-masing perdebatan dalam satu berita.
3. Netral. Berita menampilkan peristiwa dan fakta apa adanya, tidak memihak pada sisi peristiwa.

## III.11. OPERASIONALISASI KONSEP

A. Penulis mengukur isu yang ditonjolkan oleh media dari jumlah pemberitaan

- a. Tahun Produksi Berita: (1) 2010, (2) 2011, (3) 2012

Universitas Indonesia

- b. Tema Berita REDD+: (1) Rumusan kebijakan pengelolaan program REDD+  
(2) Kampanye dan/atau penyelenggaraan kegiatan program REDD+  
(3) Realisasi tindak lanjut program REDD+  
(4) Hambatan tindak lanjut program REDD+ di lapangan
- c. Panjang Berita dalam jumlah kata: (1) Panjang: 351-850 kata  
(2) Sedang: 250-350 kata  
(3) Pendek: 1-250 kata

B. Penulis mengukur atribut isu dari latar belakang berita

- (1) Ekonomi: penyebutan nominal harga proyek REDD+, dan/atau keuntungan program REDD+ ditinjau dari segi ekonomi
- (2) Hukum: penyebutan peraturan undang-undang atau hak masyarakat lokal atau hak guna usaha
- (3) Politik: penyebutan kebijakan negara dalam mengelola program REDD+, atau pernyataan yang mengutamakan kepentingan salah-satu pihak tertentu

C. Penulis mengukur atribut isu dari citra isu

- (1) Mitigasi emisi karbon/ Pro REDD+: berita berisi dukungan atau hal-hal positif /pujian untuk program, pengelolaan program, maupun keuntungan yang didapat dengan menjalankan program REDD+
- (2) Kontra REDD+: berita berisi kritik atau hal-hal negatif /kekurangan atas berjalannya program, pengelolaan program, maupun kerugian yang ditimbulkan selama dijalankannya program REDD+
- (3) Pro dan Kontra REDD+ (isi berita tentang hal yang positif berupa dukungan dan/atau pujian, sekaligus negatif berupa kritik dan kerugian sekaligus yang ditimbulkan
- (4) Tidak ada. Berita tidak secara jelas berisi tentang penilaian pro ataupun kontra program REDD+

#### D. Penulis mengukur atribut isu dari jurnalisme lingkungan

- (1) Pro berkelanjutan: Langkah hidup yang mamou mendukung kehidupan berkelanjutan, kondisi lingkungan hidup yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang
- (2) Biosentris: Kesetaraan spesies, mengakui bahwa setiap spesies memiliki hak terhadap ruang hidup, sehingga perubahan lingkungan hidup (pembangunan) harus memperhatikan dan mempertimbangkan keunikan setiap spesies dan sistem-sistem di dalamnya
- (3) Pro keadilan lingkungan: berpihak pada kaum yang lemah, agar mendapatkan akses setara terhadap lingkungan yang bersih, sehat dan dapat terhindar dari dampak negatif kerusakan lingkungan
- (4) Profesional: memahami materi dan isu-isu lingkungan hidup, menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik, menghormati etika profesi, dan menaati hukum.
- (5) Tidak termasuk ke dalam empat butir di atas

#### E. Penulis mengukur jangkauan berita

- (1.) Internasional: berita menjelaskan kegiatan di luar negeri, dan/atau memberitakan pihak asing di luar negeri
- (2) Nasional: berita menjelaskan kegiatan di dalam negeri, dan/atau memberitakan kegiatan pihak asing maupun domestik di dalam negeri
- (3) Lokal: kegiatan di wilayah tertentu di Indonesia, dan/atau memberitakan kegiatan pihak asing maupun domestik di wilayah tertentu di Indonesia

#### F. Penulis mengukur narasumber berita

- (1) Pemerintah (pejabat pemerintahan pusat maupun daerah)
- (2) Perusahaan/Industri/Asosiasi Pengusaha
- (3) Organisasi Non Pemerintah / Lembaga Swadaya Masyarakat
- (4) Ahli di bidang lingkungan
- (5) Militer/TNI /Kepolisian
- (6) Internasional (narasumber berasal dari warga asing/lembaga internasional)

#### G. Penulis mengukur asal pemberitaan

- (1) Liputan/wawancara wartawan Media Indonesia (*event* program REDD+)
- (2) Debat atau komentar narasumber yang pro REDD+ saja, atau narasumber yang kontra REDD+ saja
- (3) Kampanye dan/atau aktivitas (misalnya rapat koordinasi) narasumber pro REDD+ saja atau narasumber kontra REDD+ saja
- (4) Konferensi pers atau pers rilis program REDD+

#### H. Penulis mengukur Keberimbangan Narasumber

- (1) Narasumber berasal dari pihak yang pro program REDD+ saja
- (2) Narasumber berasal dari pihak yang kontra REDD+ saja
- (3) Narasumber berimbang atau proporsional karena berasal dari dua pihak sekaligus, baik yang pro maupun kontra program REDD+

#### I. Penulis mengukur Keberimbangan Sisi Pemberitaan

- (1) Berita memberikan penekanan dan/atau prioritas pada pihak yang pro program REDD+ saja
- (2) Berita memberikan penekanan dan/atau prioritas pada pihak yang kontra REDD+ saja
- (3) Berita memberikan penekanan dan/atau prioritas berimbang atau proporsional pada dua sisi berita sekaligus, baik yang pro maupun kontra program REDD+

#### J. Penulis mengukur Keberimbangan Perspektif

- (1) Berita disuguhkan dari sudut pandang pihak yang pro program REDD+
- (2) Berita disuguhkan dari sudut pandang pihak yang kontra program REDD+
- (3) Berita disuguhkan dari sudut pandang kedua belah pihak baik yang pro maupun kontra program REDD+

Operasionalisasi konsep di atas digunakan sebagai butir-butir dalam lembar koding. Dengan demikian penilaian koder merupakan hasil turunan dari konsep yang digunakan oleh peneliti.



### **III.12. KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini terbatas pada implikasi konsep agenda media dan rutinitas media pada jurnalisme *online* dengan mereduksi prinsip kerangka jurnalisme konvensional yang tidak sesuai dengan jurnalisme *online*.

### **III.13. KELEMAHAN PENELITIAN**

Metode penelitian kuantitatif dengan paradigma positivis yang peneliti gunakan untuk menganalisis isi berita REDD+ di Media Indonesia *online* memberikan analisa yang kurang mendalam apabila ditinjau dari konteks jurnalisme online, jurnalisme lingkungan, dan kerangka program REDD+ itu sendiri.



## BAB IV

### ANALISIS

#### 4.1 Profil Media Indonesia

##### 4.1.1 Sejarah Singkat

Media Indonesia pertama kali diterbitkan pada tanggal 19 Januari 1970. Sebagai surat kabar umum pada masa itu, Media Indonesia baru bisa terbit 4 halaman dengan tiras yang amat terbatas. Berkantor di Jl. MT. Haryono Jakarta, dari situlah sejarah panjang *Media Indonesia* berawal. Lembaga penerbit Media Indonesia adalah Yayasan Warta Indonesia. Tahun 1976, surat kabar ini kemudian berkembang menjadi 8 halaman. Sementara itu regulasi di bidang pers dan penerbitan mulai berkembang. Salah satunya adalah perubahan SIT (Surat Izin Terbit) menjadi SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Karena perubahan ini penerbitan dihadapkan pada realitas bahwa pers tidak semata menanggung beban idealnya tapi juga harus tumbuh sebagai badan usaha.

Dengan kesadaran untuk terus maju, pada tahun 1988 Teuku Yousli Syah sebagai pendiri Media Indonesia menggandeng Surya Paloh, mantan pimpinan surat kabar Prioritas. Surya Paloh terjun pertama kali dalam industri pers tahun 1986 dengan menerbitkan harian Prioritas. Namun belum cukup lama menjadi koran alternatif bangsa, SIUPP Prioritas dibatalkan Departemen Penerangan. Antara Prioritas dengan Media Indonesia memang ada "benang merah", yaitu dalam *karakter kebangsaannya*.

Dengan kerjasama ini, dua kekuatan bersatu antara kekuatan pengalaman dengan kekuatan modal dan semangat. Maka pada tahun tersebut lahirlah Media Indonesia dengan manajemen baru di bawah PT. Citra Media Nusa Purnama. Surya Paloh menjadi Direktur Utama sedangkan Teuku Yousli Syah menjadi Pemimpin Umum, sedangkan Pemimpin Perusahaan dipegang oleh Lestary

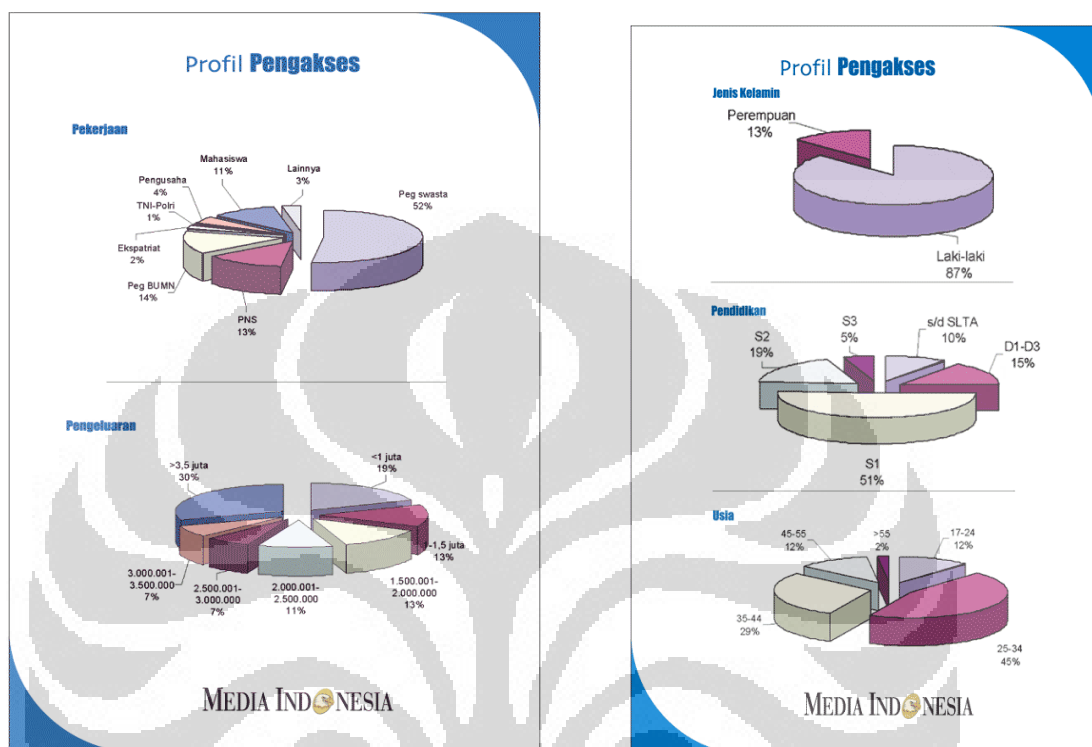
Luhur. Surya Paloh sebagai penerbit Harian Umum Media Indonesia, tetap gigih berjuang mempertahankan kebebasan pers. Wujud kegigihan ini ditunjukkan dengan mengajukan kasus penutupan Harian Prioritas ke pengadilan, bahkan menuntut Menteri Penerangan untuk mencabut Peraturan Menteri No.01/84 yang dirasakan membelenggu kebebasan pers di tanah air.

Sementara itu, markas usaha dan redaksi dipindahkan ke Jl. Gondangdia Lama No. 46 Jakarta. Awal tahun 1995, bertepatan dengan usianya ke 25 Media Indonesia menempati kantor barunya di Komplek Delta Kedoya, Jl. Pilar Mas Raya Kav.A-D, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Di gedung baru ini semua kegiatan di bawah satu atap, Redaksi, Usaha, Percetakan, Pusat Dokumentasi, Perpustakaan, Iklan, Sirkulasi dan Distribusi serta fasilitas penunjang karyawan. Sejarah panjang serta motto "Pembawa Suara Rakyat" yang dimiliki oleh Media Indonesia menjadi semangat yang dipegang oleh seluruh pihak yang terlibat dengan media ini. Sejak Media Indonesia ditangani oleh tim manajemen PT Citra Media Nusa Purnama, banyak pertanyaan tentang apa yang menjadi visi harian ini dalam industri pers nasional.

Tahun 1997, Djafar H. Assegaff baru menyelesaikan tugasnya sebagai Duta Besar di Vietnam dan sebagai wartawan yang pernah memimpin beberapa harian dan majalah, serta menjabat sebagai Wakil Pemimpin Umum LKBN Antara, oleh Surya Paloh dipercayai untuk memimpin harian Media Indonesia sebagai Pemimpin Redaksi. Saat ini Djafar H. Assegaff dipercaya sebagai *Corporate Advisor*. Para pimpinan Media Indonesia saat ini adalah Direktur Utama yang dijabat oleh Lestari Moerdijat, Direktur Pemberitaan dijabat oleh Usman Kansong dan di bidang usaha dipimpin oleh Alexander Stefanus sebagai Direktur Pengembangan Bisnis.

## 4.1.2 Profil Pembaca

Gambar 4.1 Profil Pembaca Media Indonesia



Seperti dijelaskan dengan chart di atas, pengakses Media Indonesia dilihat dari jenis kelamin, didominasi oleh laki-laki. Dilihat dari tingkat pendidikan, Media Indonesia diakses oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan SLTA sampai dengan S3, didominasi oleh pembaca dengan tingkat pendidikan S1. Dari kategori usia, Media Indonesia diakses sebagian besar oleh pembaca berusia 25 sampai dengan 34 tahun. Sementara dari kategori pekerjaan, pengakses Media Indonesia didominasi oleh pegawai swasta, mengikuti setelahnya, pegawai BUMN, PNS, cukup banyak mahasiswa yaitu 11%, pengusaha, ekspatriat, dan lainnya. Sedangkan dilihat dari pengeluaran, tingkatan tersebut didominasi oleh pembaca yang nominal pengeluaran bulannya rata-rata di atas 3,5 juta rupiah. Dari data tersebut peneliti menganggap, secara umum mayoritas audiens Media Indonesia

*online* merupakan kalangan terpelajar yang berasal dari golongan masyarakat menengah ke atas.

## 4.2. Analisis

### 4.2.1 Agenda Media

#### 4.2.1.1. Jumlah Pemberitaan Program REDD+, Tahun 2010-2012

Peneliti ingin mengetahui frekuensi tampilan berita terkait program REDD+ di Media Indonesia *online*. Diperoleh nilai n sebanyak 25 berita ketika peneliti memasukkan kata kunci pencarian REDD+. Berita-berita tersebut dipublikasikan antara tahun 2010 sampai dengan 2012. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi yang akan menjelaskan sebaran berita dari tahun 2010 sampai dengan 2012.

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Tahun Produksi Berita

No	Tahun Produksi Berita	Jumlah	Persentase
1	2010	5	20 %
2	2011	17	68 %
3	2012	3	12 %
	$\Sigma N = 25$	$\Sigma = 25$	$\Sigma = 100 \%$

Gambar 4.2 Chart Frekuensi Berita Tahun 2010-2012



Dari data tersebut, berita tentang program REDD+ paling sering ditampilkan di Media Indonesia *online* selama tahun 2011 sejumlah 17 pemberitaan atau 68% dari seluruh berita yang diperoleh. Tahun 2010 program REDD+ ini hanya ditampilkan 5 kali pemberitaan, atau 20% dari seluruh jumlah berita. Sedangkan tahun 2012, sampel berita diambil antara bulan Januari sampai dengan Juni saja, sesuai batas pengambilan sampel sampai penelitian ini dilaporkan. Jumlah diperoleh untuk tahun 2012 sebanyak 3 berita atau 12% dari seluruh berita.

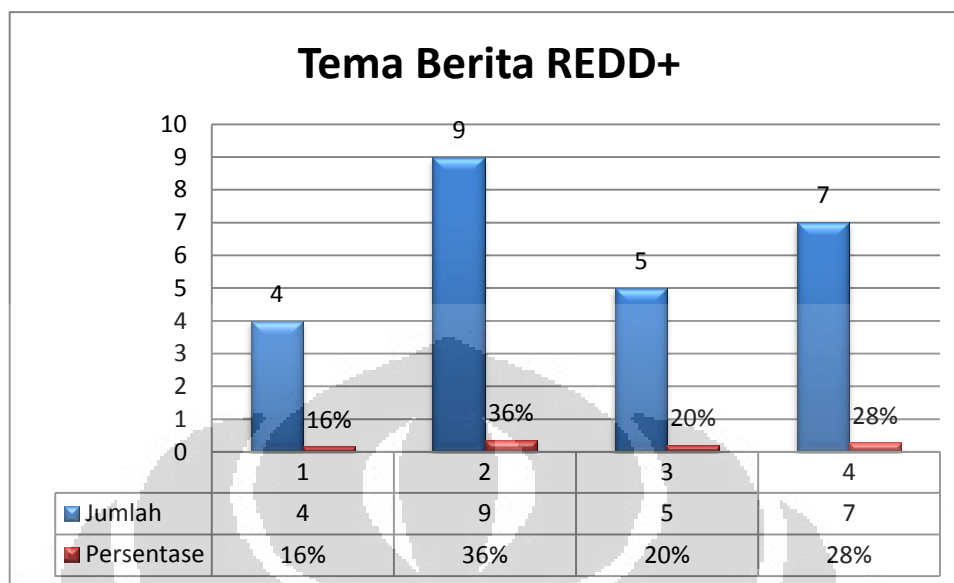
#### 4.2.1.2. Jumlah Pemberitaan Program REDD+ Berdasarkan Tema Berita

Peneliti ingin melihat, dari keduapuluh lima sampel, bagaimana frekuensi Media Indonesia *online* mengkategorikan program REDD+ sebagai pokok permasalahan atau sumber peristiwa yang menjadi dasar pemberitaan antara lain: (1) rumusan kebijakan pengelolaan program REDD+, (2) kampanye dan/atau penyelenggaraan kegiatan program REDD+, (3) realisasi tindak lanjut program REDD+, (4) hambatan tindak lanjut program REDD+ di lapangan. Data yang diperoleh menunjukkan frekuensi sebagai berikut.

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Tema Berita REDD+

No	Tema Berita REDD+	Jumlah	Persentase
1	Rumusan kebijakan pengelolaan program REDD+	4	16%
2	Kampanye dan/atau penyelenggaraan kegiatan program REDD+	9	36%
3	Realisasi tindak lanjut program REDD+	5	20%
4	Hambatan tindak lanjut program REDD+ di lapangan	7	28%
	$\Sigma N = 25$	$\Sigma = 25$	$\Sigma = 100 \%$

Gambar 4.3 Chart Tema Berita REDD+



Dari data tersebut, program REDD+ paling banyak diberitakan adalah yang bertema kampanye dan/atau penyelenggaraan kegiatan program REDD+ yaitu sebanyak 9 berita dari 25 sampel atau 36%. Contoh berita dengan tema ini ditunjukkan dengan berita tanggal 4 Juni 2012 berjudul “REDD+ Perlu Dukungan Seluruh Pemangku Kepentingan”. Disebutkan dalam berita tersebut, Asisten Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada saat Lokakarya Nasional Pemantauan Independen REDD+ menyatakan, “sudah sewajarnya kita mendukung sepenuhnya program UN-REDD ini, dengan menjalin kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga donor dan mitra pembangunan, lembaga swadaya, pihak swasta serta masyarakat, termasuk kelompok kerja pemantauan REDD bersama Yayasan Merah Putih Sulawesi tengah”.

Menyusul setelahnya, tema berita tentang hambatan tindak lanjut program REDD+ di lapangan yaitu sebanyak 7 dari 25 sampel atau 28%, seperti yang terkandung dalam berita berjudul “Ada Perbedaan Moratorium Menhut dengan REDD Plus”. Dalam berita tersebut dijelaskan tentang ketidakcocokan draf moratorium Kementerian Kehutanan dengan draf versi Satgas REDD+, sehingga perbedaan tersebut diperdebatkan.

Lalu tema realisasi tindak lanjut program REDD+ sebanyak 5 dari 25 sampel atau 20%, ditunjukkan dengan contoh judul berita “Aliran Dana REDD Capai Rp270 Triliun”, menunjukkan bahwa proyek REDD+ sedang dilangsungkan. Sedangkan Media Indonesia *online* dalam mempublikasikan seluruh berita yang berkaitan dengan program REDD+ paling sedikit memberitakan tentang rumusan kebijakan pengelolaan program REDD+, yaitu sebanyak 4 dari 25 sampel atau 16%.

#### 4.2.1.3. Jumlah Pemberitaan Program REDD+ Berdasarkan Panjang Berita

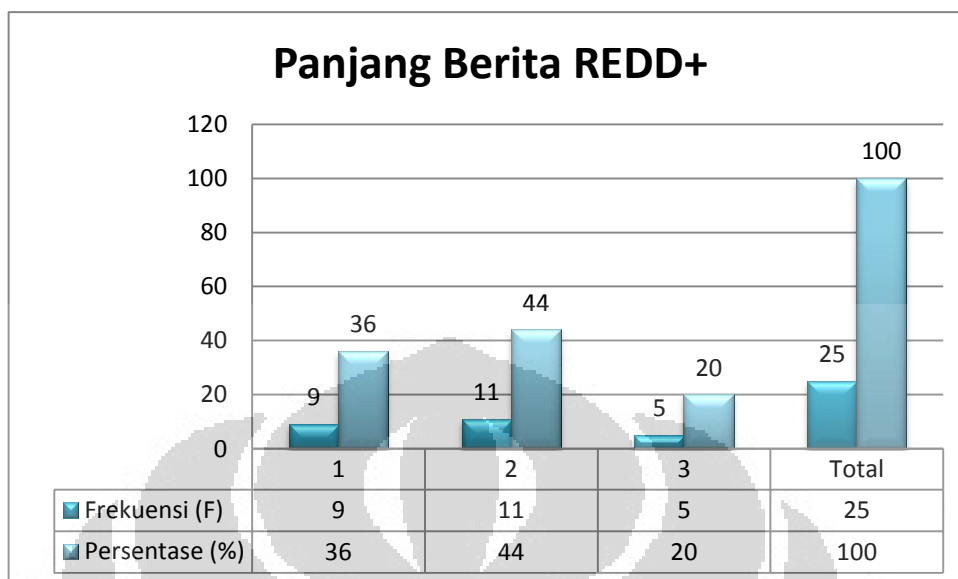
Peneliti ingin menghitung ukuran panjang berita dalam hitungan kata dari masing-masing berita terkait program REDD+ dan frekuensi dari masing-masing kategori untuk semua sampel berita yang dipublikasikan di Media Indonesia *online*. Ukuran panjang berita diadaptasi sesuai sampel yang diperoleh, antara lain sebagai berikut: (1) Panjang, antara 351-850 kata, (2) sedang, 251-350 kata, dan (3) pendek, antara 1-250 kata. Data tersebut ditampilkan dalam tabel frekuensi sebagai berikut.

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Panjang Berita REDD+

No	Panjang Berita REDD+	Jumlah	Persentase
1	Panjang (351-850 kata)	5	20%
2	Sedang (251-350 kata)	11	44%
3	Pendek (1-250 kata)	9	36%
	$\Sigma N = 25$	$\Sigma = 25$	$\Sigma = 100 \%$



Gambar 4.4 Chart Panjang Berita REDD+



Dari data tersebut terlihat bahwa berita kategori panjang ditampilkan paling sedikit, yaitu sebanyak 5 dari 25 berita atau 20%. Berita kategori sedang ditampilkan paling banyak di antara ketiga kategori, yaitu sebanyak 11 dari 25 berita atau 44%. Sementara berita pendek ditampilkan sebanyak 9 dari 25 berita atau 36% dari keseluruhan berita. Berita paling panjang yang dipublikasikan Media Indonesia versi *online* adalah berita sampel nomor 2 berjudul “Hutan Tanaman Jaminan Masa Depan” yang diunggah pada tanggal 12 Oktober 2010, dengan panjang 848 kata. Sedangkan berita paling pendek yang dipublikasikan Media Indonesia *online* adalah berita sampel nomor 22 berjudul “Sekjen PBB Minta Adanya Transparansi Program” yang diunggah pada tanggal 19 November 2011, dengan panjang 77 kata.

#### 4.2.2 Issue Attributes

##### 4.2.2.1 Latar Belakang Berita

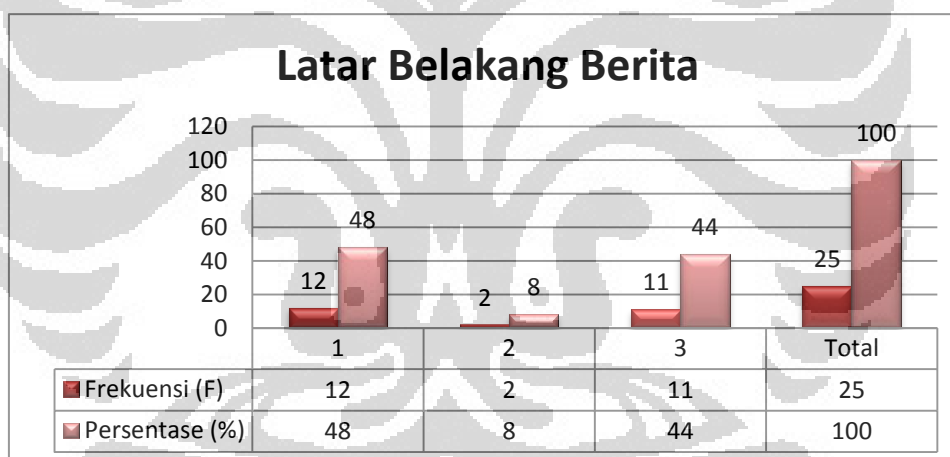
Peneliti ingin menemukan deskripsi yang dapat memberikan penjelasan bagaimana berita tentang program REDD+ dikonstruksikan oleh Media Indonesia *online*. Peneliti membagi konstruksi latar belakang berita menjadi 3 kelompok,

antara lain: (1) ekonomi, (2) hukum, (3) politik. Dari 25 sampel berita, diperoleh data seperti berikut ini.

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Latar Belakang Berita

No	Latar Belakang Berita	Jumlah	Persentase
1	Ekonomi	12	48%
2	Hukum	2	8%
3	Politik	11	44%
	$\Sigma N = 25$	$\Sigma = 25$	$\Sigma = 100 \%$

Gambar 4.5 Chart Latar Belakang Berita



Dari data tersebut di atas, peneliti melihat latar belakang paling dominan dari seluruh berita tentang program REDD+ yang diperoleh adalah latar belakang ekonomi dengan frekuensi terbanyak, yaitu 12 dari 25 berita atau 48%. Hal tersebut ditunjukkan misalnya dalam berita berjudul “Perpres Moratorium Hutan Telah Ditandatangani”. Dalam berita tersebut dinyatakan “pihak Norwegia akan mengucurkan dana sebesar US\$200 juta untuk program REDD+ tahap satu dan tahap dua, serta US\$800juta untuk tahap ketiga”.

Berikutnya adalah berita yang cukup banyak frekuensinya yaitu berita tentang program REDD+ yang berlatar belakang politik, data diperoleh sebanyak 11 dari 25 berita atau 44%. Berita berlatar belakang politik ditunjukkan dalam contoh berita “Kewenangan Satgas REDD Bisa Keruhkan Suasana”. Dalam berita tersebut, Rancangan Inpres Moratorium Hutan versi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dinilai terlalu luas oleh Ekonom LIPI dalam memberikan kewenangan pada Satgas REDD+ yang justru bisa memperkeruh suasana karena membuka peluang tumpang tindih aturan-aturan yang selama ini sudah terjadi dan belum terselesaikan.

Hukum menjadi latar belakang berita paling sedikit publikasinya, yaitu hanya 2 dari 25 berita yang diperoleh atau 8%. Berita yang mengandung latar belakang hukum misalnya “Inpres Moratorium Dinilai Tidak Efektif”, yang menyebutkan bahwa Inpres tersebut hanya berlaku di kawasan hutan (konservasi, kawasan lindung, kawasan hutan produksi serta kawasan gambut) yang sebenarnya sudah dilindungi melalui kebijakan yang lebih tinggi yaitu undang-undang kehutanan nomor 41 tahun 1999.

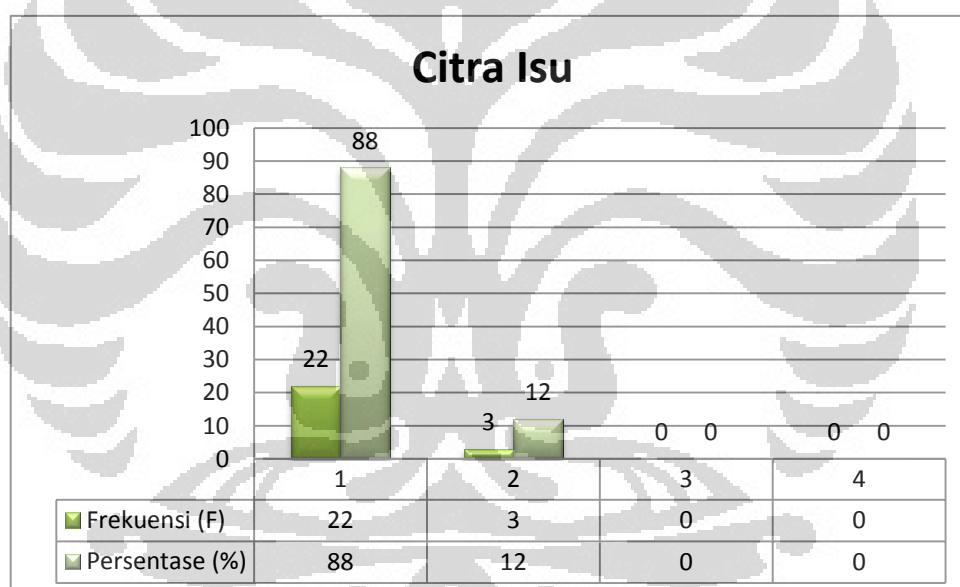
#### 4.2.2.2 Citra Isu

Peneliti ingin mendapatkan gambaran tentang citra isu yang digunakan pada seluruh pemberitaan mengenai program REDD+. Gambaran citra isu akan menjelaskan isi atau konstruksi yang membentuk pemberitaan terkait program REDD+. Agar didapatkan gambaran tersebut, peneliti mengelompokkan seluruh sampel berita ke dalam 4 kategori, antara lain: (1) mitigasi emisi karbon (pro REDD+), (2) kontra REDD+, (3) pro dan kontra REDD+, (4) tidak menyebutkan pro atau kontra REDD+. Perhitungan frekuensi kategori citra isu dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi

No	Citra Isu	Jumlah	Persentase
1	Mitigasi emisi karbon (pro REDD+)	22	88%
2	Kontra REDD+	3	12%
3	Pro dan kontra REDD+	0	0%
4	Tidak menyebutkan pro atau kontra REDD+	0	0%
	$\Sigma N = 25$	$\Sigma = 25$	$\Sigma = 100 \%$

Gambar 4.6 Chart Citra Isu



Dari data tersebut diperoleh gambaran bahwa kategori mitigasi emisi karbon (pro REDD+) mendominasi pemberitaan sebagai citra isu utama, dengan jumlah 22 dari 25 berita atau 88%, sedangkan citra isu yang kontra REDD+ didapat jumlah 3 dari 25 berita atau sebanyak 12% dari keseluruhan berita. Kategori lain yang diprediksi akan ditampilkan sebagai citra isu dari seluruh sampel berita, yaitu 'pro dan kontra REDD+' dalam satu publikasi berita dan 'tidak menyebutkan pro atau kontra REDD+' ternyata tidak mendapat proporsi samasekali.

Contohnya dalam berita berjudul “Kalteng Kirim Tim Ke Brazil dan Norwegia”, paragraf pertama dalam berita tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap program REDD+ yang dapat dilihat dari pernyataan Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, “nantinya tim Kalteng akan berkunjung ke Brasilia dan Oslo untuk menimba ilmu masalah REDD. Jadi, ini adalah kesempatan emas bagi Kalimantan Tengah untuk bisa belajar banyak dari Brasil dan Oslo, dalam melaksanakan REDD yang baik”. Sementara untuk citra isu yang kontra REDD+ dijelaskan dalam artikel berjudul “Hutan Tanaman Jaminan Masa Depan”, menyebutkan harapan bagaimana seharusnya Indonesia menyikapi perdagangan karbon tanpa harus terlalu mengorbankan pembangunan ekonomi. Pertama Indonesia harus tetap memosisikan diri sebagai bukan negara Annex-I, yang wajib menurunkan emisi pada 2012 dan setelah itu. Kedua, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat mutlak tetap diperlukan karena jumlah penduduk kita yang demikian besar, dan sebagian besar di antaranya masih relatif miskin. Ketiga kebijakan-kebijakan pemerintah harus konsisten, tidak berubah-ubah, untuk menciptakan kepastian usaha dan memelihara iklim investasi. Terakhir, melalui kebijakan-kebijakan pemerintah harus memfasilitasi penciptaan iklim kondusif bagi usaha HTI sehingga HTI dapat berkinerja baik, lebih prospektif jika dibandingkan dengan jenis usaha lain. Indonesia harus konsisten membangun hutan tanaman, baik HTI maupun HTR, dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang patut diduga memiliki agenda terselubung terkait dengan persaingan ekonomi global.

#### 4.2.2.3 Jangkauan Berita

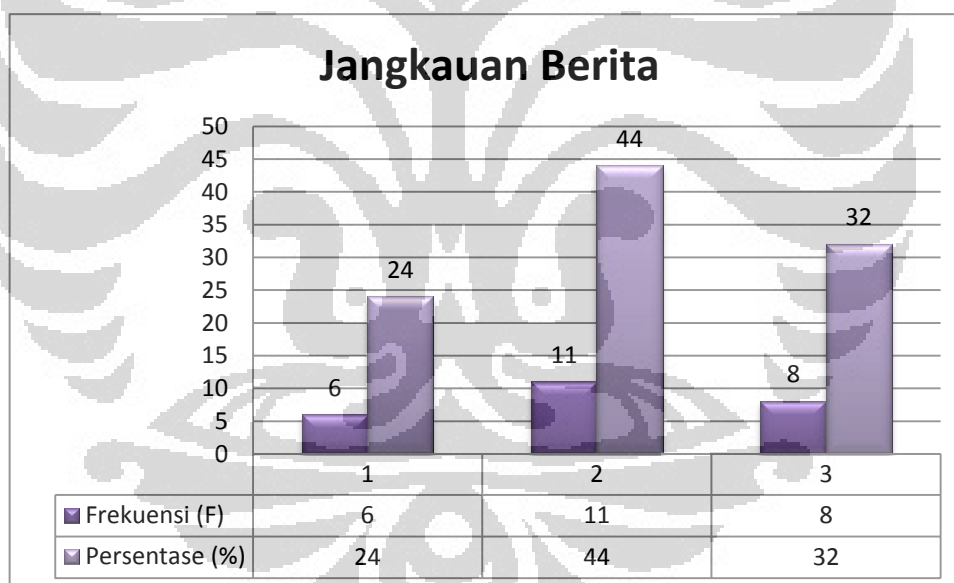
Peneliti menghitung frekuensi kategori jangkauan berita untuk mendapatkan deskripsi sebaran berita tentang program REDD+ berdasarkan kelompok berita (1) internasional, (2) nasional, (3) lokal. Berita internasional dijelaskan dengan konten apakah berita tersebut menjelaskan kegiatan di luar negeri, di dalam negeri (nasional) apabila isi beritanya menjelaskan kegiatan di dalam negeri, ataukah berita di tingkat lokal, apabila berita dilaporkan dari wilayah tertentu di Indonesia, dan/atau memberitakan kegiatan pihak asing maupun domestik di wilayah tertentu

di Indonesia. Tabel frekuensi di bawah ini akan menjelaskan sebaran kategori tersebut.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Jangkauan Berita

No	Jangkauan Berita	Jumlah	Persentase
1	Internasional	6	24%
2	Nasional	11	44%
3	Lokal	8	32%
	$\Sigma N = 25$	$\Sigma = 25$	$\Sigma = 100 \%$

Gambar 4.7 Chart Jangkauan Berita



Dari data di atas, didapatkan penjelasan bahwa jangkauan berita nasional mendominasi dengan nilai frekuensi 11 dari 25 berita atau 44%, paling banyak dibanding kedua kategori jangkauan lainnya. Hal tersebut dicontohkan dalam tampilan berita berjudul “75 Juta Hutan Alam Terancam Deforestasi”, di mana artikel menjelaskan pernyataan organisasi non-pemerintah di Indonesia, membahas tentang mekanisme REDD+ di Indonesia dalam wawancara yang dilakukan di Indonesia juga. Jangkauan berita lokal ditunjukkan dengan 8 dari 25

berita atau 32% dari total keseluruhan jangkauan berita. Berita kategori lokal, seperti dalam judul “REDD+ Perlu Dukungan Seluruh Pemangku Kepentingan”, berita mengulas tentang lokasi *pilot project* REDD+ di Kalimantan, oleh narasumber yang berasal dari pemerintah setempat. Sementara berita program REDD+ internasional dipublikasikan paling sedikit di antara ketiga kategori, yaitu 6 dari 25 berita atau 24%. Contoh kategori ini dapat dilihat dari berita berjudul “Jepang dan Rusia Tolak Lanjutkan Protokol Kyoto”, yang menunjukkan bahwa REDD+ sebagai isu global diulas tindak lanjutnya secara global pula dan lokasi pemberitaan dalam artikel ini adalah di Cancun, Meksiko, pada saat diselenggarakannya perundingan pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan iklim global (COP-16).

#### 4.2.2.4 Narasumber Berita

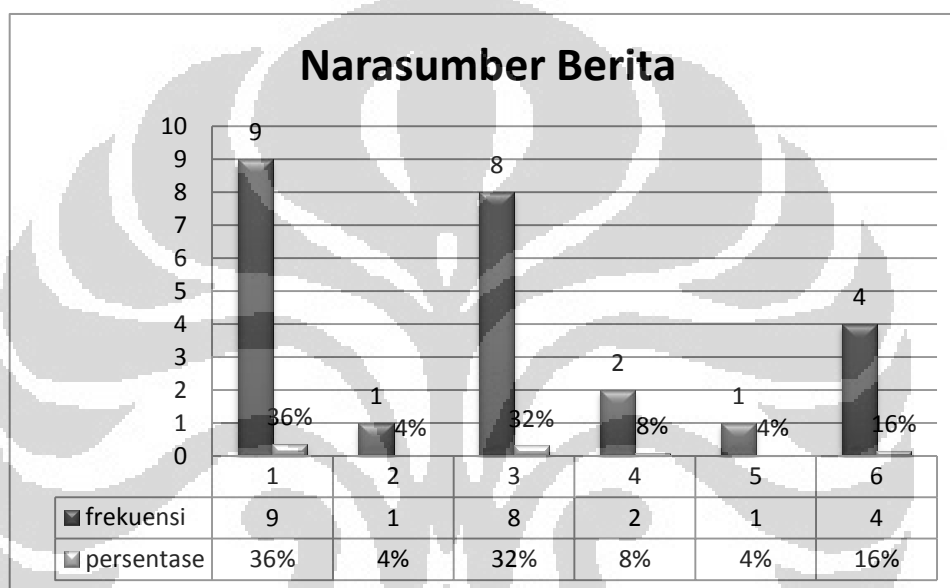
Khusus untuk kategori narasumber berita, peneliti memisahkan sampel ke dalam kelompok-kelompok yang lebih spesifik sesuai dengan variasi yang disebutkan dalam seluruh unit penelitian, antara lain (1) pemerintah/pejabat pemerintah pusat maupun daerah, (2) perusahaan/industri/asosiasi pengusaha, (3) organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat, (4) ahli di bidang lingkungan, (5) militer/TNI/kepolisian, (6) narasumber warga asing atau berasal dari lembaga internasional. Frekuensi distribusi di bawah akan menunjukkan sebaran narasumber berita yang dimaksud.

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Narasumber Berita

No	Narasumber Berita	Jumlah	Persentase
1	Pemerintah/pejabat pemerintah pusat maupun daerah	9	36%
2	Perusahaan/industri/asosiasi pengusaha	1	4%
3	Organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat	8	32%
4	Ahli di bidang lingkungan	2	8%

5	Militer/TNI/kepolisian	1	4%
6	Narasumber warga asing atau berasal dari lembaga internasional	4	16%
	$\Sigma N = 25$	$\Sigma = 25$	$\Sigma = 100 \%$

Gambar 4.8 Chart Narasumber Berita



Dari sebaran data tersebut di atas, narasumber yang mendominasi pemberitaan program REDD+ adalah pemerintah atau pejabat pemerintahan, baik dari pusat maupun daerah, dengan jumlah frekuensi 9 dari 25 berita atau 36%. Seperti dalam berita berjudul “Satgas Emisi Studi Banding ke Brazil”, narasumbernya adalah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang menjelaskan peranan Satgas persiapan pembentukan lembaga penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Narasumber yang berasal dari organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat mendominasi nomor dua dengan frekuensi 8 dari 25 berita atau 32% pemberitaan program REDD+. Melihat berita berjudul “Ada Perbedaan Moratorium Menhut dengan REDD Plus” sebagai contoh, Greenpeace yang dikenal secara umum sebagai lembaga non-pemerintah yang peduli lingkungan hidup menjadi narasumber utama. Pada berita ini, Greenpeace



mempermasalahkan perbedaan cakupan hutan yang diperhitungkan oleh pemerintah dan perbandingan ukurannya dengan data yang Greenpeace miliki. Narasumber internasional atau warga asing dari lembaga internasional menjadi narasumber dengan frekuensi 4 dari 25 berita atau 16% dari seluruh sampel berita. Contohnya dalam berita berjudul “SBY Ketemu Pemimpin UNDP Siang Ini”, disebutkan Helen Clark yang merupakan mantan perdana Menteri New Zealand yang saat ini menjabat sebagai administrator (pemimpin) badan pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Peran Helen Clark di sini sebagai narasumber utama pada saat kunjungannya ke Kompleks Istana Kepresidenan. Sementara itu, narasumber ahli bidang lingkungan berpartisipasi dalam 2 dari 25 berita atau setara dengan 8%, misalnya pada berita berjudul “Hutan Tanaman Jaminan Masa Depan”. Sedangkan dua kategori lainnya, yaitu narasumber dari perusahaan/industri/asosiasi pengusaha dan dari golongan militer / TNI / kepolisian masing-masing tercatat 1 dari 25 berita atau 4% dari seluruh frekuensi narasumber. Narasumber dari Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) pada berita berjudul “APKI Nilai Pernyataan CIFOR Rugikan Industri Kertas Indonesia” menunjukkan narasumber dari asosiasi pengusaha yang tidak sejalan dengan skema REDD+. Sedangkan pada berita “1.400 Personel TNI Polri Amankan Kunjungan Sekjen PBB ke Kalteng” menunjukkan narasumber yang merupakan komandan Resort Militer 102 Panju siap dengan persiapan pasukannya mengamankan acara kunjungan Sekjen PBB Ban Ki-Moon dan istrinya ke Palangkaraya untuk meresmikan Kantor Koordinasi PBB untuk REDD+.

#### 4.2.2.5 Asal Pemberitaan

Pada kategori asal pemberitaan, peneliti ingin melihat dari mana wartawan Media Indonesia *online* mendapatkan kutipan yang menjadi dasar penulisan berita. Dalam kategori ini, peneliti membagi ke dalam 4 kelompok, yaitu (1) liputan/wawancara wartawan Media Indonesia dalam event program REDD+, (2) debat/komentar narasumber yang pro REDD+ saja, atau narasumber yang kontra REDD+ saja, (3) kampanye/aktivitas (misalnya rapat koordinasi) narasumber pro REDD+ saja atau narasumber kontra REDD+ saja, (4) konferensi pers/pers rilis

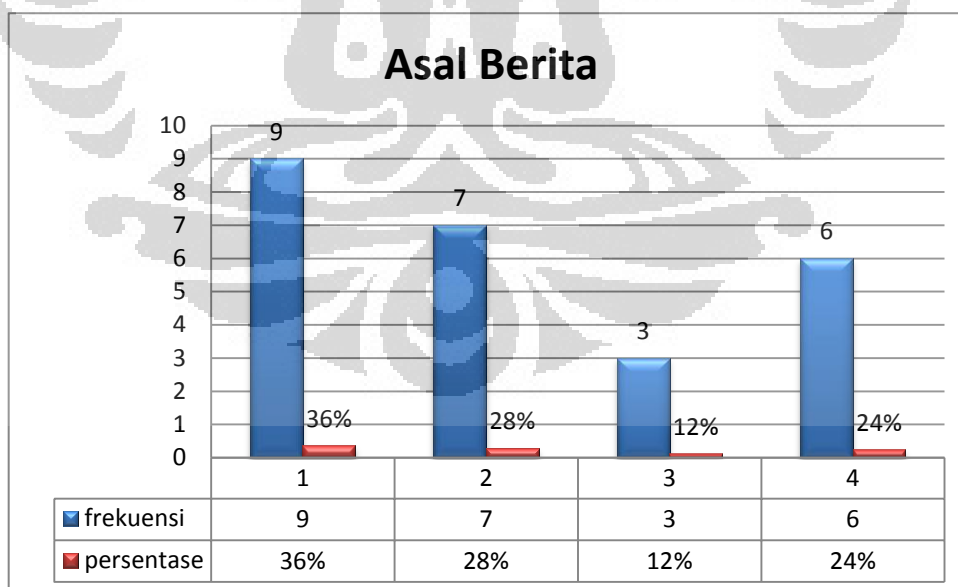
**Universitas Indonesia**

program REDD+. Dari penghitungan frekuensi asal pemberitaan ini, diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Asal Pemberitaan

No	Asal Pemberitaan	Jumlah	Persentase
1	liputan/wawancara wartawan Media Indonesia dalam event program REDD+	9	36%
2	debat/komentar narasumber yang pro REDD+ saja, atau narasumber yang kontra REDD+ saja	7	28%
3	kampanye/aktivitas (misalnya rapat koordinasi) narasumber pro REDD+ saja atau narasumber kontra REDD+ saja	3	12%
4	konferensi pers/pers rilis program REDD+	6	24%
	$\Sigma N = 25$	$\Sigma = 25$	$\Sigma = 100 \%$

Gambar 4.9 Chart Asal Berita



Dari data tersebut diperoleh gambaran, dalam mempublikasikan berita tentang program REDD+, wartawan Media Indonesia paling banyak mendapatkan data

dari liputan atau wawancara pada saat berlangsungnya event program REDD+. Hal ini dijelaskan dengan 9 dari 25 berita atau 36% mendominasi sampel pemberitaan. Pada contoh berita berjudul “Presiden Ajak Masyarakat Lindungi Hutan”, dijelaskan bahwa Presiden SBY menghadiri seminar internasional betajuk *Forest Indonesia, alternative futures to meet demands for food, fibre, fuel, and REDD+* tentang kelangsungan dan perlindungan hutan Indonesia yang dihadiri oleh pelaku berbagai sektor baik dalam maupun luar negeri. Seminar tersebut membahas masa depan hutan di Indonesia dari perspektif internasional dan nasional. Frekuensi selanjutnya adalah asal berita program REDD+ yang diperoleh dari debat atau komentar narasumber yang pro REDD+ saja atau yang kontra REDD+ saja, yaitu 7 dari 25 berita atau 28% dari keseluruhan berita yang digunakan sebagai sampel. Contohnya ada pada berita berjudul “Walhi: Penolakan Rel KA di Kalteng Tidak Murni demi Lingkungan”. Dalam berita tersebut, lembaga non-pemerintah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai pada prinsipnya penolakan pembangunan rel kereta api oleh gubernurnya, Agustin Teras Narang, merupakan benturan kepentingan proyek antara pusat dan daerah, bukan semata-mata atas pertimbangan perlindungan terhadap lingkungan. Wartawan Media Indonesia juga mendapatkan sumber data melalui konferensi pers atau pers rilis program REDD+, seperti yang dilihat dari persentase berikutnya, sebanyak 6 dari 25 berita atau 24% pemberitaan. Hal ini ditunjukkan dalam berita berjudul “Hari Hutan 2011 Dipusatkan di Afrika Selatan”, di mana disebutkan bahwa humas lembaga non-pemerintah *Center for International Forestry Research* (CIFOR) mengirimkan siaran pers ke Media Indonesia online untuk menginformasikan penyelenggaraan *Conference of Parties* (COP-Konferensi Para Pihak) di Afrika Selatan. COP merupakan otoritas tertinggi dalam kerangka kerja PBB. Asal berita paling sedikit yang digunakan wartawan Media Indonesia dalam pemberitaan REDD+ ini berasal dari kampanye dan/atau aktivitas (misalnya rapat koordinasi) narasumber pro REDD+ saja atau narasumber yang kontra REDD+ saja, yaitu sebanyak 3 dari 25 berita atau 12%. Kategori ini dicontohkan dalam berita berjudul “BUMN Kelola Cadangan Karbon 774 Juta Ton”. Dalam berita ini disebutkan bahwa Deputy Bidang Usaha Primer Kementerian BUMN, Megananda Daryono dalam lokakarya tentang Kebijakan

**Universitas Indonesia**

dan Pertumbuhan Hijau di DPD RI mengatakan, “perdagangan karbon bisa menjadi salah satu implementasi Rencana Strategis Nasional REDD+ sesuai komitmen pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% sampai 2020.”

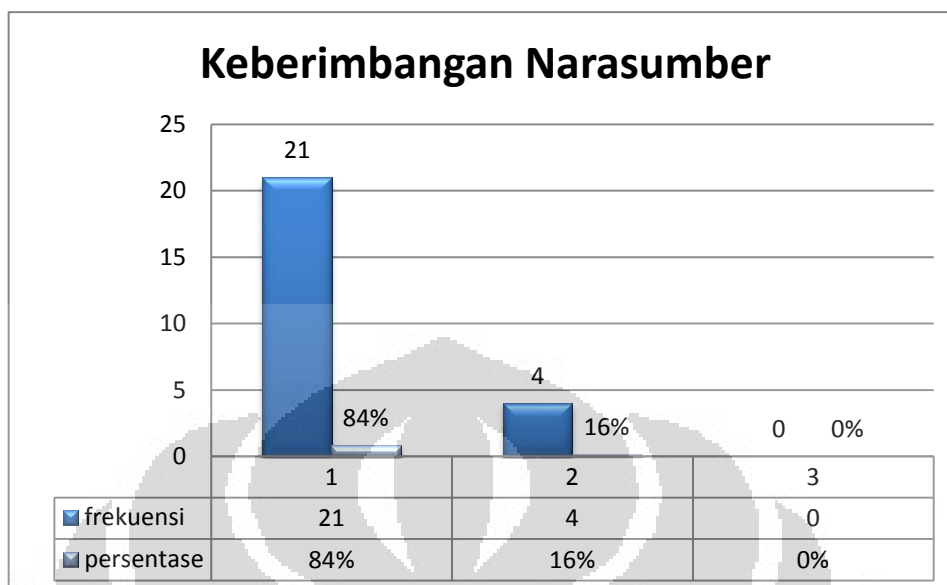
#### 4.2.2.6 Keberimbangan Narasumber

Pada kategori keberimbangan narasumber, peneliti ingin melihat apakah wartawan Media Indonesia *online* menampilkan kutipan dari kedua belah pihak narasumber dalam satu berita, yang menjadi dasar penulisan berita. Dalam kategori ini, peneliti membagi ke dalam 3 kelompok, yaitu (1) narasumber berasal dari pihak pro REDD+ saja, (2) narasumber berasal dari pihak kontra REDD+ saja, (3) narasumber berimbang atau proporsional karena berasal dari dua belah pihak sekaligus, baik yang pro maupun yang kontra REDD+. Dari penghitungan frekuensi asal pemberitaan ini, diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Keberimbangan Narasumber

No	Keberimbangan Narasumber	Jumlah	Persentase
1	Narasumber berasal dari pihak pro REDD+ saja	21	84%
2	Narasumber berasal dari pihak kontra REDD+ saja	4	16%
3	Narasumber berimbang atau proporsional karena berasal dari dua belah pihak sekaligus, baik yang pro maupun yang kontra REDD+	0	0%
	$\Sigma N = 25$	$\Sigma = 25$	$\Sigma = 100 \%$

Gambar 4.10 Chart Keberimbangan Narasumber



Dari data tersebut, peneliti melihat bahwa pada setiap berita mengenai program REDD+, Media Indonesia selalu mengutip satu saja narasumber pada satu berita, baik yang pro REDD+ maupun kontra REDD+. Narasumber pro REDD+ mendominasi sebanyak 21 dari 25 berita atau 84%, seperti contoh berita berjudul “Terbuka Peluang Indonesia Pimpin Gerakan Perubahan Iklim“. Dalam berita tersebut dituliskan bahwa Helen Clark mengunjungi Indonesia dan sebagai administrator PBB, dia menyatakan “Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemimpin global dalam perubahan iklim. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menetapkan jadwal untuk mengurangi emisi, dan hanya tercapai bila REDD diimplementasikan”. Sementara itu narasumber yang minoritas yaitu kontra REDD+ sebanyak 4 dari 25 berita atau 16%, ditunjukkan pada contoh berita berjudul “Kewenangan Satgas REDD Bisa Keruhkan Suasana”. Berita tersebut mengutip pernyataan Ekonom Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam. Latif menyebutkan terlalu luasnya fungsi Satgas REDD akan menimbulkan kesan yang tidak baik di mata publik. “Hal ini juga akan menambah keruh suasana karena membuka peluang tumpang tindih aturan-aturan yang selama ini sudah terjadi dan belum terselesaikan. Draf inpres moratorium versi UKP4 diindikasikan berupaya untuk memusatkan segenap kewenangan moratorium pada genggaman Satgas

**Universitas Indonesia**

REDD+”. Peneliti menemukan, tidak ada berita yang menyuguhkan dua narasumber dari dua pihak yang berseberangan pada satu berita pun.

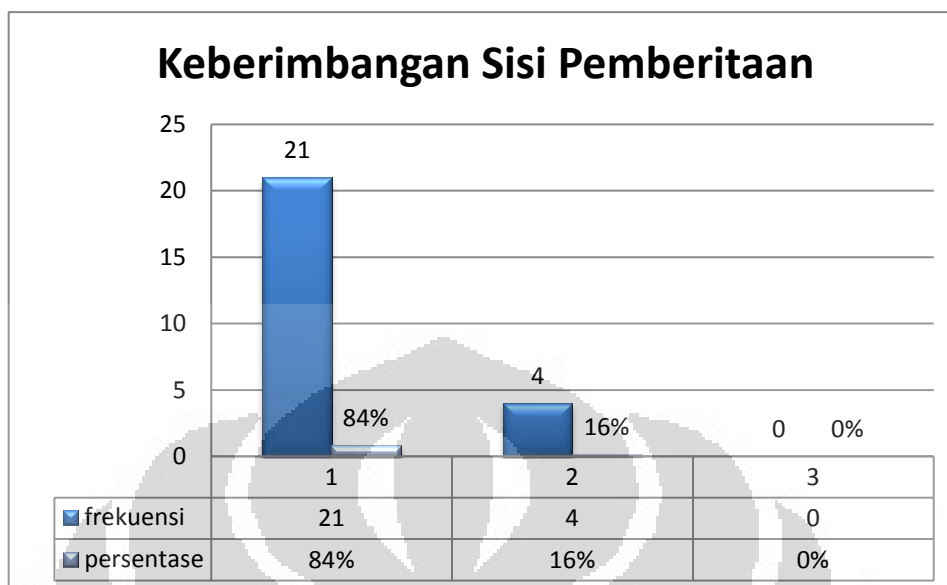
#### 4.2.2.7 Keberimbangan Sisi Pemberitaan

Pada kategori keberimbangan narasumber, peneliti ingin melihat apakah wartawan Media Indonesia *online* menampilkan kutipan dari kedua belah pihak narasumber dalam satu berita, yang menjadi dasar penulisan berita. Dalam kategori ini, peneliti membagi ke dalam 3 kelompok, yaitu (1) berita memberikan penekanan dan/atau prioritas pada pihak yang pro REDD+ saja, (2) berita memberikan penekanan dan/atau prioritas pada pihak yang kontra REDD+ saja, (3) berita memberikan penekanan dan/atau prioritas berimbang atau proporsional pada dua sisi berita sekaligus, baik yang pro maupun kontra program REDD+. Dari penghitungan frekuensi asal pemberitaan ini, diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Keberimbangan Sisi Pemberitaan

No	Keberimbangan Sisi Pemberitaan	Jumlah	Persentase
1	berita memberikan penekanan dan/atau prioritas pada pihak yang pro REDD+ saja	21	84%
2	berita memberikan penekanan dan/atau prioritas pada pihak yang kontra REDD+ saja	4	16%
3	berita memberikan penekanan dan/atau prioritas berimbang atau proporsional pada dua sisi berita sekaligus, baik yang pro maupun kontra program REDD+	0	0%
	$\Sigma N = 25$	$\Sigma = 25$	$\Sigma = 100 \%$

Gambar 4.11 Chart Keberimbangan Sisi Pemberitaan



Dari data tersebut, peneliti melihat bahwa pada setiap tulisan tentang program REDD+, Media Indonesia selalu menulis dari satu sisi pemberitaan saja dalam satu berita. Dari 25 berita yang digunakan sebagai sampel, 21 berita di antaranya atau 84% mendominasi keberimbangan sisi pemberitaan. Media Indonesia memberikan porsi dominan untuk berita yang menekankan prioritas pada pihak yang pro REDD+ saja. Salah satunya dalam berita berjudul “CIFOR Undang Presiden Buka Konferensi Perubahan Iklim” di mana dituliskan bahwa Humas *Center for International Forestry Research (CIFOR)*, Budhy Kristanti, menyebutkan konferensi tersebut melibatkan 1.000 pakar kehutanan dari berbagai daerah di Indonesia yang akan mendiskusikan bagaimana Indonesia dapat tetap mempertahankan hutan hujan tropis dan pada saat bersamaan memastikan pertumbuhan ekonominya”. Begitupun 20 berita lainnya yang sama-sama memberitakan satu sudut dari pihak yang pro REDD+ saja. Sementara itu, 4 berita lainnya atau 16% menjelaskan sisi minoritas keberimbangan sisi pemberitaan, Media Indonesia *online* memberikan porsi ini untuk berita yang menekankan prioritas pada pihak yang kontra REDD+ saja. Misalnya pada berita berjudul “Hutan Tanaman Janiman Masa Depan”, disebutkan sisi pemberitaan dari pihak kontra REDD+ saja pada kalimat: “Berdasarkan fakta, mekanisme perdagangan karbon dalam kemas AR/CDM di Indonesia belum terbukti berhasil

**Universitas Indonesia**

menyejahterakan rakyat. Demikian juga dengan REDD dan REDD+, yang sampai saat ini belum terlihat nyata komitmen dari negara-negara maju yang masuk daftar Annex-I, yang berkewajiban menurunkan emisi di negara masing-masing. Akibatnya, mekanisme pasar karbon, yang seharusnya juga memperhatikan kepentingan pembangunan negara-negara non-Annex-I belum maujud senyatanya.”. Berita yang memberikan penekanan dan/atau prioritas berimbang atau proporsional pada dua sisi berita sekaligus, baik yang pro dan kontra program REDD+ tidak mendapat tempat dan dijelaskan dengan angka 0%.

#### 4.2.2.8 Keberimbangan Perspektif

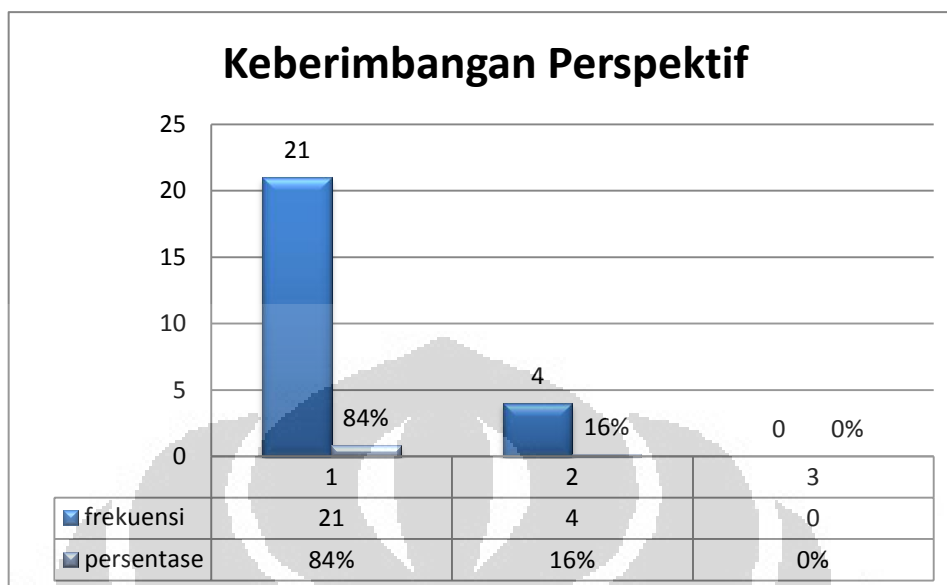
Pada kategori keberimbangan perspektif, peneliti ingin melihat apakah wartawan Media Indonesia *online* menulis berita secara netral atau memposisikan perspektif dari sudut pemikiran pihak yang pro dan kontra program REDD+ sekaligus. Dalam kategori ini, peneliti membagi ke dalam 3 kelompok, yaitu (1) berita disuguhkan dari sudut pandang pihak yang pro program REDD+ saja, (2) berita disuguhkan dari sudut pandang pihak yang kontra program REDD+ saja, (3) berita disuguhkan dari sudut pandang kedua belah pihak baik yang pro maupun yang kontra program REDD+ sekaligus. Dari penghitungan frekuensi asal pemberitaan ini, diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Keberimbangan Perspektif

No	Keberimbangan Perspektif	Jumlah	Persentase
1	berita memberikan penekanan dan/atau prioritas pada pihak yang pro REDD+ saja	21	84%
2	berita memberikan penekanan dan/atau prioritas pada pihak yang kontra REDD+ saja	4	16%
3	berita memberikan penekanan dan/atau prioritas berimbang atau proporsional pada dua sisi berita sekaligus, baik yang pro maupun kontra program REDD+	0	0%
	$\Sigma N = 25$	$\Sigma = 25$	$\Sigma = 100 \%$



Gambar 4.12 Chart Keberimbangan Perspektif



Dari data tersebut, peneliti melihat bahwa pada setiap berita tentang program REDD+, Media Indonesia selalu menulis dari satu perspektif saja dalam satu berita. Serupa dengan dua variabel sebelumnya yaitu Keberimbangan Narasumber dan Keberimbangan Perspektif, Keberimbangan Perspektif ini menampilkan berita dari satu narasumber dan dari satu sisi pemberitaan narasumber tersebut, maka perspektif yang ditampilkan pun mengikuti perspektif narasumber di masing-masing berita. Dari 25 berita yang digunakan sebagai sampel, 21 berita di antaranya atau 84% dan mendominasi perspektif pemberitaan, Media Indonesia memberikan porsi dominan untuk berita yang disuguhkan dari sudut pandang pihak yang pro program REDD+ saja. Sementara itu, 4 berita lainnya atau 16% menjelaskan sisi minoritas, Media Indonesia memberikan porsi ini untuk berita yang ditulis dari perspektif pihak yang kontra program REDD+ saja. Berita yang disuguhkan dan ditulis dari sudut pandang kedua belah pihak secara berimbang atau proporsional, baik yang pro dan kontra program REDD+ sekaligus, tidak mendapat tempat dan dijelaskan dengan angka 0%.

#### 4.2.2.9 Jurnalisme Lingkungan

Pada kategori jurnalisme lingkungan, peneliti ingin melihat bagaimana jurnalisme lingkungan didefinisikan sebagai proses kerja jurnalisme melalui pengumpulan,

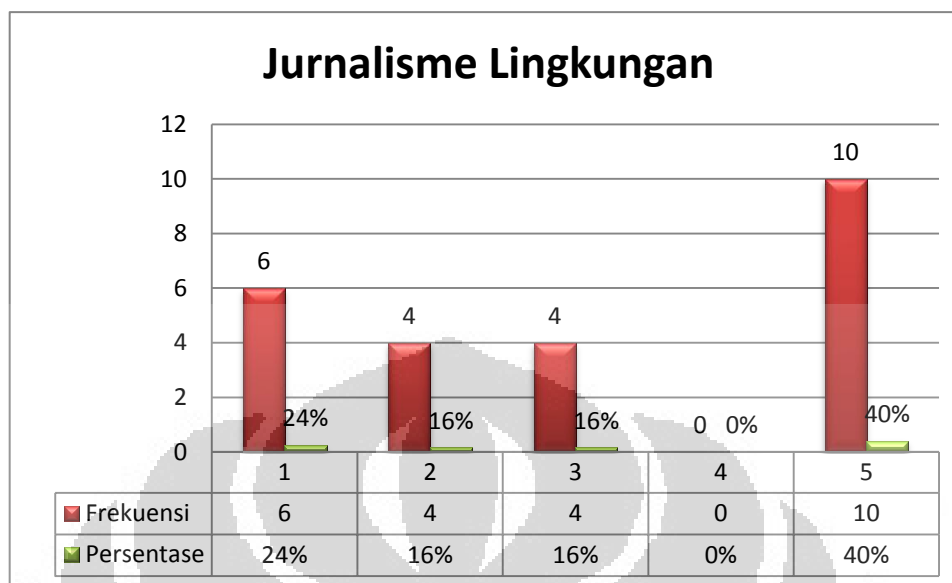
**Universitas Indonesia**

verifikasi, distribusi dan penyampaian informasi terbaru berkaitan dengan berbagai peristiwa, kecenderungan dan permasalahan masyarakat, yang berhubungan dengan dunia non-manusia di mana manusia berinteraksi di dalamnya. Dalam kategori ini, peneliti membagi ke dalam 5 kelompok, yaitu (1) Pro berkelanjutan: Langkah hidup yang mampu mendukung kehidupan berkelanjutan, kondisi lingkungan hidup yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang, (2) Biosentris: Kesetaraan spesies, mengakui bahwa setiap spesies memiliki hak terhadap ruang hidup, sehingga perubahan lingkungan hidup (pembangunan) harus memperhatikan dan mempertimbangkan keunikan setiap spesies dan sistem-sistem di dalamnya, (3) Pro keadilan lingkungan: berpihak pada kaum yang lemah, agar mendapatkan akses setara terhadap lingkungan yang bersih, sehat dan dapat terhindar dari dampak negatif kerusakan lingkungan, (4) Profesional: memahami materi dan isu-isu lingkungan hidup, menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik, menghormati etika profesi, dan menaati hukum, (5) Tidak termasuk ke dalam empat butir di atas. Dari penghitungan frekuensi asal pemberitaan ini, diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Jurnalisme Lingkungan

No	Jurnalisme Lingkungan	Jumlah	Persentase
1	Pro berkelanjutan	6	24%
2	Biosentris	4	16%
3	Pro keadilan lingkungan	4	16%
4	Profesional	0	0%
5	Tidak termasuk ke dalam empat butir di atas	10	40%
	$\Sigma N = 25$	$\Sigma = 25$	$\Sigma = 100 \%$

Gambar 4.13 Chart Jurnalisme Lingkungan



Dari data tersebut, peneliti melihat bahwa pada setiap berita tentang program REDD+, Media Indonesia *online* terlihat tidak menjalankan kaidah jurnalistik dengan baik, karena cenderung menulis dari satu sisi perspektif saja dan dibuktikan dengan 0% frekuensi untuk profesionalisme jurnalistik lingkungan. 6 dari 25 berita atau 24% menunjukkan bahwa ditinjau dari kaidah jurnalisme lingkungan, sudut penulisan Media Indonesia menonjolkan konsep Pro Keberlanjutan dalam mendeskripsikan masalah atau konflik yang ada tanpa memberikan solusi atau sebaliknya, memberikan solusi. Seperti yang dibahas pada sub bab di atas, pro keberlanjutan menjelaskan prinsip ‘langkah hidup yang mampu mendukung kehidupan berkelanjutan, kondisi lingkungan hidup yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang’. Prinsip tersebut dijelaskan dalam salah satu contoh berita berjudul “Australia Alokasikan 45 Juta Dollar untuk Indonesia”. Dalam berita tersebut, Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd pada saat berada di Bali menyatakan bahwa Australia merupakan pendukung kuat upaya Indonesia mengatasi perubahan iklim, menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan yang besarnya mencapai 18% dari kadar emisi di dunia dan 60% dari kadar emisi di Indonesia sangatlah penting dalam mencapai tujuan akhir dari program perubahan iklim dunia. Konsep Biosentris dan Pro Keadilan Lingkungan

**Universitas Indonesia**

mendapatkan tempat setara, sejumlah masing-masing 4 dari 25 berita atau 16% dari seluruh pemberitaan. Untuk konsep Biosentris yang prinsipnya ‘kesetaraan spesies, mengakui bahwa setiap spesies memiliki hak terhadap ruang hidup, sehingga perubahan lingkungan hidup (pembangunan) harus memperhatikan dan mempertimbangkan keunikan setiap spesies dan sistem-sistem di dalamnya’, ditunjukkan dengan contoh berita berjudul “Kalteng Kirim Tim ke Brasil dan Norwegia”. Dalam berita tersebut dinyatakan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, bahwa di Kalteng sudah terbantu dengan adanya Perda tentang lembaga adat atau kedadatangan. Hal inilah yang akan terus dicari dan dipelajari bagaimana caranya agar masyarakat lokal tidak kehilangan haknya dan jangan sampai kehilangan tanahnya. Frekuensi untuk kategori keempat yaitu Profesionalisme yang prinsipnya ‘memahami materi dan isu-isu lingkungan hidup, menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik, menghormati etika profesi, dan menaati hukum’ terhitung 0 dari seluruh sampel karena semuanya tidak menjalankan kaidah jurnalistik yang *cover both sides* dan seperti yang sudah dijelaskan di atas, keduapuluh lima berita tersebut tidak berimbang secara narasumber, sisi pemberitaan dan perspektifnya. Dalam berita lingkungan yang baik, jurnalis yang menerapkan paham mengenai kesadaran lingkungan dapat berperan sebagai *watchdog* (anjing penjaga) maupun *kelompok penekan* yang mengkritik pemerintah dan korporasi. Namun mengingat mayoritas pemberitaan menunjukkan sistematis pengelolaan pemerintah akan program REDD+ dan mengandung muatan ekonomi dan politik, maka tidak bisa dikatakan Media Indonesia *online* sejalan dengan jurnalisme lingkungan. Ini ditunjukkan misalnya dalam berita berjudul “Norwegia Tetapkan Sulteng Pilot Proyek REDD+” yang menyebutkan bahwa pemerintah Norwegia akhirnya menetapkan Suawesi Tengah sebagai salah satu wilayah untuk program REDD+, setelah pemerintah Norwegia menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan pemerintah Indonesia, untuk proyek seharga US\$500 ribu. Frekuensi untuk kategori ke 5 (tidak termasuk ke dalam empat butir di atas) mendominasi indikator jurnalisme lingkungan ini secara mengejutkan karena sebagai berita tentang lingkungan, justru berita-berita tersebut tidak menunjukkan konten yang peneliti harapkan, sejumlah 10 dari 25 berita atau setara dengan 40% dari total keseluruhan berita. Frekuensi dominan ini

ditunjukkan misalnya berita berjudul “Yudhoyono Akan Bertemu PM Pakistan, Norwegia dan Denmark”. Berita ini termasuk ke dalam sampel yang peneliti analisis karena menyebutkan REDD+ sambil lalu pada saat esensi beritanya membahas aspek-aspek lain. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan, Norwegia, dan Denmark di sela-sela hari pertama rangkaian KTT Keamanan Nuklir ke-2 di Seoul, Korea Selatan, Indonesia dan Pakistan akan memperkuat kerja sama di berbagai bidang, antara lain bidang perdagangan yang kini mencapai US\$1,1 miliar dan bidang pemberantasan terorisme. Kedua negara juga akan mempererat kerja sama dalam kerangka Organisasi Kerja sama Islam (dulu Organisasi Konferensi Islam). Pertemuan bilateral kedua adalah antara Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg. Yang sangat menonjol dari pertemuan itu adalah kerja sama di bidang lingkungan hidup, terutama *climate change*. Norwegia adalah mitra Indonesia dalam pelaksanaan program pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi hutan (REDD+). Malam harinya, Yudhoyono akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Denmark Helle Thorning Schmidt. KTT Keamanan Nuklir ke-2 akan dilaksanakan pada 26-27 Maret 2012. Pada hari pertama, para peserta KTT dijadwalkan menghadiri acara penyambutan resmi pada pukul 16.30 waktu setempat, dan dilanjutkan dengan jamuan makan malam pada pukul 18.30 waktu setempat di Museum Nasional Korea. KTT Keamanan Nuklir ke-2 diikuti pemimpin dari 53 negara dan perwakilan organisasi internasional, yaitu PBB, IAEA, dan Uni Eropa.

## BAB V

### INTERPRETASI

Berdasarkan analisis agenda media terkait dengan program REDD+ yang dipublikasikan Media Indonesia *online*, penulis melihat jumlah sampel yang diperoleh adalah sebanyak 25 berita yang secara signifikan membahas program REDD+. Kedua puluh lima berita ini diproduksi antara tahun 2010 sampai dengan pertengahan tahun 2012. Dari ketiga kelompok tahun tersebut, berita tentang program REDD+ paling banyak dipublikasikan tahun 2011, dan sampai dengan pertengahan tahun 2012, tema berita REDD+ diunggah paling sedikit.

Sesuai dengan prinsip agenda media, isu perubahan iklim atau program REDD+ khususnya menjadi dianggap tidak terlalu penting karena secara *priming* berita-berita tersebut tidak termasuk kategori berita utama yang sering diberitakan ataupun dikemukakan kepada masyarakat dalam porsi besar agar mendapatkan perhatian publik. Liputan berita tentang REDD+ tentang pentingnya isu perubahan iklim tidak menjadikan perubahan iklim *alert* dan krusial dalam benak publik. Hal ini menunjukkan kemampuan media yang berfungsi sebagai penentu agenda tidak cocok atau sejalan dengan isu perubahan iklim dan program REDD+nya.

Orang cenderung tidak familiar dengan program REDD+, mungkin bahkan samasekali tidak mengetahuinya. Esensinya di sini adalah pemahaman khalayak tentang bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia mengetahui kelebihan dan kekurangan program REDD+ yang diberitakan oleh Media Indonesia karena Media Indonesia menyusun prioritas pemberitaan program REDD+, sehingga masyarakat tahu harus berada di pihak manakah mereka ketika melihat PBB menyodorkan setumpuk uang ke sejumlah masyarakat adat yang awam politik melalui pemerintah Indonesia. Logika

sederhananya, mayoritas pengakses Media Indonesia *online* yang merupakan kalangan menengah atas dan terpelajar dan tinggal di tempat yang jauh dari hutan dan lingkungan masyarakat adat di sekitar hutan *pilot project* REDD+, tidak akan peduli karena tidak merasa dekat dengan subjek program penurunan dampak perubahan iklim yang sedang dibahas di Media Indonesia *online*, kecuali pengakses yang benar-benar secara idealis peduli dengan isu tersebut, atau pengakses yang memiliki kedekatan psikis dengan masyarakat adat di lokasi *pilot project* REDD+.

Dengan demikian sulit merangsang pemikiran kritis masyarakat dalam melihat keterlibatan Indonesia secara ekonomis dan politis dengan program REDD+ PBB, tanpa jeli mengorek esensi negatif yang terkandung dalam program ini. Dengan demikian, Media Indonesia secara tidak langsung mengeset pembingkai berita bahwa program REDD+ PBB adalah langkah terbaik yang bisa Indonesia lakukan dalam peran sertanya mengatasi perubahan iklim di bumi, dan tidak memberikan penjabaran penetralisir argumen, agar pembaca berita dapat menarik kesimpulan sendiri atas apa yang mereka baca. Melalui berita-berita REDD+ di Media Indonesia online, mungkin hanya sebagian pembaca saja yang cukup kritis mempelajari seberapa besar arti penting isu perubahan iklim dan kontradiksi REDD+ sebagai salah satu solusi yang dirumuskan PBB, dilihat dari cara Media Indonesia memberikan penekanan pada perspektif tertentu.

Dalam menggambarkan berita tentang program REDD+, Media Indonesia tentu tak lepas dari hubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. Pengaruh dari latar belakang profesional pekerja media secara individu relevan dengan deskripsi berita tentang perubahan iklim. Di level individual ini, Media Indonesia memperlihatkan bagaimana praktisi media tidak terlalu paham dengan isu perubahan iklim, mungkin juga tidak paham kaidah jurnalistik lingkungan, sehingga aspek-aspek jurnalistik yang penting justru dikesampingkan, dan menulis tentang gambaran umum saja. Hal ini jelas mempengaruhi pemberitaan yang ditampilkan kepada khalayak.

**Universitas Indonesia**

Mekanisme dan proses penentuan berita program REDD+ ditentukan dari ukuran Media Indonesia itu sendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung setiap hari dan menjadi prosedur standar bagi Media Indonesia yang merupakan media nasional dan bukan media spesialisasi lingkungan, sehingga hal ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk.

Terkait dengan itu, dalam mengkonstruksikan berita REDD+, praktisi pers di Media Indonesia tentunya juga dipengaruhi kepentingan pemilik perusahaan, atau pemilik modalnya, dan mengunggah berita ke laman web Media Indonesia dengan mendapatkan persetujuan pihak editorial sehingga berita baru dipublikasikan untuk dibaca oleh khalayak. Mereka tidak akan menulis berita tentang perubahan iklim dan program REDD+ yang perspektifnya berseberangan dengan ideologi perusahaan dan/atau ideologi pemilik modalnya.

Dengan demikian, sebenarnya konstruksi berita REDD+ yang dilihat khalayak dari luar pun tentunya mendeskripsikan ideologi perusahaan dan pemilik modal Media Indonesia. Deskripsi tersebut harusnya cukup untuk menyatakan bahwa Media Indonesia, di bawah kepentingan pemilik modalnya, dominan memberitakan REDD+ dilihat dari perspektif ekonomis dan politis, sebagaimana keberpihakannya dominan menjelaskan skema REDD+ dengan narasumber berasal dari kalangan pejabat pemerintah dan mereka yang berpihak kepada pemerintah, termasuk golongan kapitalis. Secara jelas rumusan program REDD+ di Media Indonesia mbingkai bagaimana langkah-langkah pemerintah serta-merta menyetujui skema REDD+ ini untuk direalisasikan di Indonesia dan bagaimana pemerintah mengelola uang yang masuk dari PBB, juga secara politis menindaklanjuti realisasi program ini dengan pihak-pihak terkait.



Objektivitas Media Indonesia *online* dalam bentuk konstruksi berita tidak selalu menampilkan semua kemungkinan konflik kontradiksi REDD+ dengan masyarakat adat, atau REDD+ dengan golongan kapitalis. Terkait dengan prinsip jurnalisme *online*, praktisi pers Media Indonesia tidak mengumpulkan dan meneliti banyak data dan multi perspektif karena mayoritas menampilkan wawancara atau kutipan dari satu pihak saja yang berseberangan atau yang mendukung REDD+, sehingga realitas dan semua kemungkinan fakta tidak disajikan dengan baik.

Jurnalis lingkungan yang baik harus memperhatikan pengetahuan ilmiah dan tidak mudah didikte pihak luar media yang memiliki agenda tersendiri. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada publik betapa pentingnya lingkungan yang mereka tempati. Hal ini dikarenakan media sangat berpengaruh untuk menyadarkan publik agar mereka segera peduli terhadap lingkungannya, untuk bersama-sama menyelamatkan bumi, dan mencegah “kiamat” yang dipercepat oleh kerusakan-kerusakan lingkungan.

Ketika melakukan analisa terhadap berita REDD+, peneliti melihat gambaran berita *online* Media Indonesia tidak selalu sinkron dengan prinsip jurnalisme lingkungan. Berita-berita tersebut sebagian kecil mengemukakan bahwa perlunya realisasi program REDD+ di Indonesia di waktu yang akan datang dianggap mampu meminimalisasi dampak perubahan iklim karena terkesan efektif menekan laju emisi karbon dunia. Tulisan tersebut cukup mendukung konsep kehidupan berkelanjutan jurnalistik lingkungan, menjelaskan kondisi lingkungan hidup yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang.

Selain itu, sebagian kecil unit penelitian menyinggung konsep biosentris, yaitu kesetaraan spesies, mengakui bahwa setiap spesies memiliki hak terhadap ruang hidup, sehingga perubahan lingkungan hidup (pembangunan) harus memperhatikan dan mempertimbangkan keunikan

**Universitas Indonesia**

setiap spesies dan sistem-sistem di dalamnya. Hal ini dikonstruksikan dalam beberapa berita tentang REDD+, bahwa pemerintah menanggukkan sejumlah izin usaha perusahaan produk kelapa sawit dan memberlakukan moratorium agar perusahaan produk kelapa sawit tidak mengonversi area hutan heterogen yang digunakan untuk lokasi *pilot project* REDD+ untuk perkebunan sawit. Selain itu juga dikonstruksikan dalam berita kontradiktif antara lembaga swadaya masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dengan pejabat provinsi Kalimantan Tengah. Walhi, dalam berita tersebut, mengkritisi kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah yang menolak membangun rel kereta api di Kalimantan Tengah dengan konsekuensi membuka lahan hutan, bahwa berita tersebut tidak etis karena Gubernur dinilai mencari-cari alasan berkedok lingkungan, padahal sebenarnya lahan di Kalimantan Tengah tetap dieksploitasi pertambangan yang didukung oleh Gubernur. Walhi menilai rel kereta api tersebut fungsinya untuk mobilisasi sirkulasi hasil tambang.

Konstruksi berita REDD+ di Media Indonesia *online* lainnya mendeskripsikan prinsip jurnalistik lingkungan lainnya yaitu Pro Keadilan Lingkungan. Definisi prinsip ini antara lain keberpihakan pers pada kaum yang lemah, agar mendapatkan akses setara terhadap lingkungan yang bersih, sehat dan dapat terhindar dari dampak negatif kerusakan lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, *pilot project* REDD+ direalisasikan pemerintah di sejumlah kawasan hutan heterogen, antara lain di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan masyarakat adat yang disebut sebagai motor penggerak dan kelompok di balik suksesnya program REDD+ di Indonesia, di beberapa berita Media Indonesia *online* dikonstruksikan bahwa pemerintah telah sedemikian rupa mengusahakan agar masyarakat adat yang tinggal di kawasan *pilot project* REDD+ tetap terjamin kesejahteraannya, melindungi masyarakat adat agar tidak kehilangan hak atas hutan, sumber kehidupan mereka. Namun berita ini bisa jadi menyesatkan karena skema dasar REDD+ adalah membayar jasa perlindungan hutan agar fungsinya sebagai paru-paru dunia dan penekan

**Universitas Indonesia**

produksi emisi karbon dunia bisa dilaksanakan, secara terselubung masyarakat adat tidak boleh lagi mengutak-atik fungsi hutan *pilot project* di wilayah mereka, sebagaimana sebelumnya mereka mengerjakan banyak hal mengambil hasil hutan untuk menghidupi mereka sehari-hari. Skema ini mengkhawatirkan karena masyarakat adat hidup dari hutan dan mereka posesif terhadap hutan yang mereka anggap sebagai tanah ulayat leluhur yang diwariskan turun temurun dari, oleh, dan bagi masyarakat adat sekitar hutan tersebut. seperti petani dengan sawah ladang mereka, atau nelayan dengan lautan, masyarakat adat di sekitar hutan tersebut tidak bisa dipisahkan dari hutan sekalipun PBB mengkompensasi konsekuensi tersebut dengan uang, itupun dengan catatan tidak dikorupsi oleh pejabat di tingkat pusat maupun daerah.

Latar belakang berita paling dominan dari seluruh berita tentang program REDD+ di Media Indonesia adalah latar belakang ekonomi. Pemberitaan tersebut mayoritas membahas keuntungan yang Indonesia (dan masyarakat adat khususnya) dapatkan apabila mengaplikasikan program ini. Dengan mengutamakan latar belakang ekonomis, maka latar belakang lain yaitu hukum dan politik yang juga penting dalam publikasi berita ini menjadi terkesan tidak terlalu penting. Dengan kata lain, jika dilihat lebih mendalam, mayoritas pemberitaan REDD+ di Media Indonesia *online* cenderung mengutamakan kapitalisme daripada masyarakat adat yang minoritas sebagai kunci sukses terrealisasinya program REDD+ ini. Sementara itu, latar belakang minoritas yang tidak dominan tersebut bisa jadi merupakan esensi dari latar belakang pemberitaan program REDD+ ini yang sesungguhnya.

Isu yang Media Indonesia *online* berusaha tampilkan secara mayoritas adalah kategori mitigasi emisi karbon (pro REDD+) mendominasi pemberitaan sebagai citra isu utama. Mitigasi emisi karbon yang mendominasi pemberitaan, ibaratnya membantu PBB mengaplikasikan program tersebut di Indonesia dengan tidak memikirkan kebutuhan

**Universitas Indonesia**

Indonesia yang lebih krusial, yaitu adaptasi terhadap bencana yang terjadi akibat perubahan iklim. Konsep *priming* agenda media menjelaskan secara deskriptif berita-berita tersebut dengan pertimbangan ideologi media yang bersangkutan, dan membingkai mayoritas perspektif dari sudut pandang pemerintah Indonesia, baik pejabat pusat maupun di daerah.

Berita-berita juga menunjukkan asal narasumber yang beragam selain pemerintah, antara lain pihak lembaga swadaya masyarakat, baik yang mendukung maupun yang kontra terhadap kebijakan pemerintah, juga tentunya pihak internasional, mewakili PBB yang melangsungkan program REDD+nya di Indonesia. Secara dominan, narasumber yang dijadikan acuan pemberitaan program REDD+ di Media Indonesia *online* memang dominan dari kelompok narasumber pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Media Indonesia turut serta mendikte masyarakat pembacanya agar berpikir searah dengan apa yang pemerintah harapkan, yaitu berpikir secara ekonomis atas keuntungan yang Indonesia dapatkan apabila mengikuti program REDD+ buatan PBB.

Dari seluruh sampel penelitian didapatkan penjelasan bahwa jangkauan berita nasional paling banyak dibanding kedua kategori jangkauan lainnya, yaitu internasional dan lokal. Berita-berita tersebut menunjukkan aplikasi program REDD+ di tangan pemerintah Indonesia dan pembaca Media Indonesia *online* seperti diajak mengamati pengelolaan program REDD+, sementara yang peneliti harapkan adalah jumlah berita aplikasi program REDD+ ini lebih banyak di pemberitaan tataran lokal, karena bagaimanapun juga, masyarakat adat yang tinggal di sekitar lokasi *pilot project* program REDD+ ini lebih diutamakan.

Media Indonesia menggunakan data yang didapatkan, mayoritas dari liputan atau wawancara pada saat berlangsungnya event program REDD+. Seperti yang penulis bahas di awal bab, bahwa kemungkinan wartawan juga tidak paham dengan isu perubahan iklim dan esensi program REDD+ yang

dirumuskan oleh PBB. Sehingga dengan memberitakan apapun yang dibahas pada event yang diselenggarakan pihak pro REDD+, wartawan melupakan keberimbangan berita lengkap dengan sanggahan atau kritik secara proporsional antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang mana prinsip ini harusnya dipegang teguh oleh wartawan media manapun. Peneliti tidak menemukan keberimbangan yang diharapkan akan ditampilkan sebagai citra isu dari seluruh sampel berita, yaitu 'pro dan kontra REDD+' secara proporsional dalam satu publikasi berita.

Kelebihan jurnalisme *online* sebetulnya akan sangat supportif bagi *priming* dan *framing* atas permasalahan terkait isu perubahan iklim dan REDD+. Dengan kelebihan jurnalisme *online*, seharusnya berita-berita mengenai REDD+ bisa selalu diamati karena sifat berita yang sifatnya *real time*, atau bisa dipublikasikan pada saat kejadian sedang berlangsung. Sifat-sifat jurnalisme *online* lainnya yang bisa cukup supportif menyuarakan isu perubahan iklim lainnya, antara lain kepraktisan dan kecepatan mengakses, pembaca juga dapat mengaktualisasi pengetahuannya tentang isu perubahan iklim dan REDD+ kapanpun setiap kali berita baru tentang REDD+ diunggah ke *website*. Hanya saja, sehubungan dengan konsep *priming* dan *framing* media yang bersangkutan, isu ini tenggelam dan tidak dianggap penting oleh sebagian besar khalayak pengakses informasi di bidang ini, kecuali mereka yang berkepentingan, misalnya mahasiswa yang sedang menulis tugas ilmiah akademik dan mengambil contoh permasalahan berdasarkan isu tersebut, atau aktivis dari lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup yang mencari referensi, atau pihak-pihak lain yang menjadikan isu perubahan iklim dan program REDD+nya referensi bagi kepentingannya. Untuk kelompok yang peneliti sebutkan terakhir ini, barulah produksi dan konstruksi berita tentang REDD+ dianggap penting sehingga mereka merasa perlu memantau pemberitaan REDD+ di media *online*.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pengamatan, pengujian, analisis serta interpretasi pada data, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Media Indonesia *online*, program REDD+ sedikit dan sulit mempersuasi pembacanya untuk berperan serta mencermati gejala perubahan iklim, serta untuk secara kritis mengarahkan esensi pesan yang terkandung dalam kelebihan dan kekurangan program REDD+ kepada khalayak pembaca agar pembaca memahami bagaimana pemerintah mengelola negara Indonesia.
2. Media Indonesia menyajikan berita REDD+ tidak berimbang (*cover both sides*), dan dari satu sisi pemberitaan, atau satu sisi narasumber, atau satu perspektif saja sehingga menunjukkan prinsip jurnalistik yang tidak disarankan untuk ditiru atau dijadikan rujukan utama.
3. Media Indonesia cenderung dominan memberitakan pengelolaan mitigasi emisi karbon program REDD+ dengan latar belakang ekonomi dan memberikan citra positif bagi program REDD+ itu sendiri. Hal itu secara implisit menunjukkan Media Indonesia *online* cenderung mengutamakan ideologi pemilik modal dan mendukung kapitalisme pemerintah dalam mengelola keuntungan yang didapat dari realisasi program REDD+.
4. Media Indonesia *online* tidak menonjolkan berita yang justru harus dipopulerkan kepada pembaca Media Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu prinsip adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

## 6.2 Implikasi Penelitian

### 6.2.1 Implikasi Akademis

Ideologi jurnalisme berbasis ekonomi dan politik secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi proses produksi berita di Media Indonesia, baik *online* maupun konvensional. Penelitian ini memberikan gambaran analisa bahwa ideologi Media Indonesia mengutamakan aspek ekonomi dan politik dalam memproduksi berita, dan dibingkai dalam deskripsi yang cenderung menyoroti kinerja pemerintah dalam mengelola REDD+ atau berpihak kepada perspektif pemerintah. Ideologi tersebut dipahami karena salah satu pejabat organisasi Media Indonesia yang cukup penting adalah Surya Paloh yang kita kenal sebagai pengusaha sekaligus politisi. Penelitian yang menganalisa isi berita program REDD+ di Media Indonesia *online* ini sesuai dengan teori *agenda setting* yang mengaplikasikan prinsip agenda media dan konsep produksi berita.

## 6.3 Rekomendasi

### 6.3.1 Rekomendasi Akademis

Peneliti merekomendasikan agar isu perubahan iklim ini tetap dikembangkan, terutama dengan analisa teori-teori kritis komunikasi massa yang mampu memberikan pemaparan lebih mendalam dan lebih kompleks tentang urgensi dan krusialnya isu perubahan iklim di tingkat global maupun nasional. Peneliti juga merekomendasikan agar peneliti lain mengetengahkan konsep jurnalisme *online* yang merupakan ilmu baru dalam konsep *new media*, mengingat seiring perkembangan jaman, informasi tidak akan terbatas pada apa yang tertera dalam lembaran kertas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Albarran, A. B. (1996), *Media Economics: Understanding Markets, Industries, and Concept*, Iowa: Iowa State University Press
- Angelsen, A. (Ed.), (2008), *Moving Ahead with REDD: Issues, Options, and Implications*, Bogor: CIFOR
- (2009), *Realising REDD+: National Strategy and Policy Options*, Bogor: CIFOR
- Ardianto, E., Komala, L, & Karlinah, S. (2009), *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (edisi revisi), Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Attfield, R. (2010), *Etika Lingkungan Global* (Saut Pasaribu, Penerjemah.), Bantul: Kreasi Wacana
- Berger, A. A. (2005), *Media Analysis Techniques* (3rd ed.), California: Sage Publications
- Baran, S. J., & Davis, D. K. (2003), *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future* (3rd ed.), Belmont: Wadsworth/Thomson Learning
- Blake, R. H., & Haroldsen, E. O. (2009), *Taksonomi Konsep Komunikasi* (2nd ed.), (Hasan Bahanan, Penerjemah.), Surabaya: Papyrus
- Cotula, L., & Mayers, J. (2010), *Tenurial Dalam Perdebatan REDD: Pokok Persoalan atau Hanya Pelengkap?* (Fathia, Penerjemah.), Jakarta: HuMa
- Cronin, T., & Santoso, L. (2010), *REDD+ Politics in the Media: A Case Study from Indonesia*, Bogor: CIFOR
- Croteau, D., & Hoynes, W. (1997), *Media/Society: Industries, Images, and Audiences*, Thousand Oaks: Pine Forge Press
- CSO Network on Forestry Governance and Climate Change (2008), *Perubahan Iklim, Hutan dan REDD: Peluang atau Tantangan?*, Bogor: The Partnership for Governance Reform
- Eriyanto (2011), *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group



- Guariguata, M. R., Locatelli, B., & Haupt, F. (2012), *Adapting Tropical Production Forest to Global Climate Change: Risk Perceptions and Actions*, International Forestry Review Vol.14(1) 2012
- Hamid, F., & Budianto, H. (Ed.), (2011), *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hennessy, B. (1990), *Pendapat Umum* (4th ed.), (Amiruddin Nasution, Penerjemah.), Jakarta: Erlangga
- Idrus, M. (2009), *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (2nd ed.), Jakarta: Erlangga
- Jagger, P., Sills, E. O., Lawlor, K., et al. (2010), *A Guide To Learning About Livelihood Impacts of REDD+ Projects*, Bogor: CIFOR
- Locatelli, B., Kanninen, M., Brockhaus, M., et al. (2009), *Menghadapi Masa Depan Yang Tak Pasti*, Bogor: CIFOR
- Nkem, J., Idinoba, M., Santoso, H., et al. (2008), *Prioritisation for Adaptation in Tropical Forest Ecosystems*, Bogor: CIFOR
- McQuail, D. (1987), *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (2nd ed.), (Agus Dharma & Aminuddin Ram, Penerjemah.), Jakarta: Erlangga
- Murdiyarso, D., Dewi, S., Lawrence, D., et al. (2011), *Moratorium Hutan Indonesia: Batu Loncatan untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan?* (Daniel Murdiyarso, Sonya Dewi, Deborah Lawrence, Frances Seymour, Penerjemah.), Bogor: CIFOR
- Murdiyarso, D., & Kauffman, J. B., (2011), *Addressing Climate Change Adaptation and Mitigation in Tropical Wetland Ecosystems of Indonesia*, Info Brief No.41, September 2011, CIFOR
- Muhajir, M. (Ed.), (2010), *REDD di Indonesia.: Ke Mana Akan Melangkah?*, Jakarta: HuMa
- Parker, C., Mitchell, A., Trivedi, M., et al. (2008), *The Little REDD+ Book* (3rd ed.), Oxford: Global Canopy Programme
- Peliputan tentang REDD+: Paket untuk Media* (2009), Climate Change Media Partnership
- Rivers, W. L., Jensen, J. W., & Peterson, T. (2003), *Media dan Masyarakat Modern* (2nd ed.), (Haris Munandar & Dudy Priatna, Penerjemah.), Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Salim, A. (2006), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (2nd ed.), Yogyakarta: Tiara Wacana
- Silalahi, U. (2009), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama
- Shoemaker, P.J., & Reese, S.D. (1996), *Mediating The Message: Theories of Influence on Mass Media Content* (2nd ed.), Austin: Longman
- Steni, B., Minangsari, M., Surya, T., et al. (2010), *REDD, Bisakah Menjawab Deforestasi dan Keadilan Iklim?*, Jakarta: Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim
- Susilo, R. K. D. (2009), *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tamburaka, A. (2012), *Agenda Setting Media Massa*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tumiwa, F. (2010), *Strategi Pembangunan Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim: Status dan Kebijakan Saat Ini*, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Skripsi / Jurnal:

- Hendratno, J. M. (2005), *Penggunaan Media di Kalangan Remaja*, Jurnal Thesis Vol. IV/No.3, September-Desember 2005, 159-173, Depok: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Manulong, D. P. (2012), *Skripsi: Representasi agenda Media dalam Surat kabar Nasional, Sebuah Analisis Isi Isu Lingkungan dalam Kompas dan Koran Tempo*, Depok: Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Sarwono, B. K. (2010), *Pemaknaan Isu Pemanasan Global dan Lingkungan di Media oleh Kaum Perempuan Urban*, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 8/No.2, Mei-Agustus 2010, 178-190, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Pencarian Digital:

Lukmantoro, T. (2009), *Jurnalisme Lingkungan*, 19 Oktober 2011,  
<http://greenpress.dagdigdug.com/2009/01/05/jurnalisme-lingkungan/>

*Jurnalisme Online* (2012), <http://nienoot.blogspot.com/2012/06/percobaan.html>

*Kondisi Jurnalisme Maya* (2007),

<http://jurnalistikuinsgd.wordpress.com/2007/12/01/mengenal-jurnalisme-online/>

Ika, A. (2012), *Konsumsi Media di Kelas Menengah Bergeser ke Platform Online*, Indonesia Finance Today, dipublikasikan Senin, 14 Mei 2012, diunduh tanggal 14 Mei 2012 pukul 19:56:59,

<http://www.indonesiainancetoday.com/read/19023/Konsumsi-Media-di-Kelas-Menengah-Bergeser-ke-Platform-Online>

*Sejarah Singkat Media Indonesia*, diunduh pada tanggal 14 Mei 2012 pukul 19:35:12

[http://www.mediaindonesia.com/read/2009/02/23/38398/11/11/Sejarah\\_Singkat](http://www.mediaindonesia.com/read/2009/02/23/38398/11/11/Sejarah_Singkat)

*Profil Pembaca Media Indonesia*, diunduh pada tanggal 14 Mei 2012 pukul 19:35:12

[http://www.mediaindonesia.com/read/2009/02/23/23987/11/11/Profile\\_Pembaca](http://www.mediaindonesia.com/read/2009/02/23/23987/11/11/Profile_Pembaca)

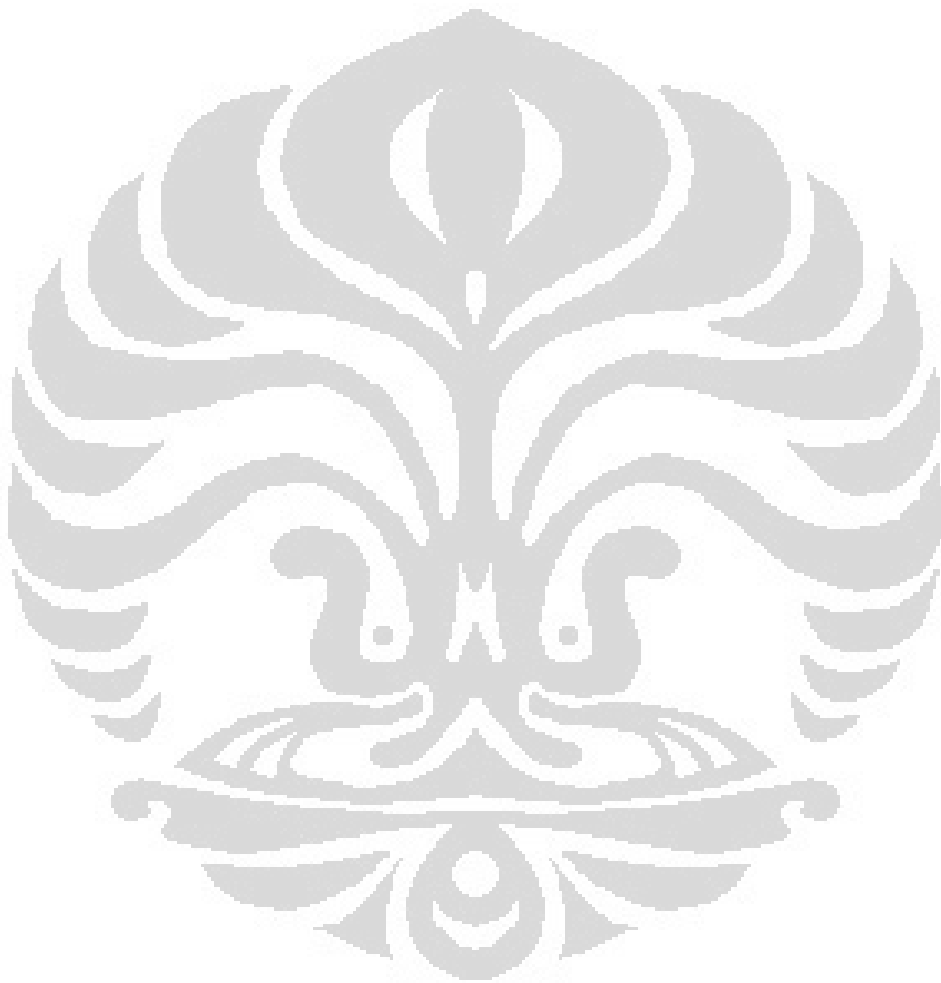
*Profile Perusahaan Media Indonesia*, diunduh pada tanggal 14 Mei 2012 pukul 19:35:12

[http://www.mediaindonesia.com/read/2009/02/23/23986/11/11/Profile\\_Perusahaan](http://www.mediaindonesia.com/read/2009/02/23/23986/11/11/Profile_Perusahaan)

Hidayat, Y. (2009), *Jurnalisme Online*,

<http://artikeldanopini.blogspot.com/2009/05/jurnalisme-online.html>

**LAMPIRAN 1**  
**SAMPEL BERITA**



Satuan tugas (satgas) persiapan pembentukan lembaga penurunan emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) tengah melakukan studi banding ke Brasil. Studi banding tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto. Studi banding itu bertujuan mempelajari aspek-aspek kelembagaan pengurangan emisi mulai dari program sampai organisasi keuangannya. "Sekarang sedang studi banding ke Brasil," ujar Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/9).

"Saya tidak bisa ikut ke Brasil karena harus menyelesaikan tugas di dalam negeri. Yang mewakili saya dalam studi banding di antaranya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan," kata dia. Studi banding itu rencananya akan selesai Jumat (1/10) mendatang. Diperkirakan Sabtu (2/10) sudah bertolak kembali ke Jakarta. Penunjukan Kuntoro sebagai ketua satgas melalui Keputusan Presiden No 19 Tahun 2010 tentang Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ pada 20 September lalu di Jakarta. Satgas itu bertanggung jawab untuk membentuk lembaga dan strategi REDD+ secara nasional, juga merancang instrumen pendanaan untuk seluruh kegiatan REDD+ di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia dan Norwegia telah menandatangani *letter of intent*/LOI pada Mei lalu untuk menjalin kemitraan menanggulangi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia dengan komitmen senilai US\$1 miliar.

Kemitraan itu tercatat menjadi model kerja sama internasional di mana negara donor akan berkontribusi berdasarkan ketercapaian hasil atau bukan dalam bentuk hibah atau pinjaman. Selama di Brasil, lanjut Zulkifli, satgas akan mempelajari aspek-aspek yang terbaik dan sesuai dengan kondisi Indonesia. Ini penting mengingat tidak semua yang dijalankan di Brasil berjalan dengan baik. Hasil studi banding itu akan menjadi acuan Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan proyek-proyek percontohan yang ditetapkan di lima provinsi, di antaranya Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Riau.

**HUTAN** bukan saja merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang memberikan peran penting bagi kehidupan manusia. Ia juga mengandung manfaat serbaguna, penentu sistem penyangga kehidupan, dan memiliki potensi luar biasa bagi kesejahteraan rakyat. Dengan profit multifaset itu, seyogianya pemanfaatan hutan dilakukan secara bijaksana, berorientasi pada kelestarian, dan tetap memperhatikan fungsi pokoknya.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan, sejak awal pemerintah Indonesia menetapkan dan mengarahkan pengelolaan hutan berdasarkan fungsi-fungsi pokoknya. Mulai hutan konservasi, hutan lindung, hingga hutan produksi. Konsep itu berbeda dengan yang berlaku di sebagian besar negara lain, yang pada umumnya menetapkan fungsi ganda pada hamparan hutan yang sama, misalnya hutan produksi yang sekaligus berfungsi sebagai hutan lindung dan hutan konservasi.

Dengan demikian, implementasi sistem pengelolaan hutan di Indonesia seyogianya juga berbeda dengan sistem negara lain, yang akhir-akhir ini sering menyudutkan pembangunan hutan tanaman hanya karena didahului kegiatan land clearing di kawasan hutan produksi yang tidak produktif. Kalau kita kembali kepada amanat UU No 41/1999, sepanjang pemanfaatan hutan produksi sesuai dengan fungsi pokoknya, yaitu memproduksi hasil hutan, aktivitas land clearing di kawasan hutan produksi tidaklah perlu ada perdebatan kegiatan tersebut merusak lingkungan, merusak hutan, merusak ekosistem, dan sebagainya.

Kecenderungan berkompetisi antarnegara di dunia dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan tentulah merupakan hal lumrah dan alami. Untuk memenangkan kompetisi itu, Indonesia harus dapat memanfaatkan kawasan hutannya secara optimal dan berkesinambungan, sesuai dengan fungsi-fungsi pokoknya. Dalam hal pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk kesejahteraan, jawabannya hanya satu, yakni pembangunan hutan tanaman. Pertanyaannya: mengapa hutan tanaman, atau Hutan Tanaman Industri? Mencermati data statistik kehutanan selama beberapa tahun terakhir, tampaklah bahwa produksi lestari kayu dari hutan alam, atau HPH, cenderung menurun. Dari sekitar 16 juta m<sup>3</sup> pada 1997-1998 menjadi sekitar 5 juta m<sup>3</sup> pada 2009. Sementara itu, produksi kayu dari hutan tanaman terus meningkat, yaitu dari sekitar 1 juta m<sup>3</sup> pada 1997-1998 menjadi sekitar 21 juta m<sup>3</sup> pada 2009. Produksi itu akan terus meningkat bila penambahan tanaman yang terjadi pada 2006-an sampai saat ini akan mencapai daur produksinya.

Peningkatan penanaman dan produksi kayu dari hutan tanaman dengan sendirinya akan memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan industri, pertumbuhan ekspor, pendapatan pajak, dan lain sebagainya. Melalui keunggulan komparatif sebagai negara yang terletak di kawasan tropis, Indonesia seharusnya dapat memenangi kompetisi global melalui pengembangan pembangunan hutan tanaman. Karena itu, tidak berlebihan jika disimpulkan, hutan tanaman merupakan jaminan masa depan Indonesia.

Namun, hendaklah disadari, memenangi persaingan global itu tak semudah membalik telapak tangan. Banyak masalah yang harus diselesaikan. Satu di antaranya adalah tren global saat ini, yang diramaikan hiruk pikuk perdagangan karbon, baik yang dikemas melalui proyek-proyek AR/CDM maupun komitmen-komitmen REDD dan REDD+.

Berdasarkan fakta, mekanisme perdagangan karbon dalam kemasan AR/CDM di Indonesia belum terbukti berhasil menyejahterakan rakyat. Demikian juga dengan REDD dan REDD+, yang sampai saat ini belum terlihat nyata komitmen dari negara-negara maju yang masuk daftar Annex-I, yang berkewajiban menurunkan emisi di negara masing-masing. Akibatnya, mekanisme pasar karbon, yang seharusnya juga memperhatikan kepentingan pembangunan negara-negara non-Annex-I belum majud senyatanya.

Siapa yang harus 'membeli', dan siapa yang dapat 'menjual' belum jelas dalam perdagangan karbon. Komitmen nyata yang mengikat di antara negara-negara maju belum disepakati dan terformulasikan secara nyata, walaupun pertemuan COP telah berlangsung tidak kurang dari lima belas kali. Dalam hal ini, untuk Indonesia akan lebih realistis jika mekanisme perdagangan karbon lebih dikedepankan secara voluntary. Apalagi Indonesia telah memiliki peraturan pendukungnya, yakni Peraturan Menteri Kehutanan NoP.36/Menhut/II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Mekanisme pelaksanaan pasar karbon voluntary itu tidak harus mengganggu atau menghentikan kegiatan HTI/HPH. Sebagai contoh, bila pemegang izin melaksanakan kaidah-kaidah SFM dalam pelaksanaan operasionalnya, ia dengan sendirinya akan menurunkan tingkat emisi dan dapat diajukan pelaksanaan voluntary-nya melalui peraturan menteri kehutanan itu. Secara logis dapat dikatakan, upaya penurunan emisi suatu negara akan memengaruhi atau berkonsekuensi menurunkan pertumbuhannya ekonominya. Akan sulit ditemukan—bahkan mungkin

tidak ada- suatu negara, apalagi negara yang sudah maju secara sukarela menyatakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi mereka. Yang lebih mungkin terjadi adalah demi menghormati tatanan pergaulan internasional, atau untuk sekadar memperoleh green image, negara-negara maju akan mengompensasi penurunan emisi negara-negara berkembang dengan menyisihkan sebagian kecil biaya sosialnya. Akibatnya, 'teori mekanisme penurunan emisi global' dalam praktiknya tidak akan sesuai dengan asas kesetaraan. Lagi-lagi negara maju akan lebih diuntungkan sehingga bak pelesetan peribahasa yang datang tidak membeli dan yang membeli tidak datang.

Demi menyejahterakan rakyatnya, bagaimana Indonesia seharusnya menyikapi hiruk pikuk perdagangan karbon tanpa harus terlalu mengorbankan pembangunan ekonomi? Pertama, Indonesia harus tetap memosisikan diri sebagai bukan negara Annex-I, yang wajib menurunkan emisi pada 2012 dan setelah itu. Kedua, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat mutlak tetap diperlukan karena jumlah penduduk kita yang demikian besar, dan sebagian besar di antaranya masih relatif miskin. Ketiga, kebijakan-kebijakan pemerintah harus konsisten, tidak berubah-ubah, untuk menciptakan kepastian usaha dan memelihara iklim berinvestasi. Dan terakhir, melalui kebijakan-kebijakan, pemerintah harus selalu memfasilitasi penciptaan iklim kondusif bagi usaha HTI sehingga HTI dapat berkinerja baik, lebih prospektif jika dibandingkan dengan jenis usaha lain. Indonesia harus konsisten dalam membangun hutan tanaman, baik HTI maupun HTR, dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang patut diduga memiliki agenda terselubung terkait dengan persaingan ekonomi global.



Perundingan para pihak untuk perubahan iklim (COP-16) yang berlangsung di Cancun, Meksiko, makin memanas. Banyak delegasi yang mulai bersuara sangat keras untuk melindungi kepentingan negara mereka.

Duta Besar Indonesia untuk Jerman Eddy Pratomo, yang juga penasihat senior delegasi Indonesia dalam COP-16 di Cancun, menjelaskan beberapa negara maju yang menjadi kunci bagi keberhasilan negosiasi perubahan iklim justru mulai menghambat.

Pratomo, dalam siaran persnya yang diterima *Media Indonesia*, Sabtu (4/12) kemarin, menjelaskan Amerika Serikat dalam perundingan yang dimulai sejak 29 November itu telah menyatakan penolakan secara terang-terangan terhadap pencantuman terminologi Protokol Kyoto dalam bentuk apa pun.

Posisi serupa diambil Jepang ketika menolak konsep periode kedua komitmen Protokol Kyoto, atau lebih dikenal dengan istilah *second commitment period*. Ditengarai, situasi semacam ini bisa menimbulkan polarisasi yang lebih kuat antara kubu-kubu yang memiliki pendapat berbeda, sehingga menghambat kemajuan perundingan.

Ketua Tim Negosiasi Delegasi Indonesia Tazwin Hanif membenarkan bahwa terjadi perundingan sangat sengit antara negara-negara maju. Bahkan, Jepang dan Rusia sudah terang-terangan tidak mau melanjutkan komitmen penurunan CO<sub>2</sub> sesuai Protokol Kyoto, yang akan berakhir komitmennya pada 2012. "Sebenarnya Jepang mundur dari Protokol Kyoto karena putus asa dengan Amerika yang tidak kunjung bergabung dalam Protokol Kyoto," kata Tazwin. Sementara posisi Indonesia tetap menginginkan kelanjutan Protokol Kyoto.

Saat ini pembahasan komitmen kedua dari negara Annex-1 dalam Protokol Kyoto masih di bawah jalur Protokol Kyoto. Indonesia telah mengambil sikap tetap berjuang pada dua jalur negosiasi, yaitu pada negosiasi Protokol Kyoto dan negosiasi di bawah kerangka aksi jangka panjang.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi situasi cukup alot selama perundingan. Dubes Pratomo mengungkapkan semua topik negosiasi, seperti mitigasi, adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, dan REDD+. "Di atas semuanya, yang paling krusial adalah adanya semangat kompromis di antara para pihak, untuk dapat mengambil jalan terbaik dalam negosiasi yang tengah berlangsung."

Diakuinya, hampir semua delegasi kini sedang membangun rasa saling percaya. "Ini berbeda dengan COP-15 di Kopenhagen, Denmark, yang punya ekspektasi tinggi. Di Cancun, mereka lebih memilih membangun rasa saling percaya. Hal ini sangat diperlukan untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi perundingan selanjutnya di Durban, Afrika Selatan, tahun depan," ujarnya.

Indonesia juga mengambil peran dengan menyetujui peran MRV (*measurable, reportable, dan verifiable*) sebagai suatu mekanisme untuk diaplikasikan dalam reduksi emisi para pihak.

Sampai sekarang, negosiasi MRV telah mencapai perubahan mendasar. Dan banyak negara maju dan berkembang telah menyetujui peran vital MRV ini untuk diadopsi. Negosiasi lanjutan masih akan terus dilakukan untuk menyepakati soal spesifikasi mekanisme MRV untuk bisa masuk dalam tahap penerapan.

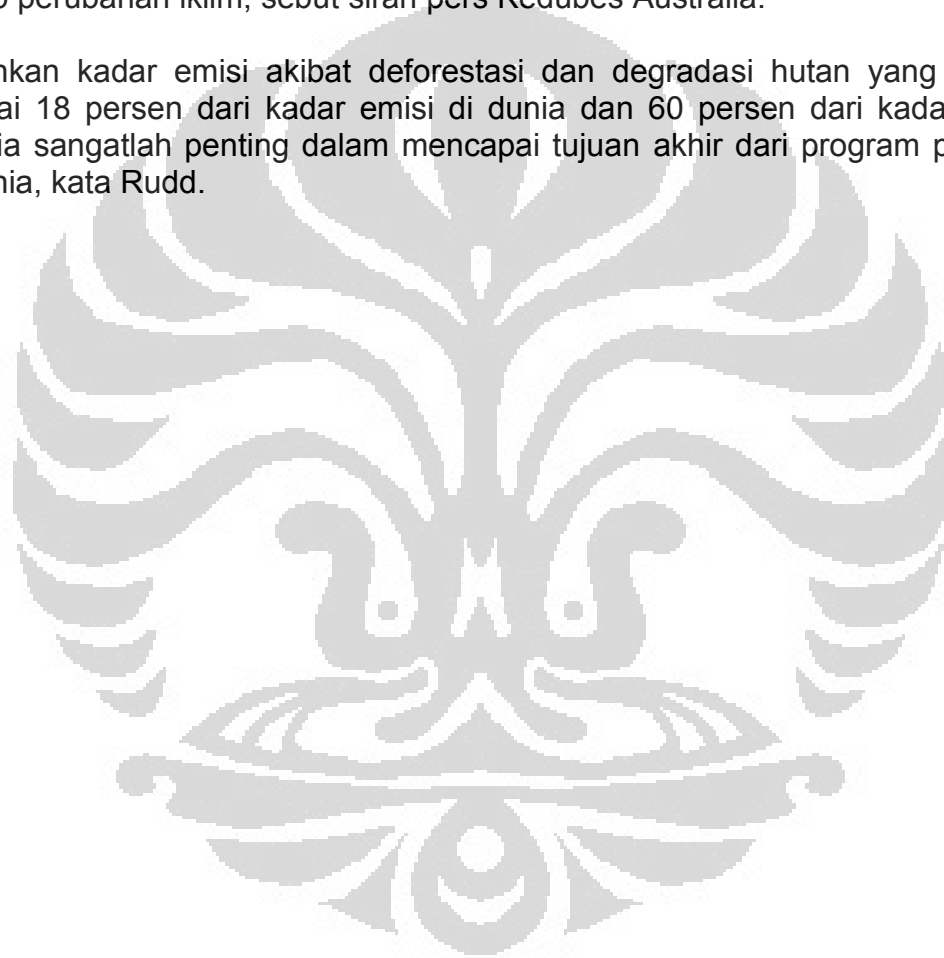


Australia mengumumkan akan mengalokasikan dana sebesar 45 juta dolar Australia untuk Indonesia sebagai bagian dari pendanaan negara itu terkait perubahan iklim sebesar 599 juta dolar.

Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd dalam siaran pers di Bali, Kamis (9/12), mengatakan Australia yang merupakan pendukung kuat upaya Indonesia mengatasi perubahan iklim menyambut kepemimpinan Indonesia yang kuat dalam perubahan iklim.

Pihaknya juga menyambut baik kesempatan ini untuk membangun kerja sama yang telah lama terjalin dengan Indonesia dalam mengurangi kadar emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan penggundulan hutan (REDD+) dan penyesuaian terhadap perubahan iklim, sebut siaran pers Kedubes Australia.

Menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan yang besarnya mencapai 18 persen dari kadar emisi di dunia dan 60 persen dari kadar emisi di Indonesia sangatlah penting dalam mencapai tujuan akhir dari program perubahan iklim dunia, kata Rudd.



Terkait kepercayaan Presiden RI kepada Provinsi Kalteng sebagai *pilot project* pengurangan emisi terhadap deforestasi dan degradasi hutan dan gambut (*reduce emissions from deforestation and degradation*, REDD+), untuk persiapan, Pemerintah Provinsi Kalteng akan melakukan studi banding ke sejumlah negara seperti Brasilia, Brasil, dan Oslo, Norwegia. "Nantinya tim Kalteng akan berkunjung ke Brasilia dan Oslo untuk menimba ilmu masalah REDD. Jadi, ini adalah kesempatan emas bagi Kalimantan Tengah untuk bisa belajar banyak dari Brasil dan Oslo, dalam melaksanakan REDD yang baik," ujar Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Kamis (3/2).

Menyinggung masalah keterlibatan masyarakat dalam program ini, masyarakat, terutama masyarakat adat, menurut Gubernur, di Brasil memiliki kelebihan, yaitu adanya konstitusi sehingga yang mempunyai hak utama adalah masyarakat, sedangkan di Indonesia UUD 1945. Dengan konstitusi itu, masyarakat di Brasil tetap mempunyai hak atas tanahnya dan bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan tidak menghilangkan hak rakyat.

"Kalau di daerah kita, seketika hak guna usaha (HGU) telah diberikan, hilang hak kita. Berarti selama 30 tahun kita tidak boleh apa-apa. Ini yang berbeda antara konstitusi di Brasil dengan di negara kita. Di Brasil, masyarakat lokal itu betul-betul dilindungi oleh konstitusi," ungkap Gubernur. Sekarang ini, kata Teras, untungnya di Kalteng sudah terbantu dengan adanya Perda tentang Lembaga Adat atau Kedamaian. Ini yang nanti akan terus dicari dan dipelajari bagaimana caranya agar jangan sampai masyarakat lokal kehilangan haknya, dan jangan sampai kehilangan tanahnya. "Boleh tanahnya untuk perkebunan dan lainnya, tetapi mereka tetap mempunyai hak di situ dan tetap terlindungi," ucapnya.

Hutan alam seluas 7,5 juta hektare terancam mengalami deforestasi karena draf Instruksi Presiden (Inpres) tentang moratorium konversi hutan alam dan lahan gambut tetap membolehkan ratusan perusahaan perkebunan melanjutkan proses perizinannya. "Greenomics Indonesia menilai, kedua draf Inpres tersebut tetap akan melanjutkan praktik deforestasi terhadap areal 7,5 juta hektare hutan alam," kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi melalui siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (9/2).

Hampir 300 perusahaan perkebunan sawit dan puluhan perusahaan hutan tanaman industri masih diperbolehkan melanjutkan proses perizinannya untuk mendapatkan izin definitif. Greenomics Indonesia mengungkapkan bahwa draf Inpres tentang moratorium konversi hutan alam dan lahan gambut, baik versi yang diajukan oleh Satgas REDD+ yang diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto maupun yang diajukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, sama-sama tidak dapat menolok konversi hutan alam seluas lebih dari 7,5 juta hektare, masing-masing 4,5 juta hektare untuk perkebunan sawit dan tiga juta hektare untuk hutan tanaman industri.

"Jika hutan alam 7,5 juta hektare tersebut tetap diloloskan dari aturan moratorium konversi hutan alam dan lahan gambut, Greenomics Indonesia menilai, Indonesia akan kehilangan esensi moratoriumnya," tambahnya. Dikatakan Elfian, Greenomics Indonesia tidak sependapat dengan draf Inpres moratorium yang diajukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, karena tidak memasukkan hutan alam sekunder untuk dimoratorium sehingga masih terbuka untuk konversi bagi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Greenomics Indonesia juga sangat menyesalkan draf Inpres moratorium versi Satgas REDD+ yang dibentuk Presiden Yudhoyono, yang ternyata juga membolehkan hampir 300 perusahaan sawit dan puluhan perusahaan hutan tanaman industri tetap terus jalan untuk mendapatkan izin definitif, yang berdampak pada konversi hutan alam seluas 7,5 juta hektare.

"Memang draf Inpres moratorium versi satgas REDD+ mencakup moratorium terhadap hutan primer, sekunder, dan lahan gambut. Namun, draf Inpres versi Satgas REDD+ tersebut tetap tak bisa mencegah terbitnya hampir 300 izin baru untuk perkebunan sawit dan puluhan izin hutan tanaman industri. Perlu dicatat, 7,5 juta hektare itu setara lebih dari 110 kali lipat luas Singapura," ujar Elfian. Greenomics Indonesia menilai, jika hutan alam seluas 7,5 juta hektare untuk ratusan perusahaan perkebunan sawit dan puluhan perusahaan hutan tanaman industri tersebut tetap dikeluarkan izin definitifnya yang berdampak pada konversi hutan alam, maka kredibilitas program moratorium konversi hutan alam dan lahan gambut Pemerintah Indonesia akan diragukan oleh dunia internasional.

Greenpeace temukan perbedaan dalam draf moratorium Kementerian Kehutanan dengan satuan tugas REDD plus (Satgas REDD+). Obyek moratorium versi Menhut merupakan hutan lindung yang memang sudah dilindungi. Sementara, Satgas memasukkan hutan gambut dan sekunder dalam obyek moratorium.

Hal ini diungkapkan Greenpeace dalam jumpa persnya di Jakarta, Rabu (16/2). Menurut Greenpeace, hasil olahan data dan peta menunjukkan bahwa draf moratorium versi Kementerian Kehutanan pada dasarnya hanya melindungi hutan primer dan lahan gambut tersisa. Jika data Kementerian Kehutanan (2006) yang menjadi rujukan, sebenarnya yang menjadi obyek moratorium hanyalah kawasan konservasi dan kawasan lindung yang selama ini sudah dilindungi oleh peraturan perundangan ada dan berlaku saat ini.

Namun, draf moratorium versi satgas REDD plus menunjukkan cakupan moratorium yang sedikit lebih luas dibanding draf versi Kementerian Kehutanan. Obyeknya (versi REDD+) mencakup hutan gambut dan hutan sekunder. Ketiadaan definisi dan ukuran yang jelas dalam draf moratorium berpotensi untuk terjadinya kesimpangsiuran dan kekacauan dalam pelaksanaannya nanti. "Komitmen dan keseriusan Presiden SBY untuk menurunkan emisi sebesar 26%-41% yang utamanya bersumber dari deforestasi sedang diuji. Jika Presiden gagal mewujudkan moratorium yang bisa melindungi hutan dan lahan yang bernilai konservasi tinggi, mempunyai nilai simpanan karbon tinggi, mempunyai nilai sosial dan kultural, artinya Presiden tidak serius dengan komitmen penurunan emisi dari deforestasi," ujar Yuyun Indradi, Penasihat Politik Greenpeace Asia Tenggara.

"Ini artinya presiden tidak berhasil menjamin hak dasar rakyat Indonesia untuk bisa menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kehancuran hutan dan tingginya emisi yang diakibatkannya serta dampak perubahan iklim yang menyertai jelas lebih banyak akan meyangsarakan rakyat Indonesia," lanjut Yuyun Indradi. Sementara itu, Teguh Surya dari Walhi menyatakan, rekomendasi Menteri Kehutanan agar moratorium hanya mencakup hutan primer adalah merupakan rekomendasi yang tidak efektif dalam upaya perlindungan hutan Indonesia.

Rancangan Inpres Moratorium Hutan versi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dinilai terlalu luas memberi kewenangan pada Satgas REDD+ yang justru bisa memperkeruh suasana. Ekonom Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa terlalu luasnya fungsi Satgas REDD+ akan menimbulkan kesan yang tidak baik di mata publik. "Hal ini juga akan menambah keruh suasana karena membuka peluang tumpang tindih aturan-aturan yang selama ini sudah terjadi dan belum terselesaikan," ujarnya.

Latif mengatakan hal itu menanggapi Rinpres tentang moratorium hutan versi UKP4 yang ditengarai berpotensi mencaplok kewenangan, fungsi dan tugas yang selama ini menjadi domain Kementerian Kehutanan. Dikatakannya, jika terjadi lagi tumpang tindih aturan yang baru, akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadi disintensif bagi masyarakat. Padahal, tambahnya, salah satu agenda besar yang harus segera diselesaikan berkaitan dengan program REDD+ adalah harmonisasi dan penyelesaian tumpang tindih peraturan perundangan yang selama ini terjadi. Dikatakannya, Rinpres versi UKP4 berbeda dengan draf yang dikeluarkan oleh Menko Perekonomian, yang melibatkan kementerian atau lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

"Draf inpres moratorium versi UKP4 diindikasikan berupaya untuk memusatkan segenap kewenangan moratorium pada genggamannya Satgas REDD+," katanya. Latif Adam juga menilai, munculnya dua versi rancangan inpres ini bukanlah persoalan yang simpel. Jika draf versi UKP4 diloloskan, akan timbul kekecewaan dan mengganggu program-program Kementerian Kehutanan. Menurut dia, tindakan bypass Satgas REDD+ lewat draf inpres ini merupakan langkah yang kontra produktif dan akan menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, lanjutnya, untuk mencegah pengambilalihan fungsi dan tugas Kemenhut itu, perlu ada pembicaraan serius sebelum isu ini lebih jauh masuk ke ranah publik.

Bypass oleh Satgas REDD+ ini merupakan persoalan hulu dan harus diselesaikan sebelum masuk ke persoalan sektoral. Sebelum draf inpres tersebut diputuskan, pemerintah harus bekerja sama dengan DPR sebagai mitra pemerintah agar harmonisasi peraturan perundangan dapat terwujud sebelum program moratorium konversi hutan primer dan lahan gambut dilaksanakan.

BUMN memiliki potensi sangat besar untuk menjadi penggerak utama bisnis karbon di Indonesia. Total cadangan karbon yang dikelola oleh 21 BUMN kehutanan dan perkebunan di Indonesia mencapai 774,185 juta ton karbon. Ini potensi karbon yang dapat diikutsertakan dalam perdagangan karbon jika mekanismenya siap diimplementasikan.

Deputi Bidang Usaha Primer Kementerian BUMN Megananda Daryono mengatakan itu saat menjadi pemakalah dalam lokakarya tentang Kebijakan dan Pertumbuhan Hijau di DPD RI, Jakarta, Senin (28/2). "Perdagangan karbon bisa menjadi salah satu implementasi Rencana Strategis Nasional REDD+ sesuai komitmen pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% sampai 2020," ujarnya. Perdagangan karbon adalah bisnis jasa lingkungan yang dilakukan dengan mengurangi emisi karbon sebagai salah satu cara memitigasi perubahan iklim. Pengurangan emisi antara lain bisa dilakukan dengan konversi energi dengan emisi karbon rendah atau mengurangi penebangan hutan tropis yang berfungsi sebagai penyerap emisi karbon.

Megananda melanjutkan, cadangan karbon itu mencakup pengelolaan hutan alam, hutan tanaman industri (HTI), hutan rakyat, maupun hutan produksi. Untuk BUMN perkebunan sendiri, potensi cadangan karbon kelolaan sebesar 129,9 juta ton. Jumlah ini terdiri atas 178 ribu hektare (ha) kebun karet dengan potensi 30,62 juta ton karbon dan 795 ribu ha kebun kelapa sawit 99,375 juta ton karbon. Selain perdagangan karbon, Kementerian BUMN juga telah mematangkan rencana penurunan emisi karbon melalui skema BUMN Green Fund. Melalui dana kelolaan ini, akan diciptakan mekanisme *B to B* antar-BUMN.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (28/4) siang, dijadwalkan bertemu dengan pemimpin Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Helen Clark di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kepala Negara akan bertemu pukul 12.00 WIB dengan Helen Clark. Dalam pertemuan itu diperkirakan sejumlah masalah pembangunan baik secara global, kawasan dan nasional akan dibicarakan.

Helen Clark, mantan Perdana Menteri New Zealand periode 1999-2008 merupakan administratur (pemimpin) UNDP perempuan yang pertama. Ia menjabat sebagai administratur UNDP sejak 17 April 2009. Selain sebagai administratur UNDP, Helen juga menjabat sebagai pimpinan United Nations Development Group, yaitu sebuah komite yang beranggotakan semua pimpinan badan, program dan kelompok kerja diperserikatan bangsa-bangsa yang mengurus isu-isu pembangunan. Sehari sebelumnya Helen mengunjungi Kecamatan Pulang Bisau yang memiliki lokasi konservasi orangutan di Kalimantan Tengah.

Saat kunjungan itu, ia mengatakan, pelaksanaan Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) memerlukan dukungan seluruh pihak. "Pemerintah pusat, daerah, pihak swasta dan masyarakat setempat harus terlibat aktif dalam program ini," kata Helen di sela-sela kunjungannya ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia menilai Pemerintah Indonesia berada dalam jalurnya dan memiliki kesempatan untuk mengurangi karbon sesuai dengan target ambisius Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga hingga 26 persen pada 2020. Ia mengunjungi Kalimantan Tengah karena provinsi itu terpilih sebagai provinsi percontohan untuk program REDD+ sejak 29 Desember 2010.

Indonesia berpeluang menjadi pemimpin global dalam perubahan iklim bila sukses mengimplementasikan REDD, kata Administrator Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) Helen Clark pada Jumat (29/4). "Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemimpin global dalam perubahan iklim. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menetapkan jadwal untuk mengurangi emisi, dan hanya tercapai bila REDD diimplementasikan," katanya di Jakarta, Jumat (29/4).

REDD adalah Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan yang mulai diusulkan pada Konferensi Perubahan Iklim ke-13 di Bali pada 2007 dan disempurnakan pada KTT Perubahan Iklim Kopenhagen 2009. REDD berisi mekanisme bagi negara berkembang dan kaya hutan untuk memperoleh imbalan dari negara maju karena melestarikan hutannya. Presiden SBY pada KTT G20 di Pittsburgh pada September 2009 mengajukan secara sukarela upaya pengurangan emisi karbon Indonesia sebesar 26 persen pada 2020 termasuk dengan menggunakan mekanisme REDD.

"Indonesia juga sudah memiliki kerja sama dengan Norwegia dalam skema REDD karena memang masalah hutan tropis Indonesia juga merupakan masalah global, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana skema tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat setempat," ujarnya. Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dan Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia Erik Solheim di Oslo pada 27 Mei 2010 menandatangani Letter of Intent (LoI) REDD Plus dengan hibah dana sebesar US\$1 miliar.

Kalimantan Tengah kemudian terpilih sebagai provinsi percontohan untuk program REDD+ yaitu skema yang meliputi selain pengurangan emisi dari penggundulan (deforestasi) dan penurunan kualitas (degradasi) hutan, juga meningkatkan penyerapan karbon melalui konservasi, pengelolaan hutan lestari serta peningkatan cadangan karbon hutan mulai 29 Desember 2010. "Pemerintah Kalteng sudah berada di perahu yang sama untuk mewujudkan target pengurangan emisi dan memikul tanggung jawab yang besar sebagai provinsi pertama yang melakukan skema REDD," ujar mantan perdana menteri Selandia Baru periode 1998-2009 itu.

Ia mengatakan bahwa saat ia berkunjung ke Kalteng pada Rabu (27/4) dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat di sana, pemimpin setempat mengatakan bahwa mereka membutuhkan dukungan untuk akses ke air bersih, pengadaan kredit mikro yang mendukung, usaha kecil dan juga desa pariwisata. "Hal-hal ini merupakan hal yang sangat praktis dan konsisten dengan tujuan REDD+, jadi penting bagi pemerintah pusat di Jakarta, pemerintah provinsi atau kabupaten untuk mendengar apa yang masyarakat inginkan dari program ini," katanya. Menurut Helen yang sudah bertemu dengan Presiden SBY pada Kamis (28/4), tantangan yang saat ini dihadapi pemerintah pusat adalah pemberlakuan moratorium atau penghentian sementara izin penebangan hutan. "Moratorium memang hal yang sulit karena menyangkut politik, dan sama seperti saat saya menjadi PM Selandia Baru dulu, hal ini merupakan isu yang sangat berat, namun saya yakin Indonesia dapat melakukannya," kata Helen.

Menurut dia, proses tersebut dapat terjadi dengan kepemilikan visi yang kuat, penetapan langkah-langkah yang serius sesuai visi, memilih orang-orang yang dapat mendukung untuk melakukannya, serta terus berpikir bagaimana dengan inisiatif

tersebut dapat memberikan manfaat bagi rakyat. "Di masa lalu pembangunan dilakukan dengan cara menghabiskan hutan, yang saat ini dilakukan adalah bagaimana pembangunan dengan memelihara hutan, jadi program ini harus membayar untuk tetap menjaga kelestarian hutan, itulah REDD+," ujarnya.

Helen mengungkapkan bahwa skema pembangunan hijau (green growth) juga diminati oleh badan pembangunan atau negara lain. "Badan pembangunan Amerika Serikat yang cukup besar seperti Millennium Challenge Cooperation (MCC) atau negara Australia juga tertarik dengan masalah lingkungan, jadi bila Indonesia dapat menjalankan kebijakan REDD+ dengan baik dan memperlihatkan bahwa masyarakat setempat mendapatkan manfaat maka dapat menjadi lahan investasi yang potensial," katanya. Menurut data UNDP, Indonesia merupakan negara terbesar ketiga pelepas karbon, dengan lebih dari 80 persen emisi nasional berasal dari perubahan tata guna lahan, terutama deforestasi. Indonesia juga memiliki 86-93 juta hektare tutupan hutan (hampir 50 persen dari luas lahan). Lebih kurang separuh lahan gambut tropis di dunia berada di Indonesia seluas lebih kurang 21 juta hektar dengan Kalteng sebagai provinsi dengan lahan gambut seluas 3,01 Juta hektare dan besaran emisi karbon senilai 292 metrik ton (2005), sebagian besar dari mengalih gunakan lahan gambut dan hutan.



Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Agus Purnomo mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden mengenai moratorium hutan. "Presiden mengatakan beliau sudah menandatangani Perpres moratorium hutan tadi pagi (Kamis)," kata Agus Purnomo, Kamis (19/5). Namun Agus mengaku tidak mengetahui pasti detail yang diatur dalam Perpres tersebut karena draft yang sudah ditandatangani tersebut saat ini masih berada di Sekretariat Kabinet dan belum ia terima. Lebih lanjut Agus mengatakan, draft Perpres yang ditandatangani oleh Presiden merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari draft yang sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Kehutanan dan satgas UN REDD.

Perpres moratorium hutan atau tepatnya penggunaan hutan alam primer dan lahan gambut itu merupakan implementasi dari Letter of Intent (LoI) antara Indonesia dengan Norwegia atau disebut Kesepakatan Oslo. Kesepakatan Oslo merupakan kerja sama konservasi kehutanan untuk mengurangi emisi karbon senilai satu miliar dolar AS antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia yang ditandatangani pada 26 Mei 2010 di Oslo, Norwegia. Kerja sama yang disepakati keduanya terdiri dalam tiga tahap yaitu tahap pertama dimulai 2010, kedua pada Januari 2011 hingga 2014 dan tahap ketiga pasca 2014. Tahap pertama berupa kegiatan konsultasi dan penyusunan strategi nasional REDD+, pembentukan lembaga REDD+ langsung yang keberadaannya langsung dibawah Presiden RI.

Selain itu juga dilakukan pembentukan lembaga MRV (monitoring, reporting and verification) yang independen dan dipercaya, pemilihan instrumen pendanaan dan pemilihan propinsi uji coba. Sedangkan tahap kedua meliputi operasionalisasi instrumen pendanaan, peluncuran program uji coba propinsi REDD+ yang pertama, dan penghentian pengeluaran izin baru konversi hutan alam dan gambut selama dua tahun. Selain itu juga dilakukan pembuatan database lahan hutan yang rusak atau terdegradasi, ujicoba provinsi kedua REDD+ dan pelaksanaan MRV untuk tier kedua. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan lanjutan strategi dan program REDD+ di tingkat nasional, pemantauan, pengkajian dan verifikasi program REDD+ oleh lembaga MRV yang independen, serta laporan ke UNFCCC mengenai emisi dari lahan hutan dan gambut yang telah dilakukan. Sedangkan pihak Norwegia akan mengucurkan dana sebanyak US\$200 juta untuk tahap satu dan tahap kedua, serta 800 juta dolar AS untuk tahap ketiga.

Jaringan Penyelamatan Hutan dan Gambut Kalimantan Tengah menyatakan Inpres Nomor 10 tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut dinilai tidak efektif. "Inpres tersebut hanya bersifat instruksi dan tidak memiliki dampak hukum yang mengikat sehingga sangat mudah untuk tidak dipatuhi, seperti yang terjadi atas Inpres Nomor 2 tahun 2007 tentang rehabilitasi dan revitalisasi kawasan eks PLG yang tidak pernah dijalankan hingga saat ini," kata Direktur Walhi Kalteng, Arie Rompas, di Palangka Raya, Minggu (22/5). Dikatakan, meskipun inpres pada tanggal 20 Mei 2010 yang juga merupakan Hari Kebangkitan Nasional menjadi berita baik sekaligus menjadi kabar buruk atas ancaman terhadap penyelamatan hutan dan gambut di Kalteng.

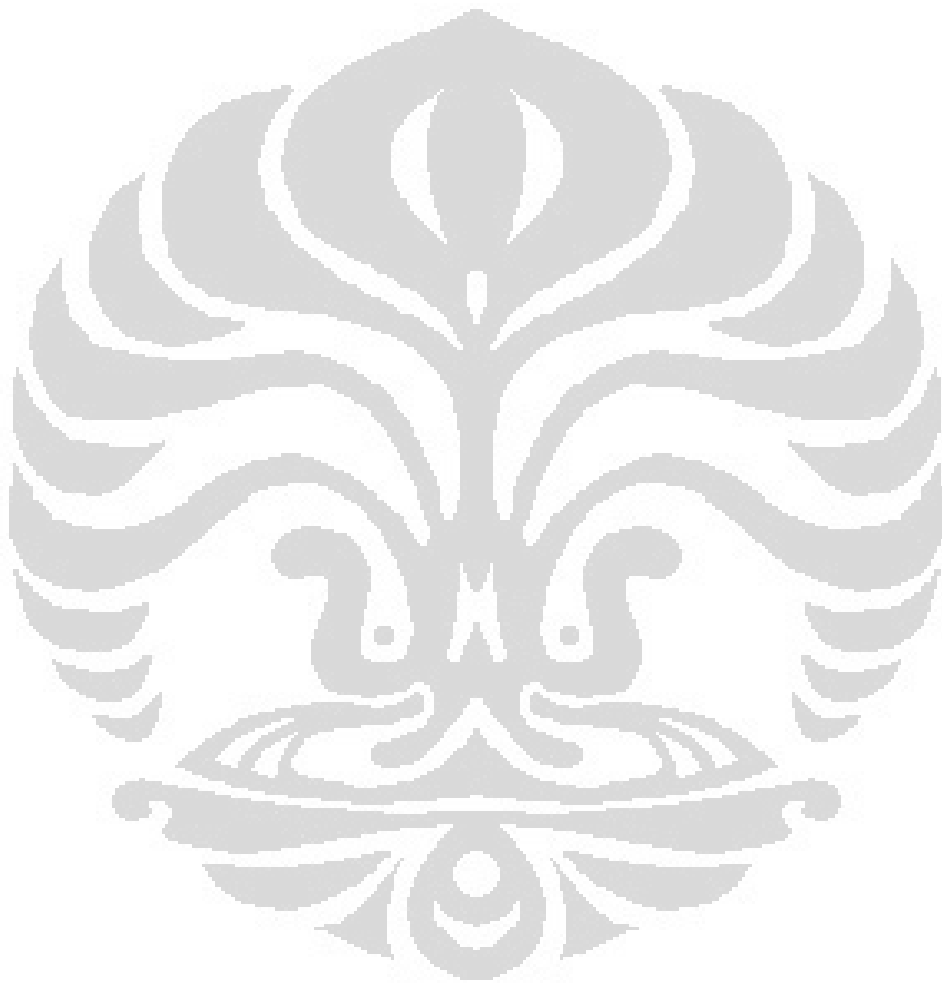
Inpres tersebut hanya berlaku di kawasan hutan (konservasi, kawasan lindung, kawasan hutan produksi serta kawasan gambut yang sebenarnya sudah dilindungi melalui kebijakan yang lebih tinggi yaitu undang-undang kehutanan tahun No 41 tahun 1999. Selain itu istilah hutan alam primer adalah istilah yang tidak dikenal dalam tata kebijakan di sektor kehutanan dan merupakan upaya pengkaburan dari objek moratorium yang seharusnya berlaku untuk hutan alam. "Melihat konteks Kalteng yang juga merupakan pilot provinsi percontohan implementasi REDD+ sebagaimana yang terlampir dalam peta, diperkirakan hanya sedikit saja wilayah hutan di Kalteng yang bisa diselamatkan," katanya.

Wilayah yang menjadi objek moratorium di Kalteng merupakan wilayah hutan lindung seperti hutan lindung Batu Batikap dan Sapat Hawung, wilayah Taman Nasional Sebangau dan Tanjung Puting dan wilayah Suaka Marga Satwa Lamandau dan wilayah gambut seperti Blok E dikawasan eks PLG yang sudah berstatus kawasan lindung. Namun sayangnya kawasan tersebut juga sudah menjadi site kerja oleh lembaga konservasi internasional bukan dikuasai oleh masyarakat lokal. Sedangkan untuk wilayah gambut di Kalteng yang menjadi objek moratorium diantaranya sudah diberikan izin seluas 774.574,86 hektare kepada 118 izin konsensi untuk perkebunan sawit dan 13 izin tambang (KP) yang tidak dipengaruhi oleh Inpres ini.

Di lain sisi wilayah-wilayah perlindungan masyarakat adat seperti pukung pahewan, kaleka lewu dan konsep pengelolaan hutan secara tradisional yang tersebar di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah masih terancam oleh konversi hutan untuk pertambangan, kehutanan dan perkebunan sawit dan tidak menjadi pertimbangan dari Inpres ini. Seharusnya moratorium didasarkan pada prasyarat dan indikator sosial dan lingkungan sehingga moratorium atau "jedah" konversi hutan bisa berlaku efektif dan didasarkan untuk upaya perbaikan tata kelola kehutanan, penegakan hukum dan upaya resolusi konflik bagi kepastian ruang-ruang kelola masyarakat untuk menjamin hutan memberikan kesejahteraan bagi rakyat yang hidup di sekitar hutan.

Selain itu, juga diharapkan mampu secara efektif menurunkan emisi dari deforestasi hutan sebagai tanggung jawab Indonesia sesuai janji dan komitmen Presiden SBY dalam pertemuan G20 di Pitsburg dan implementasi LOI antara Indonesia dengan Norwegia, kata dia. Demikian pernyataan Jaringan Penyelamatan Hutan dan Gambut Kalteng dari Walhi Kalteng Arie Rompas, Save Our Borneo Nordin, Pokker

SHK Edy Subhany, Betang Borneo Rano Rahman, Mitra LH Kusaritano, Akademisi Bismart Feri Ibie.



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, penolakan pembangunan rel kereta api di Kalimantan Tengah (Kalteng) oleh gubernurnya, Agustin Teras Narang, dengan mengaitkan proyek tersebut kepada lingkungan, sebagai hal yang paradoks dan tidak etis. Peralnya, jika berbicara soal lingkungan, artinya tidak boleh ada izin konsensi tambang di daerah tersebut. Kenyataannya, banyak perusahaan pertambangan batu bara dan sawit di kawasan ini mendapat izin.

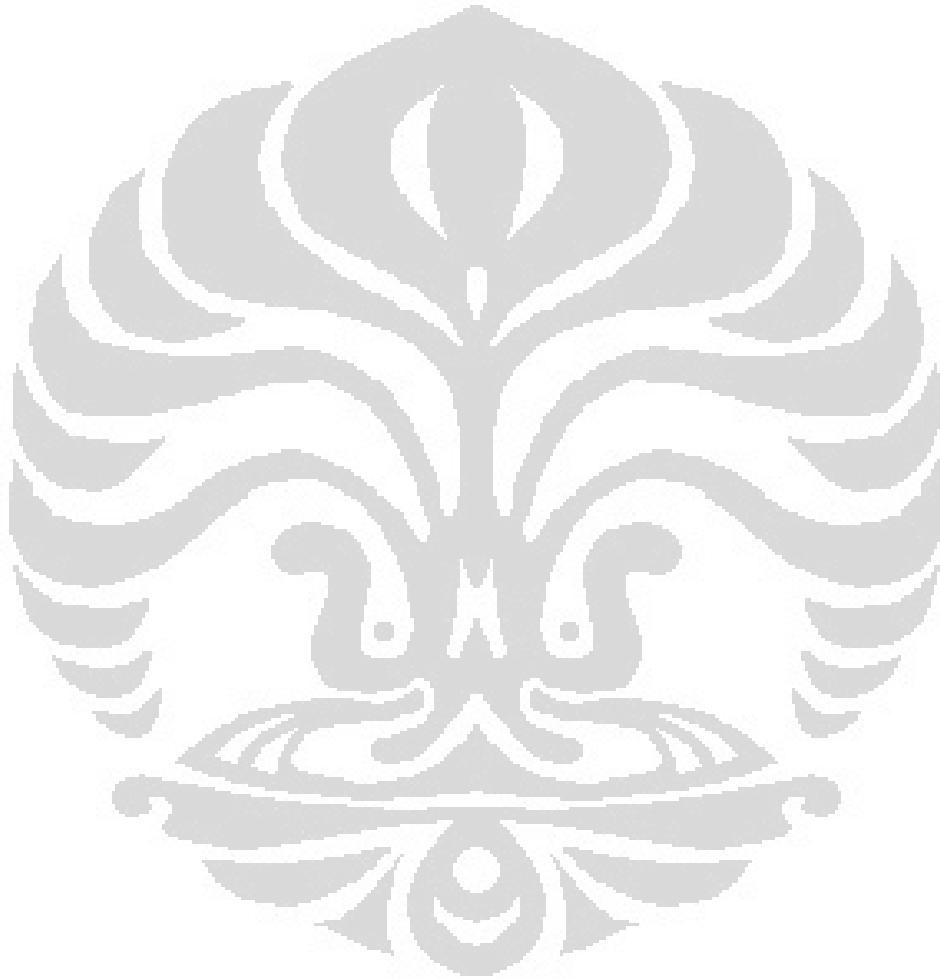
"Kalau alasannya lingkungan, lalu izin tambang di daerah ini bagaimana? Rel kereta api hanya sebagian dampak kecil. Pertambangan batu bara itu yang merusak lingkungan di sana. Ini dulu yang diurus," tandas Manajer Kampanye Hutan Walhi Deddy Ratih, saat dihubungi *Media Indonesia*, Senin (8/9). Dikatakan, ada bentuk inkonsistensi kebijakan dalam perlindungan lingkungan di wilayah Jantung Borneo ini. Sudah menjadi rahasia umum yang juga dibenarkan oleh Satgas REDD+, kerusakan hutan di zona ini lebih disebabkan pertambangan batu bara dan sawit.

Ia menengarai, pada prinsipnya penolakan ini lebih disebabkan benturan kepentingan proyek antara pusat dan daerah. Proyek-proyek ini, lanjutnya, direncanakan untuk mengeksploitasi habis-habisan Kalimantan. "Kelihatan, pusat muncul dengan intervensi, untuk rebutan proyek. Jadi, jangan bicara dulu lingkungan, benahi dulu masalah yang ada." Deddy menambahkan, pembangunan rel kereta api penghubung antara Kalteng dan Kaltim itu justru memiliki dampak lingkungan lebih sedikit dari pada pembuatan jalan tol. Menurutnya, bukaan lahan proyek jalan KA tak begitu mengambil lahan luas. Jadi, pertimbangan aspek lingkungan terhitung kecil.

"Problemnya, peruntukan transportasi (KA) ini lebih untuk memfasilitasi industri batu bara dan CPO. Riilnya, kepentingan masyarakat terpinggirkan, dalam transportasi. Selain daya dukung lingkungannya tak diperhatikan," tuturnya. Sebelumnya, Gubernur Teras Narang tampak gerah dengan rencana pemerintah pusat yang hendak membangun rel kereta api sepanjang 135 kilometer (km) penghubung antara kalteng dan Kaltim. Bahkan mantan Ketua Komisi II dan III DPR-RI ini akan mundur dari jabatannya, bila pemerintah pusat tetap memaksakan pembangunan rel kereta api yang mengangkut batu bara dengan nilai proyek mencapai US\$2,5 miliar tersebut dilanjutkan. Teras beralasan, apabila rel kereta api dibangun sesuai rencana akan berdampak terhadap masyarakat sekitar. Contohnya dari segi kerusakan hutan dan lahan, lingkungan, sehingga dapat menimbulkan bencana banjir bandang untuk masyarakat di wilayah Barito.

Tujuh desa di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi desa percontohan. Program ini dengan luas total areal 120 ribu Hektare. Desa percontohan itu, yaitu Desa Katunjung, Mentangai Hulu, Kalumpang, Tumbang Morui, Katimpun, Sei Ahas yang terletak di Kecamatan Mentangai dan Desa petak puti kecamatan Timpah di Kabupaten Kapuas.

Tujuh desa tersebut, Kamis (15/9), dicanangkan menjadi desa percontohan (model REDD+) kerja sama dengan Negara Australia. Menhut mengatakan jika masyarakat bisa menjaga hutan dan menanam maka besar kemungkinan mereka akan membeli karbon yang dihasilkan oleh hutan di tujuh desa itu. Dan yang mendapat hasil penjualan itu adalah masyarakat yang menjaga hutan itu sebanyak 70 persen, pemerintah daerah hanya 20 persen sedangkan pemerintah pusat hanya 10 persen.





Center for International Forestry Research atau CIFOR mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka dan memberikan sambutan utama Konferensi Masa Depan Hutan dan Perubahan Iklim Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta, 27 September. Humas CIFOR Budhy Kristanty dalam siaran pers yang dikirimkan Rabu mengatakan, pihak Panitia Konferensi Masa Depan Hutan dan Perubahan Iklim Indonesia sudah memberikan surat undangan kepada Presiden Yudhoyono untuk menghadiri dan membuka kegiatan yang akan dihadiri 800 pakar kehutanan se-Indonesia itu.

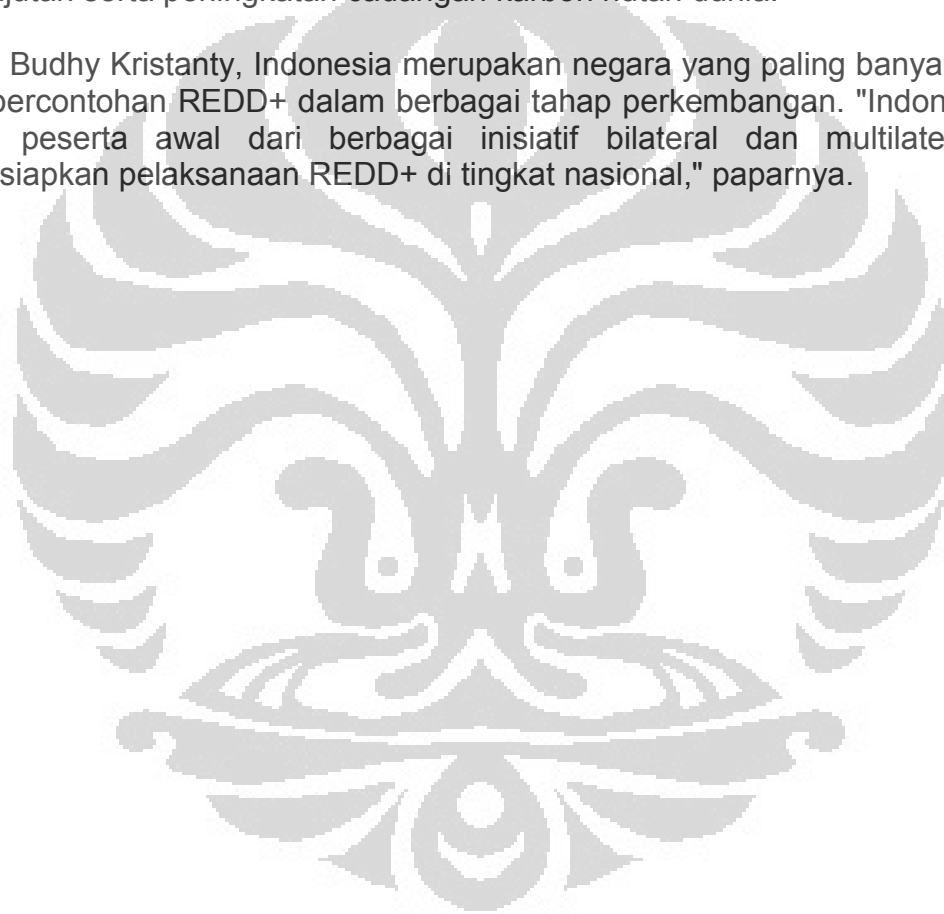
"Kami sudah mengundang Pak Presiden secara resmi untuk membuka acara dan memberikan materi utama konferensi ini," kata Kristanty Budhy. Menurut Budhy, Presiden Yudhoyono diundang untuk memberikan materi Hutan Indonesia: Alternatif Masa Depan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan, Kayu, Energi dan Redd+. Rencananya, Presiden Yudhoyono akan didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia Erik Solheim, utusan khusus bidang perubahan iklim Bank Dunia Andrew Steer, dan Menteri Negara Bidang Lingkungan Hidup, Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris Jim Paice.

Perwakilan Pemerintah dari sektor-sektor terkait, komunitas bisnis serta lembaga swadaya masyarakat akan turut hadir sebagai pembicara. Budhy mengatakan, konferensi tersebut melibatkan 1.000 pakar kehutanan dari berbagai daerah di Indonesia, yang akan mendiskusikan bagaimana Indonesia dapat tetap mempertahankan hutan hujan tropis dan pada saat bersamaan memastikan pertumbuhan ekonominya. Budhy mengemukakan, penyelenggaraan konferensi hutan dan perubahan iklim Indonesia oleh CIFOR, didasari oleh fakta bahwa Indonesia merupakan rumah terbesar ketiga bagi hutan hujan tropis dunia. "Secara global, deforestasi menyumbang sekitar 20 persen dari emisi gas rumah kaca. Bagi Indonesia persentasenya dapat mencapai 60 persen lebih sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang gas rumah kaca terbesar di dunia," papar Budhy.

Aliran dana dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang setiap tahun untuk membantu memfasilitasi pengurangan deforestasi melalui program REDD+ diperkirakan mencapai Rp270 triliun. Humas Center for International Forestry Research (CIFOR), Budhy Kristanty, Senin (26/9) di Bogor mengatakan, potensi aliran dana pengembangan program REDD+ dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang setiap tahunnya mencapai US\$30 miliar atau sekitar Rp270 triliun.

"Potensi aliran dana dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang untuk program REDD+ cukup besar, mencapai US\$30 miliar," ujar Budhy Kristanty. Dikemukakannya, program REDD+ merupakan mekanisme global untuk mengurangi emisi dan deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, mekanisme REDD+ disepakati secara global untuk mendorong konservasi dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan serta peningkatan cadangan karbon hutan dunia.

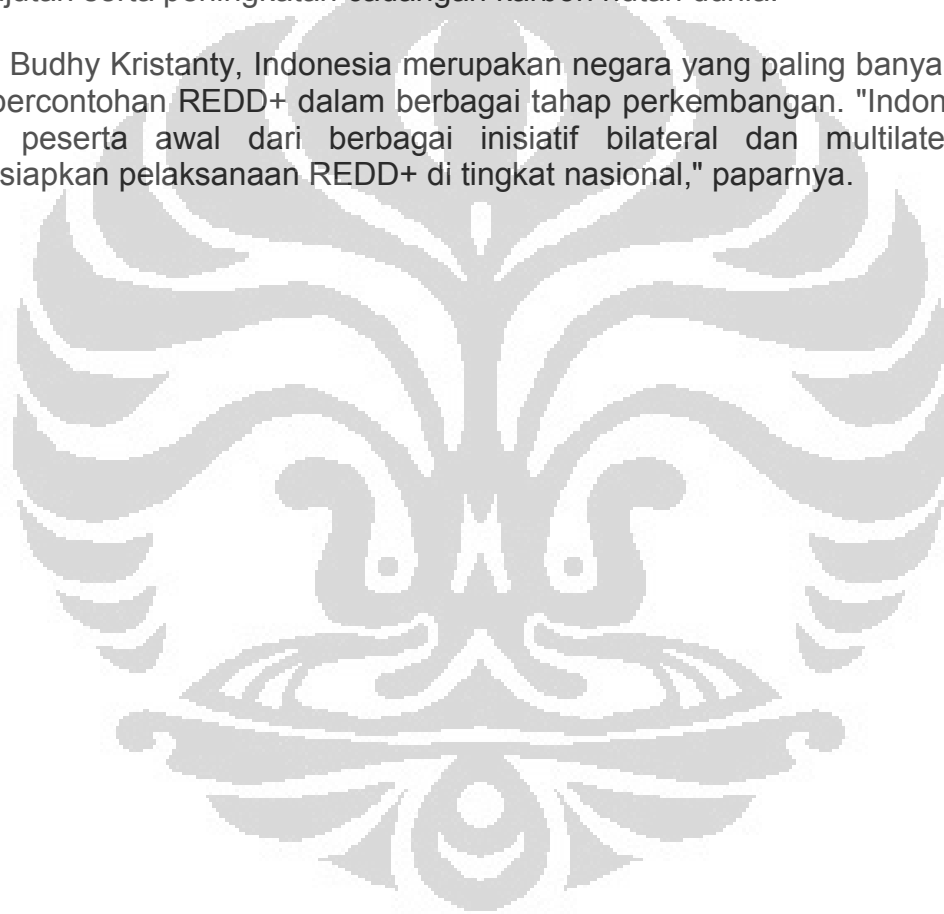
Menurut Budhy Kristanty, Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki proyek percontohan REDD+ dalam berbagai tahap perkembangan. "Indonesia telah menjadi peserta awal dari berbagai inisiatif bilateral dan multilateral untuk mempersiapkan pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional," paparnya.



Aliran dana dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang setiap tahun untuk membantu memfasilitasi pengurangan deforestasi melalui program REDD+ diperkirakan mencapai Rp270 triliun. Humas Center for International Forestry Research (CIFOR), Budhy Kristanty, Senin (26/9) di Bogor mengatakan, potensi aliran dana pengembangan program REDD+ dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang setiap tahunnya mencapai US\$30 miliar atau sekitar Rp270 triliun.

"Potensi aliran dana dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang untuk program REDD+ cukup besar, mencapai US\$30 miliar," ujar Budhy Kristanty. Dikemukakannya, program REDD+ merupakan mekanisme global untuk mengurangi emisi dan deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, mekanisme REDD+ disepakati secara global untuk mendorong konservasi dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan serta peningkatan cadangan karbon hutan dunia.

Menurut Budhy Kristanty, Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki proyek percontohan REDD+ dalam berbagai tahap perkembangan. "Indonesia telah menjadi peserta awal dari berbagai inisiatif bilateral dan multilateral untuk mempersiapkan pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional," paparnya.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (27/9) pagi menghadiri seminar internasional tentang kelangsungan dan perlindungan hutan Indonesia yang dihadiri oleh pelaku berbagai sektor baik dalam maupun luar negeri. Seminar yang bertajuk *Forests Indonesia, alternative futures to meet demands for food, fibre, fuel and REDD+* tersebut digagas oleh lembaga internasional yang bergerak di bidang kehutanan CIFOR dan sejumlah lembaga lainnya.

Direktur CIFOR, Frances Seymour dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan ini penting di tengah tantangan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hutan hujan yang dimilikinya. "Hari ini kita berkumpul dari berbagai sektor, untuk berdiskusi tentang masa depan hutan Indonesia. 900 partisipan yang ikut serta," katanya. Frances Seymour menjelaskan, dalam membahas masalah hutan Indonesia tak hanya dari perspektif internasional namun juga dalam pandangan Indonesia sehingga dapat diakomodasi permasalahan lokal sehingga perlindungan hutan dapat dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, bahan bakar dan juga kelangsungan hidup lainnya.

"Saya belum pernah melihat dukungan politik penuh dari pemerintah untuk menjamin kelangsungan lingkungan. Presiden Yudhoyono, langkah Indonesia untuk mengurangi emisi menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia memberikan perhatian dan peduli," tegasnya. Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pertemuan ini sangat penting bagi Indonesia, sekaligus peluang Indonesia untuk bisa memenuhi target nasional dalam pengurangan emisi dalam beberapa tahun mendatang sekaligus melindungi hutan hujan yang dimiliki Indonesia.

"Tema pertemuan ini sangat relevan dan tepat. Bagi Indonesia masalah hutan sangat terkait dengan kepentingan Indonesia memastikan kelangsungan hutan Indonesia. Di sini hadir sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dan perhatian terhadap lingkungan," kata Presiden. Presiden berharap seminar ini bisa memberikan sumbangan berarti untuk upaya Indonesia menjamin kelangsungan hutan Indonesia.

Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menilai lembaga Center for Internasional Forestry Research (CIFOR) telah merugikan industri pulp dan kertas di tanah air melalui pernyataannya yang memelintir pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Ini sangat merugikan, dan bisa memojokkan asosiasi industri pulp dan kertas," kata Ketua Presidium APKI, Muhammad Mansur, di Jakarta, Senin. CIFOR dinilai memelintir pidato Presiden SBY saat membuka Konferensi Internasional Forests Indonesia: Alternative futures to meet demands for food, fibre, fuel, and REDD+, di Jakarta, Selasa (27/9).

Dikatakan, pernyataan CIFOR itu juga seolah-olah mengadu domba pemerintah Indonesia dengan APKI. Ia menjelaskan, fakta tersebut bisa dilihat dalam tulisan Daniel Cooney di blog milik CIFOR, tertanggal 27 September 2011, berjudul "Indonesia's leader says he will dedicate final years of his presidency to protect rainforest". Contoh kalimat yang dipelintir atau disisipkan di antara pernyataan Presiden tersebut ada di alinea lima. "Indonesia kehilangan kira-kira 1,1 juta hektare hutan setiap tahun. Sebagian besar disebabkan oleh penebangan yang tidak lestari yang meliputi konversi hutan menjadi perkebunan untuk kelapa sawit dan industri pulp dan kertas. Nyatanya, seluruh kalimat itu tidak ada dalam pidato Presiden SBY," kata Mansur.

Pengaburan pidato itu yang dilakukan CIFOR, kata dia, sangat merugikan industri pulp dan kertas. "Presiden SBY jelas sekali tidak menyinggung soal industri pulp dan kertas dalam pidatonya. Ini kan merugikan kami. Karena kami selalu mengusahakan hutan secara lestari seperti HTI (Hutan Tanaman Industri)," katanya. Mansur menambahkan, di alinea delapan, CIFOR juga merekayasa pidato Presiden dengan menyisipkan kalimat, "Dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu penyumbang gas rumah kaca tertinggi di dunia". "Kalimat itu sama sekali tidak ada dalam pidato SBY. Fakta ini dapat dicek kebenarannya di video pidato Presiden di youtube dengan alamat: <http://www.youtube.com/watch?v=5wwD-nrdpBU>. Ini kan menyesatkan," katanya.

Hari Hutan 2011 yang jatuh pada 4 Desember mendatang difokuskan di Benua Afrika. "Hari Hutan 2011 dipusatkan di Afrika, tepatnya di kota Durban, Afrika Selatan," kata Humas Center for International Forestry Research (CIFOR) Budhy Kristanty, dalam siaran pers yang dikirim. Rabu (26/10), di Bogor. Hari Hutan diadakan setiap tahun sebagai bagian dari Konferensi Para Pihak tentang Konvensi Perubahan Iklim / United Nation Framework Convention on Climate Change alias UNFCCC, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hutan menjadi agenda penting dalam strategi iklim global maupun nasional, dan bahwa strategi tersebut dilengkapi oleh pengetahuan dan pengalaman paling mutakhir.

"Conference of the Parties" alias COP atau Konferensi Para Pihak adalah otoritas tertinggi dalam kerangka kerja PBB tentang UNFCCC, yang merupakan asosiasi para pihak dalam meratifikasi konvensi yang bertanggung jawab menjaga konsistensi upaya internasional dalam mencapai tujuan utama konvensi yang mulaiditanda tangani pada bulan Juni 1992 di Rio De Janeiro, Brasil, dalam KTT Bumi. Menurut Budhy, adanya kesepakatan yang luas terkait REDD+ pada diskusi perubahan iklim PBB tahun lalu, fokus negosiasi bergeser ke tahap selanjutnya dengan rancangan dan implementasi REDD+ yang lebih terperinci, termasuk juga sejumlah program penyesuaian. Acara yang sekarang menginjak tahun kelima ini telah menjadi salah satu agenda paling berpengaruh terkait hutan di seluruh penjuru dunia.

Tahun ini, lanjutnya, fokus khusus Hari Hutan adalah Afrika, mengarah pada hutan-hutan basah di Daerah Aliran Sungai Kongo dan tempat-tempat lain serta sejumlah besar wilayah hutan kering di penjuru benua ini. "Perlunya kesadaran yang lebih besar untuk penelitian terbaru tentang hutan Afrika dikuatkan oleh perkiraan bahwa benua tersebut akan mengalami dampak perubahan iklim yang sangat besar," paparnya. Hari Hutan 2011 di Durban mengetengahkan sejumlah tema utama, yaitu 'Bagaimana Perwujudan REDD+ di Lapangan?', 'Sebuah Penelusuran Sejumlah Isu Sosial, Politik dan Biofisik Mengamati Tingkat Acuan dan Pemantauan untuk REDD+: Negara yang Melaksanakan Kegiatan Percontohan Awal', 'Mendanai Peluang dan Sejumlah Isu untuk Mitigasi dan Adaptasi (fokus pada sektor swasta)', dan 'Jaring Pengaman Keanekaragaman Hayati atas REDD+'.

21. 15112011 – Media Indonesia – 1.400 Personel TNI Polri Amankan Kunjungan Sekjen PBB ke Kalteng

Sekitar 1.400 personil TNI-Polri di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan istrinya Ban Soon-Teak di Palangkaraya, Kalteng, Kamis (17/11). Komandan Resort Militer (Danrem) 102 Panju, Kolonel Inf Sukoso Maksum, kepada wartawan sesuai meninjau kesiapan pasukan keamanan di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Palangkaraya, Selasa (15/11), menjelaskan bahwa 1.400 personil itu selain dari TNI Polri juga dari satuan polisi pamong praja.

"Mereka kita sebar untuk mengamankan sejumlah tempat dan objek yang nantinya akan dikunjungi oleh Sekjen PBB dan rombongan, seperti Bandara Tjilik Riwut, Puskesmas Menteng, dan rumah jabatan Gubernur Kalteng. Ada tambahan kegiatan, yakni di Rumah Betang (contoh rumah adat masyarakat Kalteng)," ujarnya. Menyinggung masalah kesiapan pengamanan, Maksum mengatakan saat ini kesiapan personel keamanan sudah siap dan standar pengamanan peralatan juga sudah semuanya siap, mulai dari barisan pemadam kebakaran, PDAM dan PLN semua sudah siap untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan.

Kunjungan sehari Sekjen PBB Ban Ki-moon dan istrinya Ban Soon-Teak di Palangkaraya antara lain adalah untuk meresmikan Kantor Koordinasi PBB untuk REDD+ (UNORCHID). Kantor ini nantinya digunakan untuk mendukung usaha REDD+ di Indonesia, khususnya di Kalteng. Rombongan Sekjen PBB itu akan didampingi Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Sekjen PBB Ban KiMoon meminta dilakukan sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat secara transparan mengenai pelaksanaan program Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+) di Provinsi Kalimantan Tengah. Penegasan ini dikatakan Ban Ki Moon saat melakukan jumpa pers dengan wartawan di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya sebelum bertolak ke Bali menghadiri KTT. Menurutnya, Kamis (17/11) malam, sejak Januari Kalteng telah dijadikan pilot project Redd+ alasannya jelas karena Kalteng punya SDA yang harus dilestarikan sehingga bisa mendukung perubahan iklim.





Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan, Norwegia, dan Denmark di sela-sela hari pertama rangkaian KTT Keamanan Nuklir ke-2 di Seoul, Korea Selatan, Senin (26/3). Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, ketika ditemui di Seoul, mengatakan, pertemuan bilateral akan dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat atau dua jam lebih awal dari Waktu Indonesia Barat. Presiden Yudhoyono akan memulai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Yousaf Raza Gilani. Menurut Marty, Indonesia dan Pakistan akan memperkuat kerja sama di berbagai bidang, antara lain bidang perdagangan yang kini mencapai US\$1,1 miliar dan bidang pemberantasan terorisme.

"Kita sangat mengapresiasi kerja sama selama ini, misalnya pengembalian (tersangka teroris) Umar Patek kemarin," kata Marty. Selain itu, kedua negara juga akan mempererat kerja sama dalam kerangka Organisasi Kerja sama Islam (dulu Organisasi Konferensi Islam). Pertemuan bilateral kedua adalah antara Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg. "Yang sangat menonjol adalah kerja sama di bidang lingkungan hidup, terutama *climate change*," kata Marty. Norwegia adalah mitra Indonesia dalam pelaksanaan program pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi hutan (REDD+).

Malam harinya, Yudhoyono akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Denmark Helle Thorning Schmidt. KTT Keamanan Nuklir ke-2 akan dilaksanakan pada 26-27 Maret 2012. Pada hari pertama, para peserta KTT dijadwalkan menghadiri acara penyambutan resmi pada pukul 16.30 waktu setempat, dan dilanjutkan dengan jamuan makan malam pada pukul 18.30 waktu setempat di Museum Nasional Korea. KTT Keamanan Nuklir ke-2 diikuti pemimpin dari 53 negara dan perwakilan organisasi internasional, yaitu PBB, IAEA, dan Uni Eropa. Interpol juga hadir dalam KTT di Seoul atas persetujuan para negara peserta dan organisasi internasional.

Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai salah satu pilot untuk uji coba tahap kesiapan skema REDD. Ini didasari oleh sumber daya hutan di wilayah ini. "Hutan di Sulteng cukup luas dan terbesar di wilayah Sulawesi, mencapai 4,39 juta hektare atau 64,6% dari luas Sulteng," kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Elim Somba, mengutip sambutan Gubernur Sulteng H Longki Djanggola, saat membuka Lokakarya Nasional Pemantauan Independen *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) di Palu, Senin (4/6).

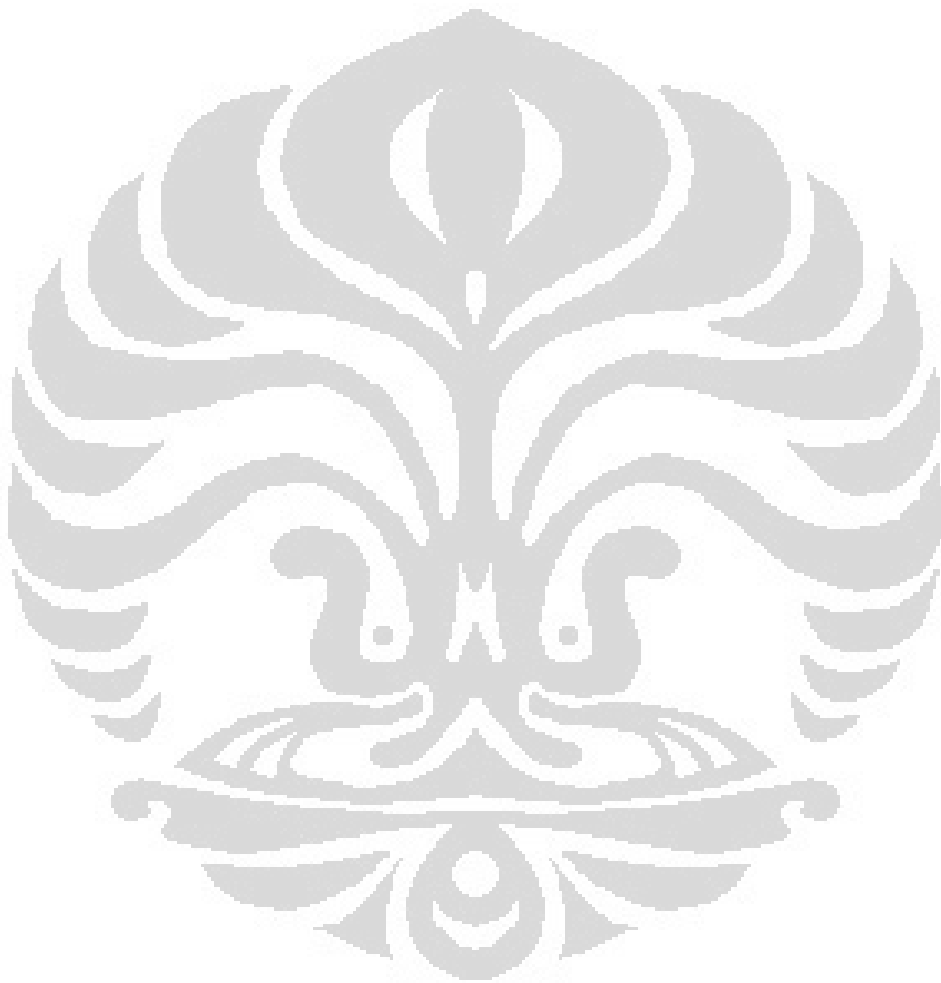
Lanjut Elim, tutupan hutan di daerah ini masih cukup baik serta dukungan dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya di bidang manajemen kehutanan masih berjalan dengan baik. Meski demikian, tambah Elim, harus tetap memperhatikan kondisi hutan yang bisa saja mengalami penurunan penutupan lahan akibat deforestation dan degradasi hutan. Oleh karena itu, upaya untuk menekan laju *deforestation* dan degradasi hutan telah menjadi prioritas untuk ditangani, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia atas pelaksanaan REDD, pada tahun 2020 telah ditargetkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan upaya sendiri (unilateral) dan sampai dengan 41% dengan dukungan dari luar negeri (multilateral) dari tingkat emisi saat ini.

"Sudah sewajarnya kita mendukung sepenuhnya program UN-REDD ini, dengan menjalin kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga donor dan mitra pembangunan, lembaga swadaya, pihak swasta serta masyarakat, termasuk kelompok kerja pemantauan REDD bersama Yayasan Merah Putih Sulawesi Tengah," ujar Elim. Lokakarya ini diikuti 35 orang peserta dari Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, Papua, DKI Jakarta, serta perwakilan dari beberapa kabupaten di Sulteng. Program REDD merupakan program kerja sama antara Kementerian Kehutanan RI dan tiga badan dunia PBB (FAO, UNDP dan UNEP) yang bertujuan menurunkan emisi karbon sebagai dampak dari deforestation dan degradasi hutan.

Pemerintah Norwegia akhirnya menetapkan Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai salah satu wilayah untuk program Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Penetapan Sulawesi Tengah setelah pemerintah Norwegia menandatangani Letter of Intent dengan pemerintah Indonesia di Norwegia, pekan lalu. Dengan masuknya Sulteng sebagai provinsi proyek REDD, tentu akan mengalir pula dana dalam jumlah ke Sulawesi Tengah, sekitar US\$500 ribu. Dana diturunkan secara bertahap. Koordinator Pokja Pantau REDD Sulteng Sirdjuddin Azmi menyatakan, dengan demikian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus menyiapkan diri untuk mengelola dana-dana besar dari donor Norwegia. "Itu penting untuk mencegah terjadi kebocoran-kebocoran dana proyek nantinya," kata Sirdjuddin di Palu, Senin (4/6). Penetapan tersebut merupakan paket REDD 2011. Hanya saja Sulteng belum dapat diperkirakan akan mendapat alokasi besaran dana proyek REDD. Selain Sulteng, provinsi proyek yang lain adalah Jambi, Aceh, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Papua, dan Papua Barat.



**LAMPIRAN 2**  
**PROTOKOL PENGISIAN LEMBAR *CODING***



Nomor Coding:

Identitas Coder:

Identitas Berita:

Judul Berita:

---

## **Protokol Pengisian Lembar Coding**

### Pengantar

Analisis isi ini dimaksudkan untuk mengetahui liputan Media Indonesia versi *online* dalam memberitakan program Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+). Tema berita yang mana, latar belakang berita yang mana, citra isu seperti apa, jangkauan berita mana, sumber berita yang mana, dan juga sudut pandang seperti apa yang menjadi prioritas pemberitaan dan bagaimana kecenderungan Media Indonesia *online* menampilkan liputan-liputan tersebut. Silakan membaca dengan saksama petunjuk pengisian ini yang menjadi dasar Anda mengisi lembar coding.

### Prosedur

Bacalah berita dengan teliti. Bacalah juga petunjuk pengisian ini agar Anda dapat menempatkan berita dalam kategori yang tepat. Setelah itu, isilah lembar coding dengan menandai pilihan Anda pada kategori-kategori yang disebutkan dan dijelaskan di bawah ini.

---

### **Q1: Tema Berita REDD+**

Tema berita didefinisikan sebagai pokok permasalahan atau sumber peristiwa yang menjadi dasar publikasi berita.

1. (Rumusan) kebijakan pengelolaan program REDD+.  
Berita mengenai bagaimana program REDD+ dirumuskan, dibuat peraturan sedemikian rupa untuk menjalankan program REDD+, mekanisme menjalankan program REDD+.
2. Kampanye dan/atau penyelenggaraan kegiatan program REDD+  
Berita memberikan liputan kampanye narasumber, yang setidaknya menyebutkan bahwa narasumber secara persuasif mengajak pembaca turut mendukung berjalannya program REDD+ , dan/atau liputan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan narasumber dalam program REDD+, misalnya konferensi perubahan iklim atau semacamnya .
3. Realisasi tindak lanjut program REDD+  
Berita menjelaskan proses jual beli karbon dari PBB (dan negara-negara maju) ke Indonesia dan bagaimana aplikasi mekanisme program REDD+ pada saat

dijalankan, termasuk direalisasikannya program ini di lapangan (pada masyarakat lokal yang berada di daerah pilot project yang dipilih untuk menjalankan program REDD+ ini)

4. Hambatan tindak lanjut program REDD+ di lapangan

Berita menjelaskan bagaimana peraturan pemerintah yang sudah dirumuskan untuk menjalankan program REDD+ ini menemui hambatan di lapangan sehingga timbul gangguan kelancaran pelaksanaan program, misalnya terjadinya konflik di lapangan karena benturan kepentingan beberapa pihak, atau sengketa karena salah satu pihak memberikan pernyataan yang mendiskreditkan pihak lain.

## Q2: Latar Belakang Berita

1. Ekonomi

Berita menyebutkan nominal harga proyek REDD+, dan/atau keuntungan program REDD+ ditinjau dari segi ekonomi

2. Hukum

Berita menyebutkan peraturan undang-undang pemerintah atau hak masyarakat lokal atau hak guna usaha

3. Politik

Berita menyebutkan kebijakan negara atau kekuasaan lembaga tertentu dalam mengelola atau justru menggagalkan/menjatuhkan program REDD+, dan/atau pernyataan yang mengutamakan kepentingan salah-satu pihak tertentu.

## Q3: Citra Isu

1. Mitigasi emisi karbon/ Pro REDD+

Berita berisi dukungan atau hal-hal positif/pujian untuk program, pengelolaan program, maupun keuntungan yang didapat dengan menjalankan program REDD+

2. Kontra REDD+

Berita berisi kritik atau hal-hal negatif/kekurangan atas berjalannya program, pengelolaan program, maupun kerugian yang ditimbulkan selama dijalankannya program REDD+)

3. Pro dan Kontra REDD+

Isi berita tentang hal yang positif berupa dukungan dan/atau pujian, sekaligus negatif berupa kritik dan kerugian sekaligus yang ditimbulkan

4. Tidak ada. Berita tidak secara jelas berisi tentang penilaian pro ataupun kontra program REDD+

#### **Q4: Jangkauan Berita**

1. Internasional  
Berita menjelaskan kegiatan di luar negeri, dan/atau memberitakan pihak asing di luar negeri
2. Nasional  
Berita menjelaskan kegiatan di dalam negeri, dan/atau memberitakan kegiatan pihak asing maupun domestik di dalam negeri
3. Lokal  
kegiatan di wilayah tertentu di Indonesia, dan/atau memberitakan kegiatan pihak asing maupun domestik di wilayah tertentu di Indonesia

#### **Q5: Narasumber Berita**

1. Pemerintah (pejabat pemerintahan pusat maupun daerah)
2. Perusahaan/Industri/Asosiasi Pengusaha
3. Organisasi Non Pemerintah / Lembaga Swadaya Masyarakat
4. Ahli di bidang lingkungan
5. Militer/TNI /Kepolisian
6. Internasional (narasumber berasal dari warga asing/lembaga internasional)

#### **Q6: Asal Pemberitaan**

1. Liputan/wawancara wartawan Media Indonesia (*event* program REDD+)
2. Debat atau komentar narasumber yang pro REDD+ saja, atau narasumber yang kontra REDD+ saja
3. Kampanye dan/atau aktivitas (misalnya rapat koordinasi) narasumber pro REDD+ saja atau narasumber kontra REDD+ saja
4. Konferensi pers atau pers rilis program REDD+

#### **Q7: Keberimbangan Narasumber**

1. Narasumber berasal dari pihak yang pro program REDD+ saja
2. Narasumber berasal dari pihak yang kontra REDD+ saja
3. Narasumber berimbang atau proporsional karena berasal dari dua pihak sekaligus, baik yang pro maupun kontra program REDD+

#### **Q8: Keberimbangan Sisi Pemberitaan**

1. Berita memberikan penekanan dan/atau prioritas pada pihak yang pro program REDD+ saja

2. Berita memberikan penekanan dan/atau prioritas pada pihak yang kontra REDD+ saja
3. Berita memberikan penekanan dan/atau prioritas berimbang atau proporsional pada dua sisi berita sekaligus, baik yang pro maupun kontra program REDD+

#### **Q9: Keberimbangan Perspektif**

1. Berita disuguhkan dari sudut pandang pihak yang pro program REDD+
2. Berita disuguhkan dari sudut pandang pihak yang kontra program REDD+
3. Berita disuguhkan dari sudut pandang kedua belah pihak baik yang pro maupun kontra program REDD+

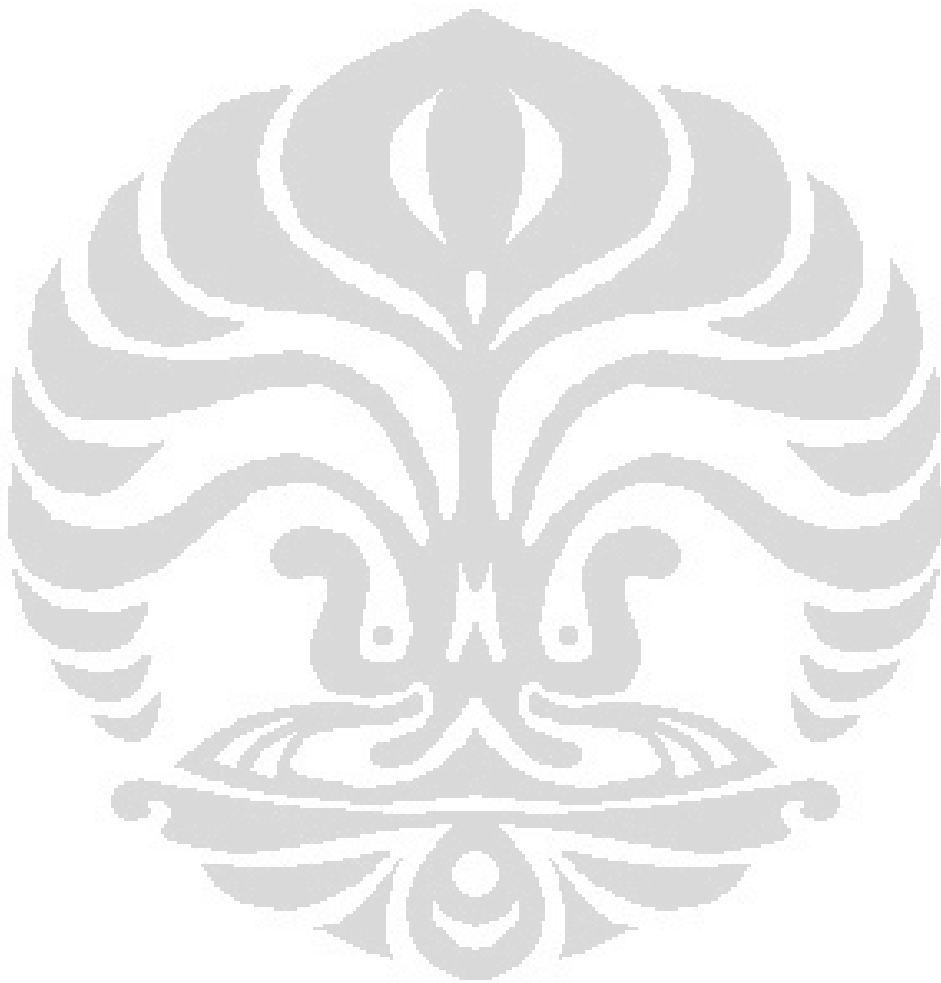
#### **Q10: Jurnalisme Lingkungan**

Jurnalisme lingkungan dapat didefinisikan sebagai proses kerja jurnalisme melalui pengumpulan, verifikasi, distribusi dan penyampaian informasi terbaru berkaitan dengan berbagai peristiwa, kecenderungan dan permasalahan masyarakat, yang berhubungan dengan dunia non-manusia di mana manusia berinteraksi di dalamnya.

1. Pro berkelanjutan: Langkah hidup yang mamou mendukung kehidupan berkelanjutan, kondisi lingkungan hidup yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang
2. Biosentris: Kesetaraan spesies, mengakui bahwa setiap spesies memiliki hak terhadap ruang hidup, sehingga perubahan lingkungan hidup (pembangunan) harus memperhatikan dan mempertimbangkan keunikan setiap spesies dan sistem-sistem di dalamnya
3. Pro keadilan lingkungan: berpihak pada kaum yang lemah, agar mendapatkan akses setara terhadap lingkungan yang bersih, sehat dan dapat terhindar dari dampak negatif kerusakan lingkungan
4. Profesional: memahami materi dan isu-isu lingkungan hidup, menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik, menghormati etika profesi, dan menaati hukum.
5. Tidak termasuk ke dalam empat butir di atas



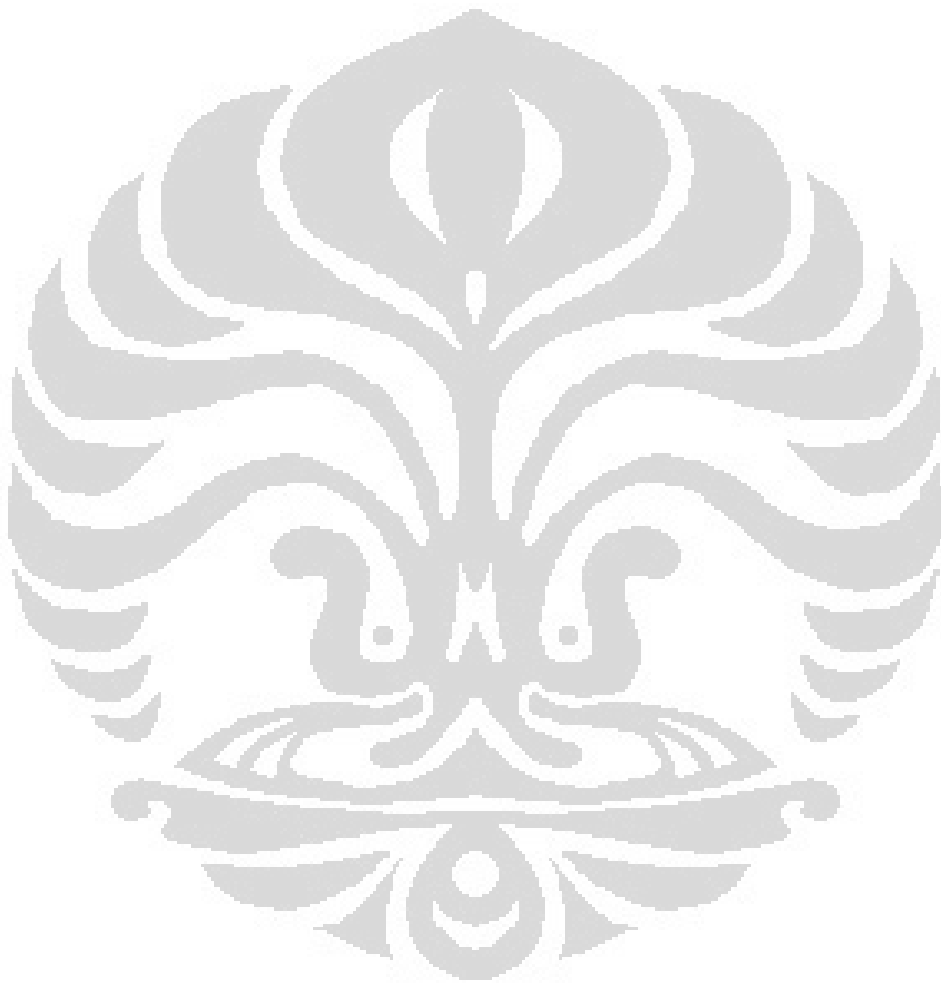
**LAMPIRAN 3**  
**LEMBAR CODING**



### CODING

Berita	Tema Berita		Latar Belakang Berita		Citra Isu		Jangkauan Berita		Narasumber Berita		Asal Pemberitaan		Keberimbangan Nara Sumber		Keberimbangan Sisi Pemberitaan		Keberimbangan Perspektif		Jurnalisme Lingkungan	
	Coder A	Coder B	Coder A	Coder B	Coder A	Coder B	Coder A	Coder B	Coder A	Coder B	Coder A	Coder B	Coder A	Coder B	Coder A	Coder B	Coder A	Coder B	Coder A	Coder B
Berita 1	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5
Berita 2	4	4	2	3	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Berita 3	4	4	3	3	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	5	5
Berita 4	3	3	3	1	1	1	1	1	6	6	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Berita 5	1	1	2	2	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Berita 6	4	4	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	2	2	2	2	2	2	5	5
Berita 7	4	4	3	3	1	1	2	2	3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	3	3
Berita 8	1	1	3	3	1	1	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5
Berita 9	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Berita 10	2	2	3	3	1	1	2	2	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5
Berita 11	2	2	3	3	1	1	2	2	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
Berita 12	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	5	5
Berita 13	4	4	2	2	1	1	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2
Berita 14	4	4	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2
Berita 15	1	3	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
Berita 16	2	2	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Berita 17	2	2	1	1	4	1	2	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Berita 18	2	2	3	3	4	1	2	1	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Berita 19	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Berita 20	1	1	3	3	1	1	1	1	3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	5	5
Berita 21	2	2	3	3	1	1	3	3	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5
Berita 22	2	2	3	3	1	1	3	3	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5
Berita 23	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5
Berita 24	2	2	2	1	1	1	3	3	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Berita 25	3	3	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3

**LAMPIRAN 4**  
**UJI RELIABILITAS**



## 1. TEMA BERITA

Berita	Hasil		Frekuensi dari Kedua Coder			
	Coder A	Coder B	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
Berita 1	3	3	0	0	2	0
Berita 2	4	4	0	0	0	2
Berita 3	4	4	0	0	0	2
Berita 4	3	3	0	0	2	0
Berita 5	1	1	2	0	0	0
Berita 6	4	4	0	0	0	2
Berita 7	4	4	0	0	0	2
Berita 8	1	1	2	0	0	0
Berita 9	1	1	2	0	0	0
Berita 10	2	2	2	0	0	0
Berita 11	2	2	2	0	0	0
Berita 12	1	3	1	0	1	0
Berita 13	4	4	0	0	0	2
Berita 14	4	4	0	0	0	2
Berita 15	1	3	1	0	1	0
Berita 16	2	2	0	2	0	0
Berita 17	2	2	0	2	0	0
Berita 18	2	2	0	2	0	0
Berita 19	4	4	0	0	0	2
Berita 20	1	1	2	0	0	0
Berita 21	2	2	0	2	0	0
Berita 22	2	2	0	2	0	0
Berita 23	3	2	0	1	1	0
Berita 24	2	2	0	2	0	0
Berita 25	3	3	0	0	2	0
			$\Sigma = 10$	$\Sigma = 17$	$\Sigma = 9$	$\Sigma = 14$

$$pfu = (1 \times 1) + (1 \times 1) + (1 \times 1) = 3$$

$$\begin{aligned} pmt &= (10 \times 17) + (17 \times 9) + (9 \times 14) + (14 \times 10) + (10 \times 9) + (17 \times 14) \\ &= 170 + 153 + 126 + 140 + 90 + 238 \\ &= 917 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Reliabilitas Antar-Coder} &= \frac{nm-1}{m-1} \left( \frac{\sum pfu}{\sum pmt} \right) \\ &= \frac{(25)(2)-1}{2-1} \left( \frac{3}{917} \right) \\ &= 1 - \frac{49}{1} \left( \frac{3}{917} \right) \\ &= 1 - 49 (0.003) \\ &= 0,84 \end{aligned}$$

## 2. LATAR BELAKANG BERITA

Berita	Hasil		Frekuensi dari Kedua Coder		
	Coder A	Coder B	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Berita 1	1	1	2	0	0
<b>Berita 2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Berita 3	3	3	0	0	2
<b>Berita 4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Berita 5	2	2	0	2	0
Berita 6	1	1	2	0	0
Berita 7	3	3	0	0	2
Berita 8	3	3	0	0	2
Berita 9	1	1	2	0	0
Berita 10	3	3	0	0	2
Berita 11	3	3	0	0	2
<b>Berita 12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Berita 13	2	2	0	2	0
Berita 14	1	1	2	0	0
Berita 15	1	1	2	0	0
Berita 16	1	1	2	0	0
Berita 17	1	1	2	0	0
Berita 18	3	3	0	0	2
Berita 19	3	3	0	0	2
Berita 20	3	3	0	0	2
Berita 21	3	3	0	0	2
Berita 22	3	3	0	0	2
<b>Berita 23</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Berita 24</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Berita 25	1	1	0	2	0
			$\Sigma = 18$	$\Sigma = 9$	$\Sigma = 23$

$$pfu = (1 \times 1) + (1 \times 1) + (1 \times 1) + (1 \times 1) + (1 \times 1) = 5$$

$$pmt = (18 \times 9) + (9 \times 23) + 23 \times 18 = 162 + 207 + 414 = 783$$

$$\text{Reliabilitas Antar-coder} = \frac{nm-1}{m-1} \left( \frac{\Sigma pfu}{\Sigma pmt} \right)$$

$$= \frac{(25)(2)-1}{2-1} \left( \frac{5}{783} \right)$$

$$= 1 - \frac{49}{1} \left( \frac{5}{783} \right)$$

$$= 1 - 49 (0.006)$$

$$= 0,69$$

### 3. CITRA ISU

Berita	Hasil		Frekuensi dari Kedua Coder			
	Coder A	Coder B	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
Berita 1	1	1	2	0	0	0
Berita 2	2	2	0	2	0	0
Berita 3	1	1	2	0	0	0
Berita 4	1	1	2	0	0	0
Berita 5	1	1	2	0	0	0
Berita 6	2	2	0	2	0	0
Berita 7	1	1	2	0	0	0
Berita 8	1	1	2	0	0	0
Berita 9	1	1	2	0	0	0
Berita 10	1	1	2	0	0	0
Berita 11	1	1	2	0	0	0
Berita 12	1	1	2	0	0	0
Berita 13	1	1	2	0	0	0
Berita 14	1	1	2	0	0	0
Berita 15	1	1	2	0	0	0
Berita 16	1	1	2	0	0	0
Berita 17	4	1	1	0	0	1
Berita 18	4	1	1	0	0	1
Berita 19	2	2	0	2	0	0
Berita 20	1	1	2	0	0	0
Berita 21	1	1	2	0	0	0
Berita 22	1	1	2	0	0	0
Berita 23	1	1	2	0	0	0
Berita 24	1	1	2	0	0	0
Berita 25	1	1	2	0	0	0
			$\Sigma = 42$	$\Sigma = 6$	$\Sigma = 0$	$\Sigma = 2$

$$p_{fu} = (1 \times 1) + (1 \times 1) = 2$$

$$p_{mt} = (42 \times 6) + (6 \times 0) + (0 \times 2) + (42 \times 0) + (6 \times 2) + (42 \times 2) \\ = 252 + 0 + 0 + 0 + 12 + 84 = 348$$

$$\text{Reliabilitas Antar-Coder} = \frac{nm-1}{m-1} \left( \frac{\sum p_{fu}}{\sum p_{mt}} \right) \\ = \frac{(25)(2)-1}{2-1} \left( \frac{2}{348} \right) \\ = 1 - \frac{49}{1} \left( \frac{2}{348} \right) \\ = 1 - 49 (0.005) \\ = 0,72$$

#### 4. JANGKAUAN BERITA

Berita	Hasil		Frekuensi dari Kedua Coder		
	Coder A	Coder B	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Berita 1	2	2	0	2	0
Berita 2	2	2	0	2	0
Berita 3	1	1	2	0	0
Berita 4	1	1	2	0	0
Berita 5	3	3	0	0	2
Berita 6	2	2	0	2	0
Berita 7	2	2	0	2	0
Berita 8	2	2	0	2	0
Berita 9	2	2	0	2	0
Berita 10	2	2	0	2	0
Berita 11	2	2	0	2	0
Berita 12	1	1	2	0	0
Berita 13	3	3	0	0	2
Berita 14	3	3	0	0	2
Berita 15	3	3	0	0	2
Berita 16	2	2	0	2	0
Berita 17	2	2	0	2	0
Berita 18	2	1	1	1	0
Berita 19	2	2	0	2	0
Berita 20	1	1	2	0	0
Berita 21	3	3	0	0	2
Berita 22	3	3	0	0	2
Berita 23	1	1	2	0	0
Berita 24	3	3	0	0	2
Berita 25	2	3	0	1	1
			$\Sigma = 11$	$\Sigma = 24$	$\Sigma = 15$

$pfu = (1 \times 1) + (1 \times 1) = 2$   
 $pmt = (11 \times 24) + (24 \times 15) + (15 \times 11) = 264 + 360 + 165 = 789$

Reliabilitas Antar-coder =  $\frac{nm-1}{m-1} \left( \frac{\Sigma pfu}{\Sigma pmt} \right)$   
 $= \frac{(25)(2)-1}{2-1} \left( \frac{2}{789} \right)$   
 $= 1 - \frac{49}{1} \left( \frac{2}{789} \right)$   
 $= 1 - 49 (0.026)$   
 $= 0,88$

## 5. NARASUMBER BERITA

Berita	Hasil		Frekuensi dari Kedua Coder					
	Coder A	Coder B	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5	Kategori 6
Berita 1	1	1	2	0	0	0	0	0
Berita 2	4	4	0	0	0	2	0	0
Berita 3	1	1	2	0	0	0	0	0
Berita 4	6	6	0	0	0	0	0	2
Berita 5	1	1	2	0	0	0	0	0
Berita 6	3	3	0	0	2	0	0	0
Berita 7	3	3	0	0	2	0	0	0
Berita 8	4	4	0	0	0	2	0	0
Berita 9	1	1	2	0	0	0	0	0
Berita 10	6	6	0	0	0	0	0	2
Berita 11	6	6	0	0	0	0	0	2
Berita 12	1	1	2	0	0	0	0	0
Berita 13	3	3	0	0	2	0	0	0
Berita 14	3	3	0	0	2	0	0	0
Berita 15	1	1	2	0	0	0	0	0
Berita 16	3	3	0	0	2	0	0	0
Berita 17	3	3	0	0	2	0	0	0
Berita 18	1	3	1	0	1	0	0	0
Berita 19	2	2	0	2	0	0	0	0
Berita 20	3	3	0	0	2	0	0	0
Berita 21	5	5	0	0	0	0	2	0
Berita 22	6	6	0	0	0	0	0	2
Berita 23	1	1	2	0	0	0	0	0
Berita 24	1	1	2	0	0	0	0	0
Berita 25	3	1	1	0	1	0	0	0
			$\Sigma = 18$	$\Sigma = 2$	$\Sigma = 16$	$\Sigma = 4$	$\Sigma = 2$	$\Sigma = 8$
<p> <math>p_{fu} = (1 \times 1) + (1 \times 1) = 2</math>  <math>p_{mt} = (18 \times 2) + (2 \times 16) + (16 \times 4) + (4 \times 2) + (2 \times 8) + (18 \times 16) + (18 \times 4) + (18 \times 2) + (18 \times 8) + (2 \times 4) + (2 \times 2) + (16 \times 2) + (16 \times 8) + (4 \times 8) + (2 \times 8)</math>  <math>= 36 + 32 + 64 + 8 + 16 + 288 + 72 + 36 + 144 + 8 + 4 + 32 + 128 + 32 + 16 = 916</math> </p> <p> Reliabilitas Antar-coder = <math>\frac{nm-1}{m-1} \left( \frac{\sum p_{fu}}{\sum p_{mt}} \right)</math>  <math>= \frac{(25)(2)-1}{2-1} \left( \frac{2}{916} \right)</math>  <math>= 1 - \frac{49}{1} \left( \frac{2}{916} \right)</math>  <math>= 1 - 49 (0.002)</math>  <math>= 0,89</math> </p>								



## 6. ASAL PEMBERITAAN

Berita	Hasil		Frekuensi dari Kedua Coder			
	Coder A	Coder B	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
Berita 1	1	1	2	0	0	0
Berita 2	2	2	0	2	0	0
Berita 3	4	4	0	0	0	2
Berita 4	4	4	0	0	0	2
Berita 5	1	1	2	0	0	0
Berita 6	4	4	0	0	0	2
Berita 7	4	4	0	0	0	2
Berita 8	2	2	0	2	0	0
Berita 9	3	3	0	0	2	0
Berita 10	1	1	2	0	0	0
Berita 11	1	1	2	0	0	0
Berita 12	1	2	1	1	0	0
Berita 13	2	2	0	2	0	0
Berita 14	2	2	0	2	0	0
Berita 15	1	1	2	0	0	0
Berita 16	4	4	0	0	0	2
Berita 17	2	2	0	2	0	0
Berita 18	1	3	1	0	1	0
Berita 19	2	2	0	2	0	0
Berita 20	4	4	0	0	0	2
Berita 21	1	1	2	0	0	0
Berita 22	1	1	2	0	0	0
Berita 23	1	1	2	0	0	0
Berita 24	3	3	0	0	2	0
Berita 25	1	1	2	0	0	0
			$\sum = 20$	$\sum = 12$	$\sum = 5$	$\sum = 13$

$$p_{fu} = (1 \times 1) + (1 \times 1) = 2$$

$$p_{mt} = (20 \times 12) + (12 \times 5) + (5 \times 13) + (20 \times 13) + (20 \times 5) + (12 \times 13) \\ = 240 + 60 + 65 + 260 + 100 + 156 = 881$$

$$\text{Reliabilitas Antar-Coder} = \frac{nm-1}{m-1} \left( \frac{\sum p_{fu}}{\sum p_{mt}} \right) \\ = \frac{(25)(2)-1}{2-1} \left( \frac{2}{881} \right) \\ = 1 - \frac{49}{1} \left( \frac{2}{881} \right) \\ = 1 - 49 (0.002) \\ = 0,89$$

## 7. KEBERIMBANGAN NARASUMBER

Berita	Hasil		Frekuensi dari Kedua Coder		
	Coder A	Coder B	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Berita 1	1	1	2	0	0
Berita 2	2	2	0	2	0
Berita 3	1	1	2	0	0
Berita 4	1	1	2	0	0
Berita 5	1	1	2	0	0
Berita 6	2	2	0	2	0
Berita 7	1	1	2	0	0
Berita 8	2	2	0	2	0
Berita 9	1	1	2	0	0
Berita 10	1	1	2	0	0
Berita 11	1	1	2	0	0
Berita 12	1	1	2	0	0
Berita 13	1	1	2	0	0
Berita 14	1	1	2	0	0
Berita 15	1	1	2	0	0
Berita 16	1	1	2	0	0
Berita 17	1	1	2	0	0
Berita 18	1	1	2	0	0
Berita 19	2	2	0	2	0
Berita 20	1	1	2	0	0
Berita 21	1	1	2	0	0
Berita 22	1	1	2	0	0
Berita 23	1	1	2	0	0
Berita 24	1	1	2	0	0
Berita 25	1	1	2	0	0
			$\Sigma = 42$	$\Sigma = 8$	$\Sigma = 0$

$pfu = 0$   
 $pmt = (42 \times 8) + (8 \times 0) + (0 \times 42) = 336 + 0 + 0 = 336$

Reliabilitas Antar-coder =  $\frac{nm-1}{m-1} \left( \frac{\Sigma pfu}{\Sigma pmt} \right)$   
 $= \frac{(25)(2)-1}{2-1} \left( \frac{0}{336} \right)$   
 $= 1 - \frac{49}{1} \left( \frac{0}{336} \right)$   
 $= 1 - 49(0)$   
 $= 1$

## 8. KEBERIMBANGAN SISI PEMBERITAAN

Berita	Hasil		Frekuensi dari Kedua Coder		
	Coder A	Coder B	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Berita 1	1	1	2	0	0
Berita 2	2	2	0	2	0
Berita 3	1	1	2	0	0
Berita 4	1	1	2	0	0
Berita 5	1	1	2	0	0
Berita 6	2	2	0	2	0
Berita 7	1	1	2	0	0
Berita 8	2	2	0	2	0
Berita 9	1	1	2	0	0
Berita 10	1	1	2	0	0
Berita 11	1	1	2	0	0
Berita 12	1	1	2	0	0
Berita 13	1	1	2	0	0
Berita 14	1	1	2	0	0
Berita 15	1	1	2	0	0
Berita 16	1	1	2	0	0
Berita 17	1	1	2	0	0
Berita 18	1	1	2	0	0
Berita 19	2	2	0	2	0
Berita 20	1	1	2	0	0
Berita 21	1	1	2	0	0
Berita 22	1	1	2	0	0
Berita 23	1	1	2	0	0
Berita 24	1	1	2	0	0
Berita 25	1	1	2	0	0
			$\Sigma = 42$	$\Sigma = 8$	$\Sigma = 0$
<p> <math>p_{fu} = 0</math>  <math>p_{mt} = (42 \times 8) + (8 \times 0) + (0 \times 42) = 336 + 0 + 0 = 336</math> </p> <p>                     Reliabilitas Antar-coder = <math>\frac{nm-1}{m-1} \left( \frac{\sum p_{fu}}{\sum p_{mt}} \right)</math>  <math>= \frac{(25)(2)-1}{2-1} \left( \frac{0}{336} \right)</math>  <math>= 1 - \frac{49}{1} \left( \frac{0}{336} \right)</math>  <math>= 1 - 49(0)</math>  <math>= 1</math> </p>					

## 9. KEBERIMBANGAN PERSPEKTIF

Berita	Hasil		Frekuensi dari Kedua Coder		
	Coder A	Coder B	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Berita 1	1	1	2	0	0
Berita 2	2	2	0	2	0
Berita 3	1	1	2	0	0
Berita 4	1	1	2	0	0
Berita 5	1	1	2	0	0
Berita 6	2	2	0	2	0
Berita 7	1	1	2	0	0
Berita 8	2	2	0	2	0
Berita 9	1	1	2	0	0
Berita 10	1	1	2	0	0
Berita 11	1	1	2	0	0
Berita 12	1	1	2	0	0
Berita 13	1	1	2	0	0
Berita 14	1	1	2	0	0
Berita 15	1	1	2	0	0
Berita 16	1	1	2	0	0
Berita 17	1	1	2	0	0
Berita 18	1	1	2	0	0
Berita 19	2	2	0	2	0
Berita 20	1	1	2	0	0
Berita 21	1	1	2	0	0
Berita 22	1	1	2	0	0
Berita 23	1	1	2	0	0
Berita 24	1	1	2	0	0
Berita 25	1	1	2	0	0
			$\Sigma = 42$	$\Sigma = 8$	$\Sigma = 0$

$p_{fu} = 0$   
 $p_{mt} = (42 \times 8) + (8 \times 0) + (0 \times 42) = 336 + 0 + 0 = 336$

Reliabilitas Antar-coder =  $\frac{nm-1}{m-1} \left( \frac{\sum p_{fu}}{\sum p_{mt}} \right)$   
 $= \frac{(25)(2)-1}{2-1} \left( \frac{0}{336} \right)$   
 $= 1 - \frac{49}{1} \left( \frac{0}{336} \right)$   
 $= 1 - 49(0)$   
 $= 1$

## 10. JURNALISME LINGKUNGAN

Berita	Hasil		Frekuensi dari Kedua Coder				
	Coder A	Coder B	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5
Berita 1	5	5	0	0	0	0	2
Berita 2	3	3	0	0	2	0	0
Berita 3	5	5	0	0	0	0	2
Berita 4	1	1	2	0	0	0	0
Berita 5	2	2	0	2	0	0	0
Berita 6	5	5	0	0	0	0	2
Berita 7	3	3	0	0	2	0	0
Berita 8	5	5	0	0	0	0	2
Berita 9	1	1	2	0	0	0	0
Berita 10	5	5	0	0	0	0	2
Berita 11	3	3	0	0	2	0	0
Berita 12	5	5	0	0	0	0	2
Berita 13	2	2	0	2	0	0	0
Berita 14	2	2	0	2	0	0	0
Berita 15	3	3	0	0	2	0	0
Berita 16	1	1	2	0	0	0	0
Berita 17	1	1	2	0	0	0	0
Berita 18	1	1	2	0	0	0	0
Berita 19	2	2	0	2	0	0	0
Berita 20	5	5	0	0	0	0	2
Berita 21	5	5	0	0	0	0	2
Berita 22	5	5	0	0	0	0	2
Berita 23	5	5	0	0	0	0	2
Berita 24	1	1	2	0	0	0	0
Berita 25	3	3	0	0	2	0	0
			$\sum = 6$	$\sum = 4$	$\sum = 4$	$\sum = 0$	$\sum = 10$

$pfu = 0$   
 $pmt = (6 \times 4) + (4 \times 4) + (4 \times 0) + (0 \times 10) + (10 \times 6) + (6 \times 4) + (6 \times 0) + (4 \times 0) + (4 \times 10) + (4 \times 10)$   
 $= 24 + 16 + 0 + 0 + 60 + 24 + 0 + 0 + 40 + 40 = 204$

Reliabilitas Antar-coder  $= \frac{nm-1}{m-1} \left( \frac{\sum pfu}{\sum pmt} \right)$   
 $= \frac{(25)(2)-1}{2-1} \left( \frac{2}{204} \right)$   
 $= 1 - \frac{49}{1} \left( \frac{2}{204} \right)$   
 $= 1 - 49 (0.098)$   
 $= 1 - 0.48$   
 $= 0.52$